Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Suwawa, Desember 2020

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 - 2026

Disusun oleh:

KELOMPOK KERJA KLHS

SK Bupati Bone Bolango No. 151/KEP/BUP.BB/123/2020

Dr. Fitryane Lihawa, M.Si

Ketua Tim Ahli

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat ijin dan Ridho-Nya, maka Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 bisa diselesaikan. Tujuan dari KLHS ini adalah untuk diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Penyusunan KLHS ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KLHS ini dilakukan pada tahap awal penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021-2026, sehingga dapat dihasilkan suatu kebijakan, rencana dan program yang telah terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021-2026, Tim penyusun RPJMD dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Gorontalo, Desember 2020

Kepala BAPPEDA Bone Bolango

BASIR NOHO,M.Amd.Pem

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I. PENDAHULUAN 1
2.1 Latar Belakang 1
2.2 Dasar Hukum KLHS RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2
2.3 Tujuan dan Manfaat KLHS 4
2.4 Proses dan Metodologi Penyelenggaraan KLHS 4
BAB II. TEORI DASAR KLHS 7
2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 7
2.1.1 Tata Cara Penyelenggaraan KLHS RPJMD 8
2.1.2 Pengkajian Kebijakan Rencana Program dalam KLHS 10
2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 11
2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 14
2.4 Enam muatan KLHS 16
2.4.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 16
2.4.2 Risiko dan Dampak Lingkungan 17
2.4.3 Jasa Ekosistem 18
2.4.4 Sumber Daya Alam 21
2.4.5 Perubahan Iklim 21
2.4.6 Keanekaragaman Hayati 22
BAB III. PROFIL KABUPATEN BONE BOLANGO 23
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone Bolango 23
3.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah 23
3.1.2 Topografi 25
3.1.3 Bentuk Lahan 25
3.1.4 Kondisi Geologi 26
3.1.5 Tanah 28
3.1.6 Hidrologi 28

3.1.7 Meteorologi dan Klimatologi 31
3.1.8 Kawasan Rawan Bencana 34
3.1.9 Struktur Ruang Kabupaten Bone Bolango 38
3.1.10 Pola Ruang Kabupaten Bone Bolango 44
3.1.11 Persampahan 50
3.1.12 Kondisi Demografi dan Sosial Budaya 51
3.2 Daya Dukung Lingkungan Hidup 59
3.2.1 Daya Dukung Air di Kabupaten Bone Bolango 59
3.2.2 Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Bone Bolango 64
3.2.3 Daya Dukung Peternakan 66
3.2.4 Daya dukung lahan pemukiman 67
3.3 Jasa Ekosistem 69
3.3.1 Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem 70
3.3.2 Status Daya Dukung Lingkungan Hidup 79
3.4 Sumber Daya Alam 83
3.5 Perubahan Iklim 84
3.6 Keanekaragaman Hayati 85
3.7 Kondisi Pencapaian TPB di Kabupaten Bone Bolango 86
3.8 Kondisi Keuangan Daerah 87
3.8.1 Produk Domestik Regional Bruto 87
3.8.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu 89
3.8.3 Neraca Daerah 96
3.8.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 98
3.8.5 Analisis Pembiayaan 99
3.8.6 Kerangka Pendanaan 101
BAB IV. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 108
4.1 Capaian Target TPB Pilar Sosial 108
4.2 Capaian Target TPB Pilar Ekonomi 148
4.3 Capaian Target TPB Pilar Lingkungan Hidup 176
4.4 Capaian Target TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan 196
4.5 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bone Bolango 203
4.6 Isu Prioritas dan Arah Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango 212

4.7 Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB 213
BAB V. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTA 216
5.1 Analisis Daya Dukung Lingkungan Hidup 216
5.2 Analisis Risiko/dampak Lingkungan 218
5.3 Analisis Jasa Ekosistem 219
5.4 Analisis Sumber Daya Alam 220
5.5 Analisis Perubahan Iklim 220
5.6 Analisis Keanekaragaman Hayati 221
BAB VI. ALTERNATIF REKOMENDASI KLHS UNTUK RPJMD KABUPATEN BONE BOLANGO 231
6.1 Arah Kebijakan Kabupaten Bone Bolango 231
6.1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 231
6.1.2 Visi, Misi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango 234
6.2 Rumusan Alternatif 236
6.3 Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021 – 2026 241
BAB VII. PENUTUP 250
DAFTAR PUSTAKA 252

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tiga Konsep dan data utama dalam penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem. 20

Tabel 2. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango 23

Tabel 3. Kemiringan Lereng Kabupaten Bone Bolango..... 25

Tabel 4. Luas Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Bone Bolango 29

Tabel 5. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango..... 30

Tabel 6. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Bulanan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 - 2019..... 31

Tabel 7. Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 32

Tabel 8. Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 33

Tabel 9. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya di Kabupaten Bone Bolango..... 45

Tabel 10. Volume sampah yang ditangani di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 50

Tabel 11. Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango Per Kecamatan Tahun 2015 – Tahun 2019..... 51

Tabel 12. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bone Bolango Per Kecamatan (Tahun 2018 – Tahun 2019)..... 53

Tabel 13. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2019 54

Tabel 14. Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 55

Tabel 15. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2019 56

Tabel 16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017- 2019..... 56

Tabel 17. Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 - 2019..... 57

Tabel 18. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2019..... 58

Tabel 19. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2019 58

Tabel 20. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang 61

Tabel 21. Jumlah curah hujan rata-rata tahunan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2019 61

Tabel 22. Daya dukung lahan di Kabupaten Bone Bolango..... 65

Tabel 23. Daya Dukung Hijauan Pakan Ternak di Kabupaten Bone Bolango 66

Tabel 24. Daya Dukung Lahan Pemukiman Kabupaten Bone Bolango 67

Tabel 25. Daya dukung lahan pemukiman menurut kecamatan di Kabupaten Bone Bolango 68

Tabel 26. Distribusi Jasa Ekoaiatem Penyediaan Pangan Kabupaten Bone Bolango 72

Tabel 27. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyediaan Air Kabupaten Bone Bolango 74

Tabel 28. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor Kabupaten Bone Bolango 76

Tabel 29. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Bone Bolango 78

Tabel 30. Status Daya Dukung Pangan Indikatif Kabupaten Bone Bolango80

Tabel 31. Status Daya Dukung Air Indikatif Kabupaten Bone Bolango 82

Tabel 32. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar) di Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2015-2019 87

Tabel 33. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%), di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 – 2019 88

Tabel 34. Rata-rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Bone Bolango..... 91

Tabel 35. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2020 96

Tabel 36. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018-2020 98

Tabel 37. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018-2020 99

Tabel 38. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018-2020 99

Tabel 39. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017-2019 100

Tabel 40. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017-2019 100

Tabel 41. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022-2026 103

Tabel 42. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022-2026 106

Tabel 43. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022-2026 106

Tabel 44. Indikator pilar sosial yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional 109

Tabel 45. Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional 126

Tabel 46. Indikator TPB pada pilar sosial yang belum dilaksanakan 136

Tabel 47. Indikator TPB pada pilar sosial yang belum memiliki data 137

Tabel 48. Indikator pada pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional 149

Tabel 49. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional 160

Tabel 50. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum dilaksanakan... 167

Tabel 51. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum memiliki data .. 168

Tabel 52. Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup 177

Tabel 53. Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup 181

Tabel 54. Indikator yang belum dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup 185

Tabel 55. Indikator yang belum memiliki data dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup 190

Tabel 56. Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan..... 197

Tabel 57. Indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan..... 199

Tabel 58. Indikator yang belum memiliki data pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan 200

Tabel 59. Isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango 203

Tabel 60. Proses sintesis isu pembangunan berkelanjutan dengan enam kriteria strategis..... 204

Tabel 61. Hasil analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango 208

Tabel 62. Pembagian peran para pihak dalam pencapaian TPB 213

Tabel 63. Hasil pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap enam muatan KLHS 223

Tabel 64. Rumusan alternatif rekomendasi KRP Bone Bolango 237

Tabel 65. Matriks penelaahan integrasi KLHS dalam RPJMD..... 243

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. KLHS dalam UU No. 32 Tahun 2009 8

Gambar 2. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan 8

Gambar 3. Mekanisme penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 10

Gambar 4. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 12

Gambar 5. Arsitektur Rencana Pembangunan Daerah 13

Gambar 6. Sinkronisasi perencanaan dan peanggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional 14

Gambar 7. Startegi Pengelolaan Risiko 18

Gambar 8. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango 24

Gambar 9. Potensi Paparan Bencana di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 34

Gambar 10. Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Bone Bolango 36

Gambar 11. Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Bone Bolango 38

Gambar 12. Peta Pola Ruang Kabupaten Bone Bolango 49

Gambar 13. Data Eksisting dan Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Bone Bolango 10 Tahun Ke Depan 63

Gambar 14. Diagram Penentuan Daya Dukung Lahan 64

Gambar 15. Grafik daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019-2032 65

Gambar 16. Grafik daya dukung lahan pemukiman Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2030 68

Gambar 17. Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Bone Bolango 73

Gambar 18. Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kabupaten Bone Bolango 75

Gambar 19. Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bone Bolango 77

Gambar 20. Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Bone Bolango 79

Gambar 21. Peta Status Daya Dukung Pangan Indikatif Kabupaten Bone Bolango 81

Gambar 22. Peta Status Daya Dukung Air Indikatif Kabupaten Bone Bolango 83

Gambar 23. Grafik persentase hasil evaluasi pencapaian TPB 87

Gambar 24. Perkembangan Pendapatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2020 94

Gambar 25. Perkembangan Belanja Kabupaten Gorontalo 95

Gambar 26. Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 96

Gambar 27. Grafik capaian TPB untuk pilar sosial 108

Gambar 28. Capaian TPB untuk pilar ekonomi 148

Gambar 29. Hasil evaluasi TPB pilar lingkungan hidup 176

Gambar 30. Grafik hasil evaluasi pilar hukum dan tata kelola pemerintahan 196

Gambar 31. Arah TPB Kabupaten Bone Bolango 213

Gambar 32. Hasil evaluasi capaian dan prediksi indikator akses rumah tangga terhadap layanan air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango 217

Gambar 33. Hasil evaluasi capaian dan prediksi indikator akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau 217

Gambar 34. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 234

BAB I. PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebelah timur dan utara umumnya merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan aksesibilitas wilayah yang sangat terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten Konservasi. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kebijakan Daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD merupakan salah satu kebijakan, rencana dan program (KRP) pemerintah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada pasal 15 ayat (1) mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat KLHS guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Kewajiban dalam menyusun KLHS dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Pada ayat 2 diuraikan bahwa KLHS wajib dilaksanakan dalam menyusun dan mengevaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional dan RPJM Daerah. Kewajiban KLHS juga dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan RPJMD.

Dokumen ini merupakan hasil analisis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang ditujukan sebagai dasar bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

2.2 Dasar Hukum KLHS RPJMD Kabupaten Bone Bolango

Selain diamanatkan oleh UUPPLH Nomor 32/2009, isu lingkungan hidup juga dijadikan dasar pertimbangan utama dalam perencanaan program pembangunan daerah sehingga diperlukan adanya KLHS. Berikut ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang penyusunan KLHS

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Neri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone BolangoNomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031.

2.3 Tujuan dan Manfaat KLHS

Tujuan dari pelaksanaan KLHS adalah :

1. Diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
2. Menyusun rumusan alternatif rekomendasi dalam penyusunan RPJMD yang telah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Manfaat dari penyusunan KLHS adalah:

1. Menjamin terwujudnya pembangunan yang produktif dan berwawasan lingkungan hidup dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
2. Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan pada RPJMD Kabupaten Bone Bolango telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Bone Bolango melalui kebijakan, rencana, dan/atau program.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

2.4 Proses dan Metodologi Penyelenggaraan KLHS

Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan pada awal penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021 - 2026. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 diuraikan tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

1. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
   Tim pembuat KLHS telah ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 151/KEP/BUP.BB/123/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango.

2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;

   Pengkajian pembangunan berkelanjutan diawali dengan melakukan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango sejak Tahun 2016 s/d Tahun 2020. Hasil evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. Penentuan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui konsultasi publik yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 17 November 2020 di ruang rapat Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone Bolango. Uji publik dilaksanakan guna memperoleh aspirasi dari masyarakat terkait isu-isu riil yang terjadi. Isu tersebut kemudian diidentifikasi dan dirumuskan menjadi isu pembangunan berkelanjutan yang strategis dan prioritas dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.

   Uji Publik I dilaksanakan untuk menyepakati isu utama berdasarkan pilar lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum dan tata kelola; tantangan; dan kondisi pencapaian TPB dalam penyusunan KLHS RPJMD.

   Muatan KRP disandingkan dengan isu strategis hasil uji publik untuk diidentifikasi pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan diberi muatan pertimbangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Isu hasil uji publik dicross cutting dengan isu-isu strategis yang tercantum pada dokumen teknokratik RPJMD dan isu-isu strategis berdasarkan visi misi kepala daerah terpilih. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi isu terhadap isu TPB yang kemudian diurutkan berdasarkan ranking melalui analisis kesenjangan antara data eksisting dengan target yang telah ditetapkan

3. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan;
   Rumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan evaluasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis scenario menjadi dasar dalam perumusan alternatif dan rekomendasi KRP. Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan adalah mengembangkan berbagai alternatif perbaikan muatan yang sedang dalam proses penyusunan dan menjamin pembangunan berkelanjutan, melalui identifikasi muatan RPJMD yang

potensial memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan. Setelah itu, rekomendasi memberikan usulan perbaikan muatan RPJMD berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan. Rekomendasi berupa materi perbaikan RPJMD maupun informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup beserta tindak lanjut/skenario pencapaian target. Penyepakatan rekomendasi dan skenario pencapaian dilakukan pada Uji Publik II Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021-2026

4. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD
   Penjaminan kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan dalam penyelenggaraan KLHS.

BAB II. TEORI DASAR KLHS

2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrument dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada dalam bingkai pembangunan berkelanjutan (berwawasan lingkungan hidup) sesuai dengan norma hukum dan aturan yang berlaku dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, perhatian terhadap pembangunan lingkungan global, dan hukum international untuk lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KLHK RI, 2009). Dasar hukum KLHS dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, PP RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS, Permen LHK Nomor 16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam konteks KLHS untuk RPJMD, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

KLHS sebagai suatu kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada saat menyusun rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional dan RPJM daerah. Sebagaimana tercantum pada pasal 2, ayat (2) huruf a,b tercantum jenis dokumen yang wajib dibuatkan KLHS yaitu :

a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
b. Kebijakan, Rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup

Gambar 1. KLHS dalam UU No. 32 Tahun 2009
Sumber: Djuwita, (2019)

2.1.1 Tata Cara Penyelenggaraan KLHS RPJMD

Tata cara penyelenggaraan KLHS RPJMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD (Lihat Gambar 2)

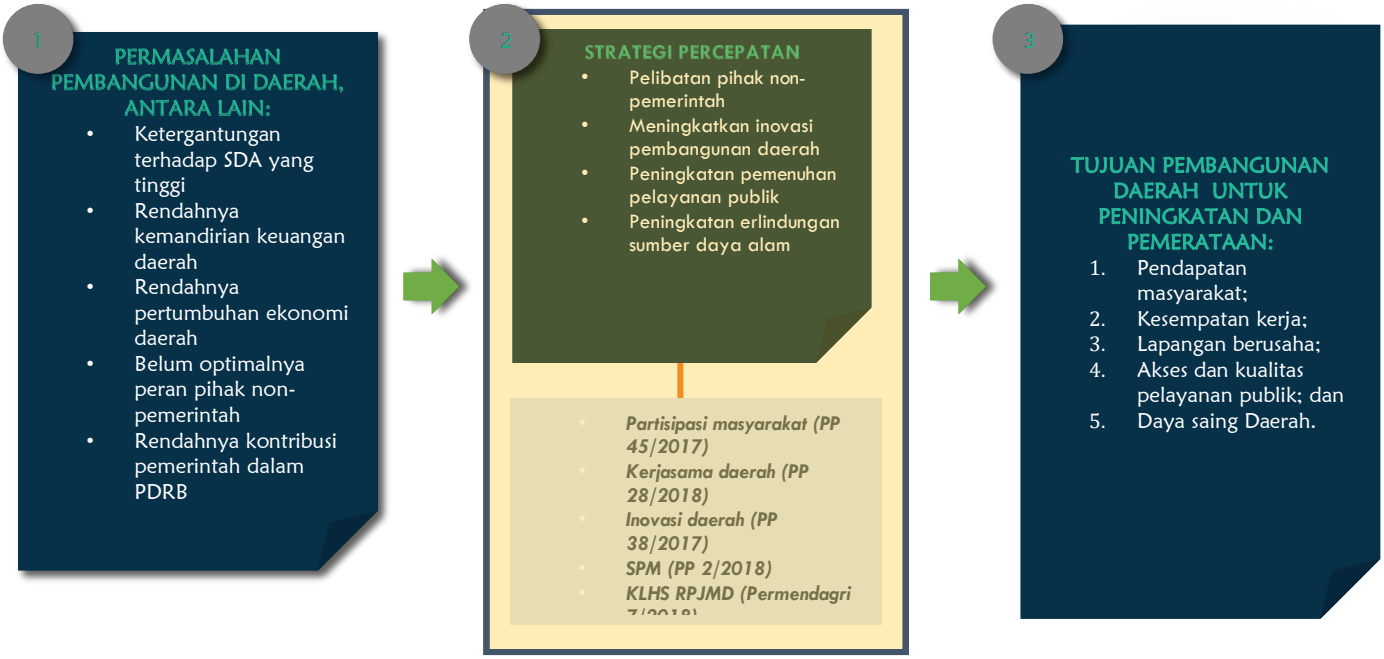

Gambar 2. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan

Tahapan penyelenggaraan KLHS menurut PP 46/2016 dilakukan dengan tahapan:

a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS dan;
c. Validasi KLHS

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

- Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Tahapan KLHS RPJM berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018; pasal 3 sebagai berikut:

a. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
   Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
   - kondisi umum daerah;
   - capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan;
   - pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan;
   Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
d. penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

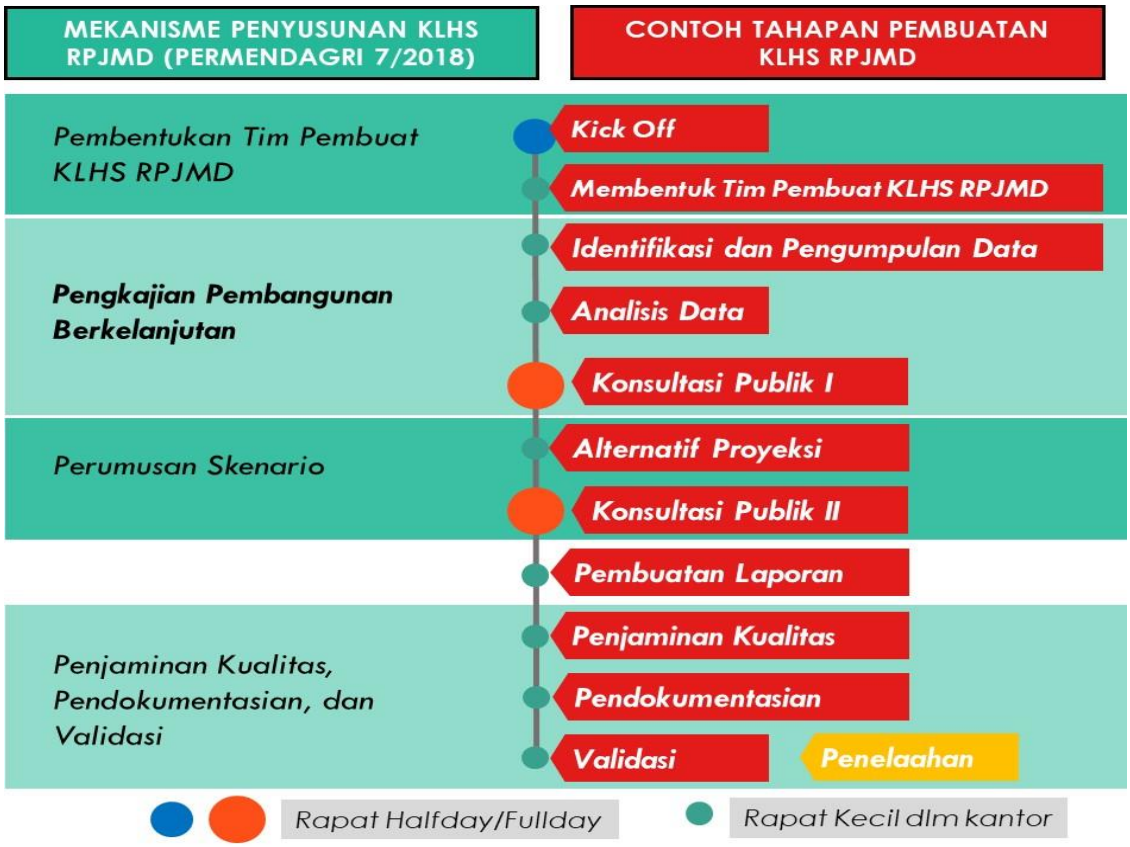

Gambar 3. Mekanisme penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018

Sumber : Dirjen Bina Pembangunan Daerah, (2019)

2.1.2 Pengkajian Kebijakan Rencana Program dalam KLHS

Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan tahapan:

a. Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan;
b. Melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
c. Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dan muatan KRP.

Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

- karakteristik wilayah;
- tingkat pentingnya potensi dampak;
- keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
- keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;

Hasil analisis paling sedikit memuat kajian:

a) kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
b) perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
c) kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

a. teknokratik;
   Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
b. partisipatif;
   Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
c. politis;
   Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah (Gambar 4).

Gambar 4. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Sumber : Dirjen Bina Pembangunan Daerah, (2019)

RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

1) Persiapan penyusunan
2) Penyusunan rancangan awal
3) Penyusunan rancangan
4) Pelaksanaan Musrenbang
5) Perumusan rancangan akhir
6) Penetapan

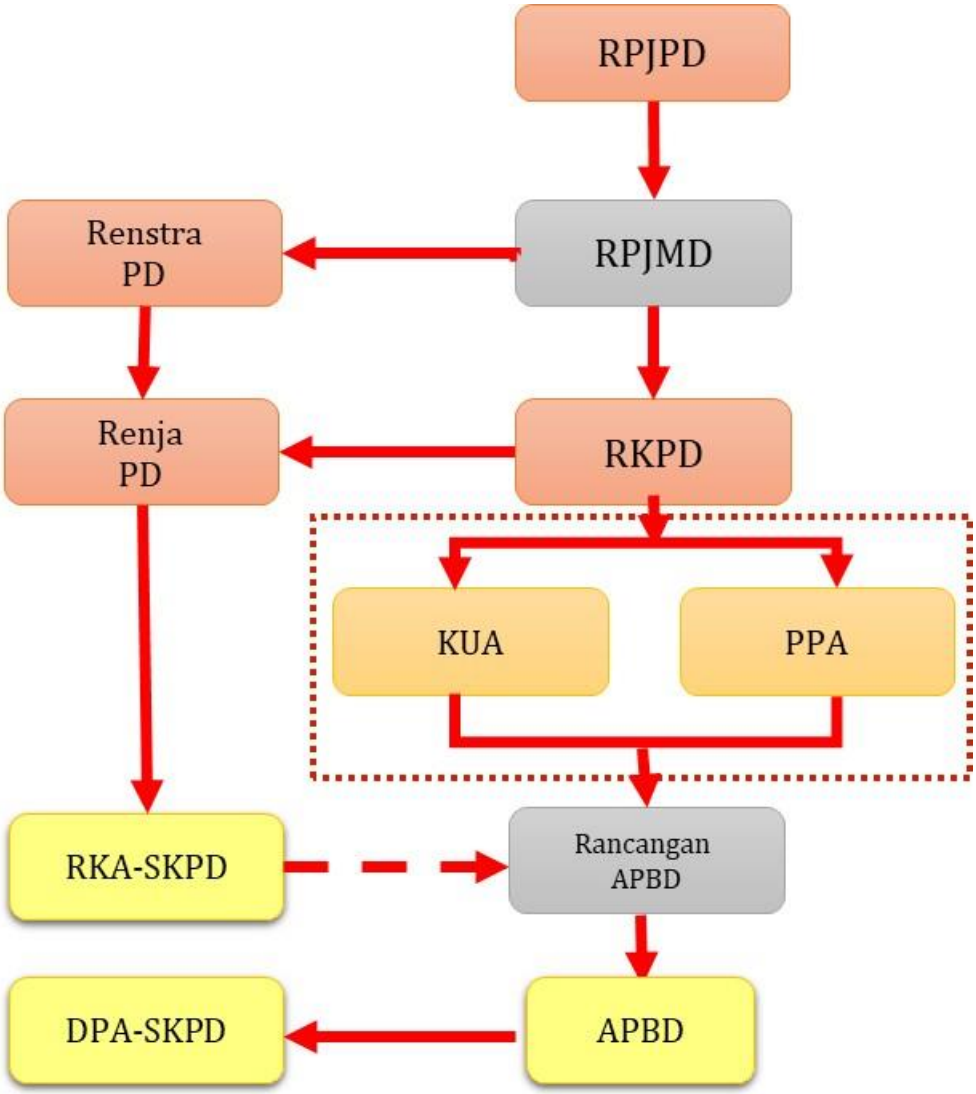

Gambar 5. Arsitektur Rencana Pembangunan Daerah
Sumber : Dirjen Bina Pembangunan Daerah, (2019)

- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD

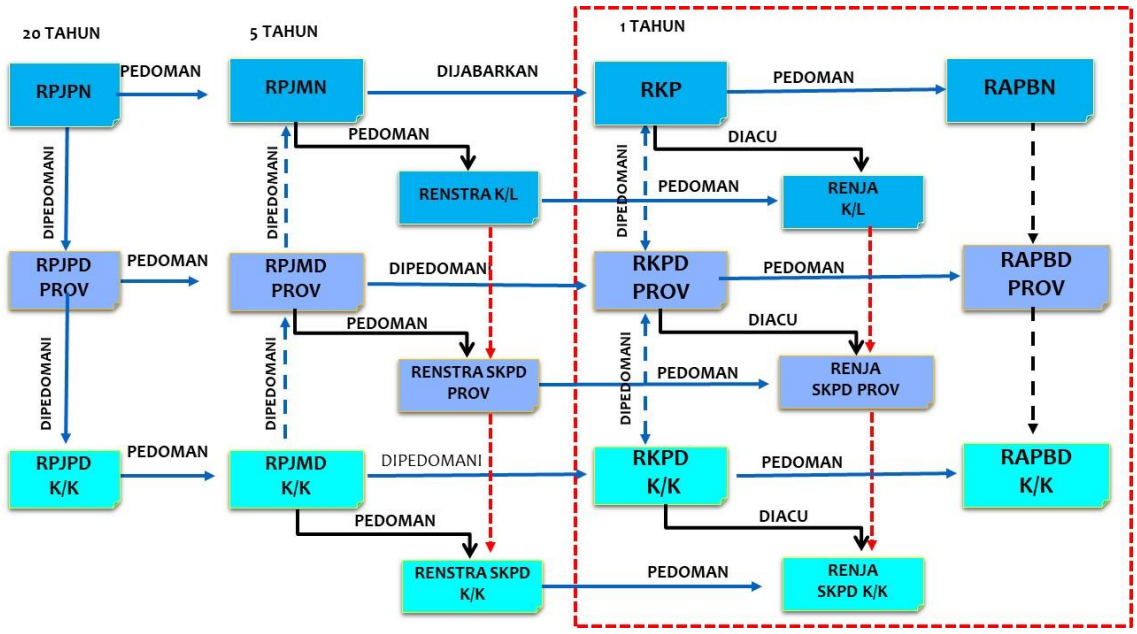

Gambar 6. Sinkronisasi perencanaan dan peanggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional

2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB. SDGs sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari :

1. Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan (*No poverty*)
   Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan (*Zero hunger*)
   Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera (*Good health and well-being*)
   Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas (*Quality education*)
   Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Tujuan 5 - Kesetaraan gender (*Gender equality*)
   Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
6. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak (*Clean water and sanitation*)
   Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
7. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau (*Affordable and clean energy*)
   Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent work and economic growth*)
   Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
9. Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur (*Industry, innovation, and infrastructure*)
   Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
10. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan (*Reduced inequalities*)
    Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara
11. Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan (*Sustainable cities and communities*)
    Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
12. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*Responsible consumption and production*)
    Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim (*Climate action*)
    Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya

14. Tujuan 14 - Ekosistem laut (*Life below water*)
    Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
15. Tujuan 15 - Ekosistem daratan (*Life on land*)
    Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati
16. Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (*Peace, justice, and strong institutions*)
    Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
17. Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnerships for the goals*)
    Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Tujuan-tujuan tersebut dikelompot menjadi 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pilar Sosial
2. Pilar EKonomi
3. Pilar Lingkungan
4. Pilar Hukum

2.4 Enam muatan KLHS

2.4.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009). Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem). Sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Norma Standar Prosedur dan kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, menyebutkan bahwa Ruang lingkup inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup terdiri dari: a) daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pulau dan kepulauan; b) daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor; dan/atau c). daya dukung dan daya tampung

sumber daya alam dan lingkungan hidup subyek lainnya seperti daerah aliran sungai, karst, pesisir dan laut, danau, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta subyek ekosistem esensial lainnya.

Daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam dan lingkungan hidup disusun berdasarkan: a. Pendekatan kemampuan kapasitas dan ketersediaan sumber daya alam; b. Pendekatan kemampuan kapasitas biologi wilayah untuk memproduksi sumber daya dan menyerap limbahnya; c. Pendekatan kemampuan layanan jasa ekosistem, meliputi jasa penyedia, jasa pengatur, jasa pendukung dan jasa budaya; dan/atau d. Pendekatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan untuk menyusun daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun Data dan infomasi , antara lain: a. isu strategis di wilayah ekoregion; b. potensi dan aktivitas sektor; atau c. tutupan lahan, bentang lahan, dan potensi lahan.

Hasil inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah disusun menjadi bahan masukan bagi: a. Penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup nasional dan daerah; b. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah; c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ecoregion.

2.4.2 Risiko dan Dampak Lingkungan

Beberapa terminology istilah yang menggambarkan risiko bahaya terhadap lingkungan hidup adalah risiko, bahaya, tekanan, paparan, probabilitas, kosekuensi/keparahan dampak dan risiko dampak.

Bahaya (Hazard) adalah sumber risiko, dapat berupa senyawa atau suatu tindakan yang dapat menyebabkan dampak negatif. Bahaya lingkungan adalah senyawa, situasi, atau kejadian yang berpotensi mengancam lingkungan alam atau mempengaruhi kesehatan manusia. Satu atau kombinasi dari agen fisik, kimia, biologi yang di lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau alami, yang dapat menimbulkan dampak kesehatan terhadap masyarakat yang terpapar (Nastiti dkk, 2019).

Risiko adalah kemungkinan timbulnya konsekuensi/dampak yang yang tidak diinginkan akibat suatu kondisi/tindakan. Risiko merupakan

kombinasi kemungkinan dan tingkat keparahan dari suatu peristiwa yang membahayakan.

Analisis risiko dampak lingkungan dalam KLHS bertujuan untuk memberikan informasi mengenai dampak lingkungan dan kesehatan potensial akibat kegiatan pembangunan, misalnya melalui pemetaan risiko. Manajemen risiko proses memformulasikan dan mengimplementasikan tindakan mitigasi atau eliminasi bahaya. Strategi pengelolaan risiko ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7. Startegi Pengelolaan Risiko
Sumber : Nastiti dkk, (2019)

2.4.3 Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groots, 2002):

1. Jasa penyediaan: (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
2. Jasa Pengaturan: (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan

limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.

3. Budaya: (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan indentitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21) Pendidikan.
4. Pendukung: (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005). Berdasarkan Batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu *landscape base proxy dan landcover/ landused based proxy*, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian dan klasifikasi di atas, terdapat kesamaan substansi pengertian jasa ekosistem dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dimana pengertian jasa penyediaan, budaya lebih mencerminkan konsep daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan memiliki kesamaan subtansi dengan daya tamping lingkungan. Sedangkan jasa pendukung bisa bermakna dua yaitu daya dukung maupun daya tampung lingkungan secara operasional, kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:

a. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung).
b. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

Data dan indikator yang digunakan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Manado terdiri dari dua konsep input data yang meliputi *landuse/landcover* dan ekoregion dan satu konsep output yaitu jasa ekosistem. Selengkapnya data dan indikator ketiga konsep tersebut disajikan dalam klasifikasi berikut (Tabel 1). Sistem klasifikasi ekoregion mengikuti Verstappen dan klasifikasi liputan lahan menggunakan SNI 7645-1 2014 dan *one map policy*. Ketiga data tersebut diilustrasikan pada tabel berikut dengan mengambil contoh skala 1:50.000.

Tabel 1. Tiga Konsep dan data utama dalam penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

Ekoregion*	*Liputan Lahan**	Jasa Ekosistem
1. Kerucut Gunung api	1. Bangunan Bukan Permukiman	1. Pangan
2. Lereng Gunung api	2. Bangunan Permukiman/Campuran	2. Air bersih
3. Kaki Gunung api	3. Danau/Telaga	3. Serat (*fiber*)
4. Pegunungan Patahan	4. Hutan Lahan Rendah (Hutan lahan basah)	4. Bahan bakar (*fuel*) Kayu dan Fosil
5. Pegunungan Lipatan	5. Hutan Lahan Tinggi (HutanLahan Kering)	5. Sumberdaya genetic
6. Perbukitan Patahan	6. Hutan Mangrove	6. Pengaturan iklim
7. Perbukitan Lipatan	7. Hutan Rawa/Gambut	7. Pengaturan tata aliran air dan banjir
8. Lereng kaki Patahan	8. Hutan Tanaman	8. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam
9. Lereng kaki Lipatan	9. Kebun dan Tanaman Campuran (Tahunan dan semusim)	9. Pemurnian air
10. Lembah antar Patahan	10. Kolam air asin/payau	10. Pengolahan dan penguraian limbah
11. Lembah antar Lipatan	11. Lahan Terbuka (hamparan pasir, lava)	11. Pemeliharaan kualitas udara
12. Dataran Fluvio Gunung api	12. Lahan Terbuka Diusahakan	12. Pengaturan penyerbukan alami (pollination)
13. Dataran Aluvial	13. Perkebunan	13. Pengendalian hama dan penyakit
14. Dataran Fluviomarin	14. Pertambangan	14. Tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*)
15. Pegunungan Solusional	15. Rawa Pesisir	15. Rekreasi dan *ecotourism*
16. Perbukitan Solusional	16. Rawa Pedalaman	16. Estetika (Alami)
17. Lembah antar Perbukitan PegununganSolusional	17. Savana/Padang rumput	17. Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan
18. Pegunungan Denudasional	18. Semak dan belukar.	18. Siklus hara (*nutrient cycle*)
19. Perbukitan Denudasional	19. Sungai	19. Produksi primer
20. Lereng kaki Perbukitan/Pegunungan Denudasional	20. Tanaman Semusim Lahan Basah (Sawah)	20. Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)
21. Lembah antar Perbukitan/Pegunungan Denudasional	21. Semusim LahanKering (Tegalan/Ladang)	
22. Gumuk Pasir	22. Waduk dan Danau Buatan	
23. Padang Pasir	23. Tambak/Empang	
24. Pantai (*Shore*)		
25. Pesisir (*Coast*)		
26. Pegunungan Glasial		
27. Perbukitan Glasial		
28. Lembah antar Perbukita/ Pegunungan Glasial		
29. Dataran Gambut		
30. Dataran Terumbu		
31. Dataran Reklamasi		

Sebagaimana Pasal 17 Undang-undang No 32 Tahun 2009, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

2.4.4 Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam itu sendiri dikategorikan berdasarkan jenisnya yaitu sumber daya alam hayati (tumbuhan, hewan, perikanan) dan sumber daya alam non hayati (air, angin, hasil tambang).

Sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi, pada kenyataannya hal tersebut justru sangat bertentangan karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya sering kali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah (Alayli, 2005).

2.4.5 Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi secara signifikan terhadap unsur-unsur iklim dan cuaca (curah hujan, angina, suhu) yang terjadi dalam rentang waktu berpuluh-puluh tahun. Pada prinsipnya unsur-unsur iklim dikendalikan oleh keseimbangan energy antara bumi dan atmosfer. Radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi berupa cahaya tampak sebagian di serap oleh bumi dan sebagian lagi dipantulkan ke atmosfer. Radiasi matahari yang dipancarkan kembali ke atmosfer berupa radiasi panas dari sinar infra merah . Radiasi sinar infra merah tersebut kemudian diserap oleh gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), nitrous oksida (N_2O) yang ada di atmosfer (Murdiyarso, 2005). Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer bersumber dari bahan bakar fosil. Beberapa hasil penelitian menunjukkan konsentrasi CO_2 mempengaruhi peningkatan suhu bumi sebesar 0,5 °C (Murdiyarso, 2005).

Dampak yang dapat terjadi dari adanya perubahan iklim adalah kepunahan ekosisten, produktivitas pertanian, ancaman banjir, kesehatan dan majamen air terganggu.

2.4.6 Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan gambaran terhadap keragaman jenis sumber daya hayati dalam suatu ekosistem. Eksistem akan semakin mantap dalam suatu keanekaragaman yang tinggi. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Sumber daya genetik merupakan kekayaan keanekaragaman hayati sangat tinggi atau *megadiversity* yang potensi tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran. Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik.

Berdasarkan proporsi persentase jasa ekosistem penyedia sumberdaya genetik sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Hutan merupakan tempat sempurna untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Hutan di kota Manado terdapat di Manado dan Gunung Tumpa. Ekosistem hutan menyediakan situasi dimana flora dan fauna dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik. Hal ini seperti udara yang bersih, ketersediaan air yang melimpah, zat hara, bahan makanan, beragamnya jenis flora dan fauna di kawasan hutan.

Pada vegetasi teratur atau pada perkebunan dodominasi oleh satwa yang sejenis,sedangkan pada kawasan hutan memiliki satwa yang beragam. Hutan menyediakan kondisi alami yang mendukung pembentuk lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Ranting pohon, sampah daun, atau bangkai binatang menjadi pupuk alami untuk tumbuhan di hutan. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Sumber daya genetik merupakan kekayaan keanekaragaman hayati sangat tinggi atau *megadiversity* yang potensi tersebut dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran. Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik

BAB III. PROFIL KABUPATEN BONE BOLANGO

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone Bolango

3.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Bone Bolango merupakan kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango secara geografis terletak antara 00° 18' 25" – 00° 48' 21" Lintang Utara dan 123° 03' 41" – 123° 33' 06" Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini
- Sebelah Timur : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Sebelah Barat : Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 18 kecamatan, 165 desa, 555 dusun, dan 5 lingkungan (Badan Pusat Statistik Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka Tahun 2020, 2020). Distribusi luas setiap kecamatan di Kabupaten Bone Bolango disajikan pada Tabel 2. Peta administrasi Kabupaten Bone Bolango disajikan pada Gambar 8.

Tabel 2. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango

No.	Kecamatan	Luas (Km^2)
1	Tapa	1.343,51
2	Bulango Utara	6.047,43
3	Bulango Selatan	561,47
4	Bulango Timur	1.191,23
5	Bulango Ulu	37.306,32
6	Kabila	1.263,45
7	Botupingge	1.290,48
8	Tilongkabila	3.942,12
9	Suwawa	2.578,18
10	Suwawa Selatan	5.702,08
11	Suwawa Timur	26,612.55

No.	Kecamatan	Luas (Km²)
12	Suwawa Tengah	4.536,14
13	Bone Pantai	10.437,23
14	Kabila Bone	5.840,73
15	Bone Raya	6.529,91
16	Bone	15.201,46
17	Bulawa	8.782,12
18	Pinogu	49.600,27
	Jumlah	**1.888,766.70**

Sumber : Badan Pusat Statistik Bone Bolango, (2020)

Tabel 2 menunjukkan bahwa luas wilayah Kabupaten Bone Bolango yang mencakup 18 kecamatan secara keseluruhan adalah 1.887,67 km persegi atau 188,766.70 hektar. Kecamatan yang memiliki luasan terbesar adalah Kecamatan Pinogu yaitu seluas 49.600,27 km², sedangkan kecamatan yang memiliki luasan terkecil yaitu Kecamatan Bulango Selatan dengan luas wilayah 561,47 km². Peta administrasi Kabupaten Bone Bolango disajikan pada Gambar 8.

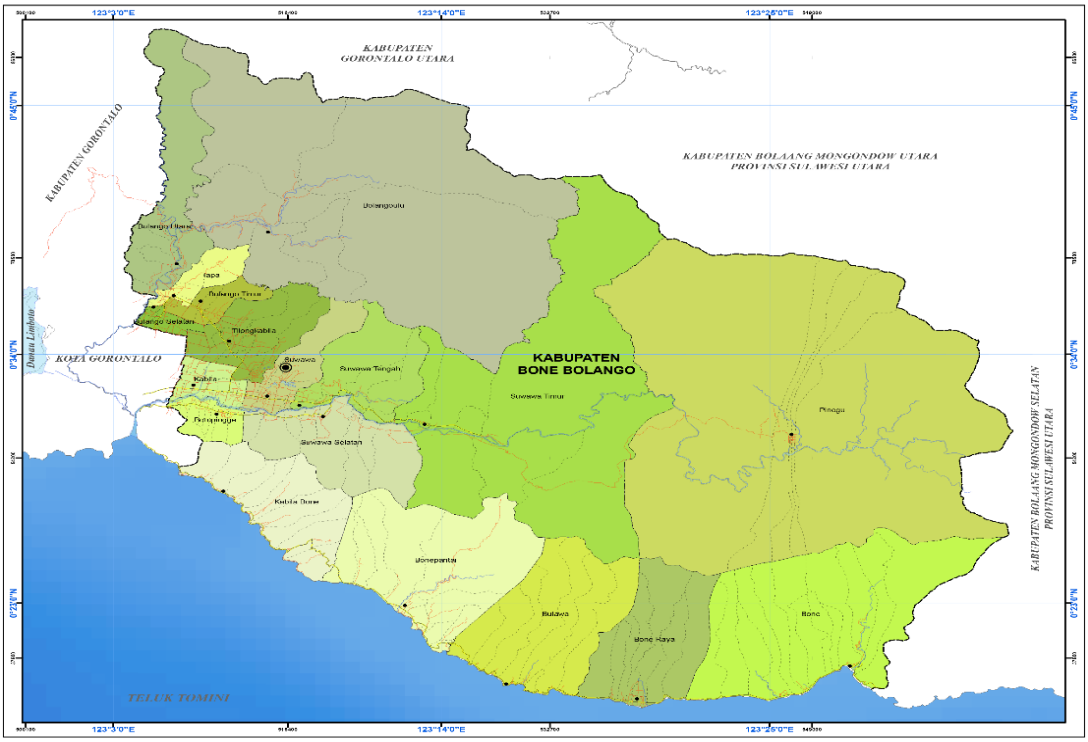

Gambar 8. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango
Sumber : (BAPPEDA Bone Bolango, 2020)

3.1.2 Topografi

Topografi merupakan faktor fisik penting yang perlu dipertimbangkan dalam setiap perencanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dikarenakan topografi mempengaruhi kesesuaian lahan, kemampuan lahan, resiko bencana alam, dan merupakan salah satu faktor pembentukan tanah. Kondisi topografi Kabupaten Bone Bolango sangat bervariasi dari topografi datar, berombak, bergelombang, berbukit dan bergunung. Tabel 3 menunjukkan kemiringan lereng di Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 3. Kemiringan Lereng Kabupaten Bone Bolango

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	%
1	0 - 8%	28,379.43	15,11
2	8 - 15%	32,733.91	17,43
3	15 - 25%	56.274,11	29,96
4	25 - 40%	53.372,84	28,41
5	> 40%	17.078,6	9,09
Total		188,766.70	100

Sumber : (BAPPEDA Bone Bolango, 2020)

Berdasarkan Tabel 3 Kabupaten Bone Bolango didominasi oleh wilayah dengan kemiringan lereng 15-25% dan wilayah dengan kemiringan lereng 25-40% yaitu masing-masing seluas 56.274,11 Ha dan 53.372,84 Ha. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki topografi datar hanya meliputi 15.11% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bone Bolango.

3.1.3 Bentuk Lahan

Landform digunakan sebagai pembeda utama dalam satuan lahan, hal ini mengingat terdapat keterkaitan antara landform dengan karakteristik tanahnya. Berdasarkan analisis landform, daerah penelitian dikelompokan menjadi 3 Grup landform utama, yaitu: aluvial (A), volkanik (V), dan karstik (K)

Landform aluvial (A) merupakan landform muda (resen dan subresen) yang terbentuk dari proses fluvial (aktivitas sungai) ataupun gabungan dari proses fluvial dan koluvial. Di daerah Bone Bolango grup landform ini dapat dipisahkan lagi menjadi: teras sungai (A.12), dataran alluvial (A.13), jalur aliran (A.15), gabungan kipas aluvial koluvial (A.214), dan dataran koluvial (A.221). Teras sungai dijumpai di sebelah kiri dan kanan Sungai Bone dengan posisi lebih tinggi dari landform jalur aliran sungai.

Dataran aluvial dijumpai di sekitar dataran Tapa, Kabila dan Suwawa dengan jenis penggunaan lahan berupa sawah irigasi dan perkampungan, landform

ini berpenyebaran cukup luas. Jalur aliran dijumpai di kanan-kiri sungai dengan penyebaran sempit. Gabungan kipas aluvial dan koluvial dijumpai di sekitar dataran Tapa yang berbatasan langsung dengan dataran aluvial dengan posisi lebih tinggi, penggunaan lahan berupa sawah tadah hujan dan tegalan. Dataran koluvial memiliki penyebaran sempit, merupakan lereng bawah dari kaki lereng perbukitan, terbentuk dari bahan koluvial di atasnya dengan relief datar agak melandai, penggunaan lahannya berupa kebun atau tegalan.

Landform volkan (V) merupakan landform yang terbentuk akibat aktivitas volkan/gunung berapi. Pada umumnya aktivitas volkan di daerah penelitian termasuk aktivitas volkan tua yang sudah mengalami proses lebih lanjut seperti pelipatan, pengangkatan dan pematahan. Grup ini menurunkan subgrup dataran volkan tua berombak dan bergelombang (V.31), perbukitan volkan tua (V.32), pegunungan volkan tua (V.33), dan intrusi volkan dengan relief berbukit sampai bergunung (V.4). Penggunaan lahan pada landform ini berupa hutan, kebun campuran, semak belukar, tegalan dan perladangan.

Landform karstik (K) merupakan landform yang didominasi oleh bahan batugamping, pada umumnya keadaan morfologi daerah ini tidak teratur. Grup landform ini menurunkan subgrup puntuk perbukitan karst (K.31), dan puntuk pegunungan karst (K.41). Penggunaan lahan landform ini umumnya berupa hutan.

3.1.4 Kondisi Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kotamobagu, Sulawesi, skala 1:250.000, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1997) formasi geologi Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) formasi, yaitu: aluvium endapan pantai (Qal), aluvium endapan danau (Qvl), Molasa Selebes (Qts), Batuan Gunung Api Pinogu (TQpv), Diorit Bone (Tmb), Batuan Gunung Api Bilungala (Tmbv), dan Anggota Batugamping Formasi Tapadaka (Tmtl).

- Aluvium Endapan Pantai (Qal) merupakan endapan sungai dan marin, yang menempati lahan dengan ketinggian <50 m dpal. Bahan aluvium berupa endapan pasir, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal. Bahan ini membentuk landform aluvial (jalur aliran Sungai Bone).
- Endapan Danau (Qpl), merupakan bahan hasil pengendapan Danau Limboto yang tersusun oleh batulempung kelabu, setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Batupasir berbutir halus sampai kasar serta kerikil dijumpai di beberapa tempat. Bahan ini membentuk landform dataran aluvial koluvial. Jenis vegetasi dan penggunaan

lahan berupa sawah irigasi dan sebagian tegalan. Satuan formasi ini terdapat di sekitar Ibukota Kecamatan Tapa dan Kabila.

- Molasa Selebes (Qts), merupakan endapan pasca orogen yang terbentuk di cekungan-cekungan kecil, terdiri atas konglomerat, breksi, serta batupasir. Konglomerat dan breksi tersusun oleh aneka bahan berupa kepingan andesit, basalt, granit, granodiorit, batugamping, batupasir maupun kuarsa. Di lapangan ditemukan bahan andesitik yang bertekstur kasar. Bahan ini membentuk landform dataran volkan tua dengan relief berombak sampai bergelombang.
- Batuan Gunungapi Pinogu (TQpv), merupakan bahan hasil letusan Gunungapi berupa tuf, tuf lapili, breksi dan lava. Breksi Gunungapi di Pegunungan Bone, Gunung Mongadalia dan Pusian bersusun andesit piroksin dan dasit. Tuf dan tuf lapili di sekitar Sungai Bone bersusunan dasitan. Lava berwarna kelabu muda hingga kelabu tua, pejal, umumnya bersusunan andesit piroksin. Membentuk landform perbukitan dan pegunungan volkan tua. Satuan ini terdapat di sebelah kiri dan kanan Sungai Bone memanjang ke arah timur Kabupaten Bone Bolango.
- Diorit Bone (Tmb), merupakan batuan terobosan yang menerobos Batuan Gunungapi Bilungala maupun formasi Tinombo. Tersusun dari diorit kuarsa, diorit, granodiorit, dan granit. Diorit kuat ditemukan Sungai Taludaa, dengan keragaman diorit, granodiorit dan granit. Granit banyak di temukan di daerah Sungai Bone. Batuan granit yang di temukan di Kabupaten Bone Bolango memiliki sisipan batukapur yang mengisi bagian retakan-retakannya, proses ini terjadi pada lingkungan marin, sehingga membentuk tanah yang memiliki reaksi tanah agak masam sampai netral. Terdapat di bagian utara Kabupaten Bone Bolango memanjang ke timur.
- Anggota Batugamping Formasi Tapadaka (Tmtl), merupakan batuan sedimen dan endapan permukaan. Formasi ini berupa batugamping kelabu terang, pejal, mengandung pecahan batuan gunungapi hijau. Batugamping ini sebagian membentuk lensa-lensa di dalam Formasi Tapadaka dan sebagian terlihat berganti fasies ke arah samping menjadi batupasir. Satuan ini terdapat di bagian tengah Bone Bolango.
- Batuan Gunungapi Bilungala (Tmbv), merupakan batuan hasil Gunungapi Bilungala. Batuan ini terdiri dari breksi, tuf dan lava bersusunan andesit, dasit dan riolit. Ziolit dan kalsit banyak dijumpai pada kepingan batuan penyusun breksi. Satuan ini terdapat di bagian utara daerah penelitian memanjang ke arah timur dan sebagian kecil terdapat di bagian tengah areal penelitian. Berdasarkan pengamatan

di lapangan menunjukkan bahwa bahan pembentuk tanah daerah penelitian berasal dari endapan pasir, lempung dan lumpur, tuf andesitik, batuan andesitik dan basalt, granit, dan batugamping. Bahan endapan pasir, lempung, dan lumpur umumnya mempunyai tekstur halus dan sedang, dan umumnya digunakan untuk persawahan dan sebagian tegalan, tanah berwarna kekelabuan (reduksi). Batuan andesitik dan basalt membentuk tanah dengan tekstur halus sampai sedang, tanahnya berwarna kuning kecoklatan. Tuf andesitik umumnya membentuk tanah bertekstur sedang sampai kasar. Batuan granit umumnya membentuk tanah bertekstur halus sampai kasar. Sedangkan batugamping membentuk tanah bertekstur halus dan sedang, pH tanah agak masam sampai netral.

3.1.5 Tanah

Berdasarkan Nortcliff (2012), tanah merupakan material halus yang menutupi permukaan lahan sebagai akibat dari pelapukan material batuan in situ atau akumulasi bahan mineral yang diangkut oleh air, angin, atau es. Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsinnya yang sangat sentral. Dalam bidang pertanian, tanah merupakan media pertumbuhan tanaman. Tanah menyediakan habitat bagi flora fauna dan organisme tanah yang sangat penting perannya dalam daur bahan makanan. Tanah berfungsi sebagai buffer untuk air hujan yang akan masuk dalam sistem air tanah. Selain itu hampir semua aktivitas manusia dilakukan diatas lahan/tanah. Jenis dan karakteristik tanah pada suatu wilayah ditentukan oleh berbagai faktor yaitu bahan induk, iklim, topografi, faktor biologi/organisme dan waktu.

Berdasarkan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Bone Bolango (2020), jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango yaitu :

1. Entisols,
2. Inceptisols,
3. Alfisols,
4. Mollisols.

3.1.6 Hidrologi

Hidrologi merupakan cabang dari ilmu geografi yang mempelajari tentang pergerakan air. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat. Menurut Peraturan Menteri ESDM No 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, cekungan air tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh

batas hidrogeologik, tempat semua kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut : (1) mempunyai batas hidrogeologik yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulis air tanah ; (2) mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah ; dan (3) memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Adapun luas cekungan air tanah (CAT) di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Bone Bolango

No	Kecamatan	Luas Cekungan Air Tanah (Ha)				
		CAT Bone	CAT Gorontalo	CAT Pinogu	CAT Tombulitato	Jumlah
1	Bone Raya				1020.46	1020.46
2	Botupingge		1192.04			1192.04
3	Bulango Selatan		522.79			522.79
4	Bulawa				2432.95	2432.95
5	Kabila		1260.61			1260.61
6	Kabila Bone		197.38			197.38
7	Pinogu	808.35	11.14	11189.38		12008.87
8	Suwawa		661.83			661.83
9	Suwawa Selatan		3097.46			3097.46
10	Suwawa Tengah		310.25			310.25
11	Suwawa Timur		5845.95	193.07		6039.02
12	Tilongkabila		804.17			804.17
	Jumlah	**808.35**	**13903.63**	**11382.45**	**3453.41**	**29547.84**

Sumber: hasil analisis data spasial RTRW Bone Bolango, 2020

Luas cekungan air tanah (CAT) di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3. Cekungan air tanah di Kabupaten Bone Bolango meliputi empat cekungan, yakni CAT Bone, CAT Gorontalo, CAT Pinogu dan CAT Tombulilato.

Cekungan air tanah (CAT) Gorontalo memiliki luas 29547.84 Ha yang mencakup 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Cekungan air tanah (CAT) Bone memiliki luas 808.35 Ha yang meliputi Kecamatan Bone. Cekungan Air tanah (CAT) Gorontalo memiliki luas 13903.63 Ha yang meliputi Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Kabila, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Pinogu,

Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Suwawa Timur, dan Kecamatan Tilongkabila. Cekungan Air tanah (CAT) Pinogu memiliki luas 11382.45 Ha yang meliputi Kecamatan Pinogu dan Kecamatan Suwawa Timur. Cekungan Air tanah (CAT) memiliki luas 3453.41 Ha yang meliputi Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Bulawa.

Menurut PP No 37 tahun 2012 tentang DAS, daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Luas daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango

No	Nama DAS	Luas	
		Ha	%
1	Das Bangahu	1326.82	0.70
2	Das Bilolantunga	752.52	0.40
3	Das Bilungala	7005.90	3.71
4	Das Bototunuo	1275.93	0.68
5	Das Buluango	978.48	0.52
6	Das Huangobotu	636.24	0.34
7	Das Inengo	579.85	0.31
8	Das Kaindundu	751.50	0.40
9	Das Modelomo	937.45	0.50
10	Das Molotabu	813.90	0.43
11	Das Momungaa	1024.26	0.54
12	Das Mopuya	474.77	0.25
13	Das Olele	343.88	0.18
14	Das Oluhuta	490.66	0.26
15	Das Ombulo	719.83	0.38
16	Das Sogitia	4548.41	2.41
17	Das Taludaa	8875.83	4.70
18	Das Tamboo	2840.10	1.50
19	Das Tolotio	1089.38	0.58
20	Das Tombulilato	7250.34	3.84
21	Das Tongo	1386.87	0.73
22	Das Uabanga	1182.52	0.63
23	Das Waluhu	999.76	0.53

No	Nama DAS	Luas	
		Ha	%
24	Das Bolango	40856.87	21.64
25	Das Bone	101624.63	53.84
	Jumlah	**188766.70**	**100**

Sumber: hasil analisis data spasial RTRW Bone Bolango, 2020

Luas masing-masing daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 4. Daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Bone Bolango terbagi menjadi 25 daerah aliran sungai. DAS terluas yaitu DAS Bone dengan luas 101624.63 Ha atau menempati 53.84% wilayah Kabupaten Bone Bolango. DAS besar berikutnya adalah DAS Bolango yang meliputi wilayah dengan luas 40856.87 Ha atau sebesar 21.64% wilayah Kabupaten Bone Bolango. DAS lainnya merupakan DAS kecil dengan luasan berkisar 0.18 – 4.70 Ha meliputi Das Bangahu, Das Bilolantunga, Das Bilungala, Das Bototunuo, Das Buluango, Das Huangobotu, Das Inengo, Das Kaindundu, Das Modelomo, Das Molotabu, Das Momungaa, Das Mopuya, Das Olele, Das Oluhuta, Das Ombulo, Das Sogitia, Das Taludaa, Das Tamboo, Das Tolotio, Das Tombulilato, Das Tongo, Das Uabanga, dan Das Waluhu.

3.1.7 Meteorologi dan Klimatologi

Curah hujan merupakan banyaknya air hujan yang tercurah atau turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah hari hujan dan curah hujan bulanan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Bulanan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 - 2019

Curah Hujan (mm)										
Bulan	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Januari	100,0	248,0	109,0	109,0	146,0	120,0	96,0	183,9	183,0	74,5
Februari	45,0	202,0	130,0	130,0	15,0	68,0	170,0	174,5	148,0	45,9
Maret	38,0	269,0	67,0	67,0	107,5	15,0	0,0	127,1	238,0	83,0
April	153,0	194,0	159,0	159,0	124,0	23,0	118,0	89,7	192,0	330,7
Mei	378,0	97,0	116,0	116,0	135,8	188,0	208,0	85,2	122,0	51,4
Juni	263,0	136,0	205,0	205,0	112,0	176,5	277,0	219,7	132,0	119,1
Juli	172,0	40,0	244,0	244,0	45,0	0,0	162,0	145,5	83,0	25,6
Agustus	277,0	19,0	107,0	107,0	54,0	0,0	37,0	135,3	91,0	6,7
Septembe r	302,0	104,0	46,0	46,0	6,0	0,0	167,0	121,4	9,0	0,0
Oktober	250,0	81,0	154,0	154,0	72,0	45,4	303,0	65,0	152,0	129,9

Curah Hujan (mm)										
Bulan	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
November	84,0	66,0	412,0	412,0	321,0	154,0	189,0	105,4	194,0	8,2
Desember	250,0	142,0	27,0	27,0	266,0	55,0	155,0	86,0	247,0	173,8
Jumlah	**2.312,0**	**1.598,0**	**1.776,0**	**1.776,0**	**1.404,3**	**844,9**	**1.882,0**	**1.538,4**	**1.791,0**	**1.048,8**
Rata-Rata	**1.597,1**									

Sumber: Badan Pusat Statistik Bone Bolango, (2020)

Berdasarkan Tabel 6, Kabupaten Bone Bolango memiliki curah hujan bulanan tertinggi Tahun 2019 sebesar 330.7 mm^3 pada bulan April dan curah hujan terendah sebesar 6.7 mm^3 pada bulan Agustus 2019, dan tidak ada hujan pada bulan September 2019. Jumlah hari hujan tertinggi di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 adalah 13 hari yang terjadi pada Bulan April, Juni, dan Oktober.

Suhu udara merupakan keadaan suhu panas/dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya panas matahari yang diterima bumi. Kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Suhu udara dan kelembaban udara di Kabupaten Bolango Tahun 2019 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019

Bulan	**Suhu Udara (°C)**			**Kelembaban Udara (%)**		
	Minimum	**Maksimum**	**Rata-rata**	**Minimum**	**Maksimum**	**Rata-rata**
Januari	23.3	32.3	26.8	66	94	83
Februari	22.5	33.0	27.0	58	94	80
Maret	22.5	33.8	27.2	54	92	77
April	23.8	33.3	27.6	61	91	81
Mei	23.4	33.0	27.4	62	91	82
Juni	23.4	31.5	26.7	69	93	84
Juli	22.5	31.5	26.3	60	92	79
Agustus	21.8	33.4	27.3	47	84	69
September	21.5	34.1	27.5	42	79	64
Oktober	22.8	33.4	27.2	55	87	77
November	23.0	34.6	28.2	50	85	72
Desember	23.6	33.6	27.3	61	92	82

Sumber: Badan Pusat Statistik Bone Bolango, (2020)

Berdasarkan Tabel 7, rata-rata suhu udara di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 berada di rentang 26,3 – 28.2ºC dengan suhu rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan November dan suhu rata-rata terendah terjadi pada Bulan Juli. Berdasarkan Tabel 6, rata-rata kelembaban udara di Kabupaten Bone Bolango berada di rentang 64% - 84% dengan kelembaban rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Juni dan kelembaban rata-rata terendah terjadi pada Bulan September.

Tekanan udara adalah sebuah tenaga yang menggerakkan massa partikel udara dalam setiap satuan luas tertentu. Penyinaran matahari merupakan sebuah aktivitas dari matahari yang memancarkan sinarnya ke Bumi. Data tekanan udara rata-rata, kecepatan angin, rata-rata, dan rata-rata penyinaran matahari di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019

Bulan	Tekanan Udara Rata-rata (mb)	Kecepatan Angin Rata-rata (m/det)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	1007.5	2	41
Februari	1009.3	2	65
Maret	1007.9	2	63
April	1007.0	2	53
Mei	1007.5	2	63
Juni	1006.9	2	44
Juli	1007.9	3	41
Agustus	1007.8	4	84
September	1009.0	4	89
Oktober	1007.3	3	71
November	1007.0	3	83
Desember	1006.8	2	63

Sumber: Badan Pusat Statistik Bone Bolango, (2020)

Berdasarkan Tabel 8, rata-rata tekanan udara di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 berada di rentang 1006.8-1009.3 milibar dengan tekanan udara rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Februari dan tekanan rata-rata tekanan udara terendah terjadi pada Bulan Desember. Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 berkisar 2 – 4 m/det. Rata-rata lama penyinaran matahari di Kabupaten Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 berada di

rentang 41 -89% dengan penyinaran matahari rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan September dan penyinaran matahari rata-rata terendah terjadi pada Bulan Januari.

3.1.8 Kawasan Rawan Bencana

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Bone Bolango adalah banjir dan longsor, kebakaran dan gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi kabupaten Bone Bolango adalah banjir dan longsor. Banjir dan longsor di Bone Bolango disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu berpotensi menjadi banjir kiriman di daerah hilir bahkan melanda kota Gorontalo. Selain itu, sarana dan prasarana pengendalian banjir juga belum berfungsi secara optimal. Gambar 9 berikut ini menunjukkan potensi paparan bencana di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2019.

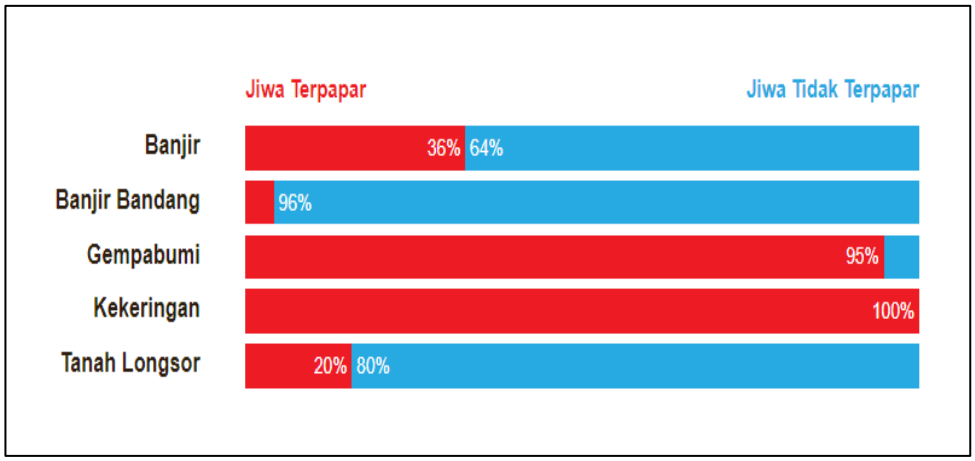

Gambar 9. Potensi Paparan Bencana di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019

Sumber: inarisk.bnpb.go.id

Berdasarkan gambar 9 di atas, terlihat bahwa sebagian penduduk Kabupaten Bone Bolango masih rentan terhadap bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor.

A. Kawasan Rawan Banjir

Antara tahun 2016-2019, Kabupaten Bone Bolango telah mengalami 6 kali banjir besar yang menelan kerugian materi cukup besar. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Bone Bolango lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam seperti kondisi fisik topografis, alur aliran air, curah hujan yang tinggi,

peresapan air yang rendah, pendangkalan dan penyempitan alur sungai dan pendangkalan muara sungai. Sisi lain, peristiwa banjir memberikan arahan tafsiran bahwa telah terjadi degradasi ekosistem *up land*, sehingga ekosistem tersebut tidak mampu melakukan fungsi secara maksimal. Daerah rawan banjir di antaranya:

a. Kecamatan Bulango Timur (Desa Bulotalangi, Desa Bulotalangi Barat, Desa Bulotalangi Timur, Desa Popodu dan Desa Toluwaya);
b. Kecamatan Bulango Utara (Desa Bandungan, Desa Boidu, Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Sukadamai dan Desa Tupa);
c. Kecamatan Tapa (Desa Dunggala, Kramat, Langge, Talulobutu, Talulobutu Selatan dan Desa Talumopatu);
d. Kecamatan Bulango Selatan (Desa Ayula Selatan, Ayula Tilango, Ayula Timur, Ayula Utara, Huntu Selatan, Huntu Utara, Lamahu, Mekar Jaya, Sejahtera dan Desa Tinelo Ayula);
e. Kecamatan Suwawa (Desa Boludawa, Bube, Bube Baru, Bubeya, Tinelo, Tingkohobu, Tingkohobu Timur dan Desa Ulanta);
f. Kecamatan Suwawa Selatan (Desa Bondawuna, Bonde Raya, Bonedaa, Bulontala, Bulontala Timur, Libungo, Molintogupo dan desa Pancuran);
g. Kecamatan Suwawa Timur (Desa Dumbaya Bulan, Panggulo, Poduwoma, Tilangobula, Tulabolo dan desa Tulabolo Timur);
h. Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Alale, Duano, Lombongo, Lompotoo, Tapadaa dan desa Tolomato);
i. Kecamatan Kabila Bone (Desa Oluhuta);
j. Kecamatan Bulawa (Desa Kaidundu Barat, Mamungaa Timur dan Desa Nyiur Hijau);
k. Kecamatan Bone Pantai (Desa Lembah Hijau, Tamboo dan Desa Tolotio);
l. Kecamatan Bone Raya (Desa Mootayu);
m. Kecamatan Bone (Desa Bilolantunga, Cendana Putih, Inogaluma, Masiaga, Molamahu, Monano, Muara Bone, Sogitia, Taludaa, Tumbuh Mekar dan Desa Waluhu);
n. Kecamatan Botupingge (Desa Buata, Luwohu, Panggulo, Panggulo Barat, Tanah Putih, Timbuolo, Timbuolo Tengah dan Desa Timbuolo Timur);
o. Kecamatan Kabila (Desa Dutohe, Dutohe Barat, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Pauwo, Poowo, Poowo Barat, Talango, Tanggilingo, Toto Selatan dan Desa Tumbihe); dan
p. Kecamatan Tilongkabila (Bongopini, Mootilango, Permata, Tamboo dan Desa Tunggulo Selatan).

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan banjir adalah pengupayaan tidak peruntukan sebagai kawasan permukiman; pembatasan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mempengaruhi kelancaran sistem drainase, pemantapan kawasan lindung, reboisasi dengan tanaman khusus, pembuatan rumah panggung beserta jalur drainasenya, serta penanganan dan pengelolaan kawasan rawan banjir dapat dilakukan melalui penambahan daerah resapan air. Tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada gambar 10 berikut ini.

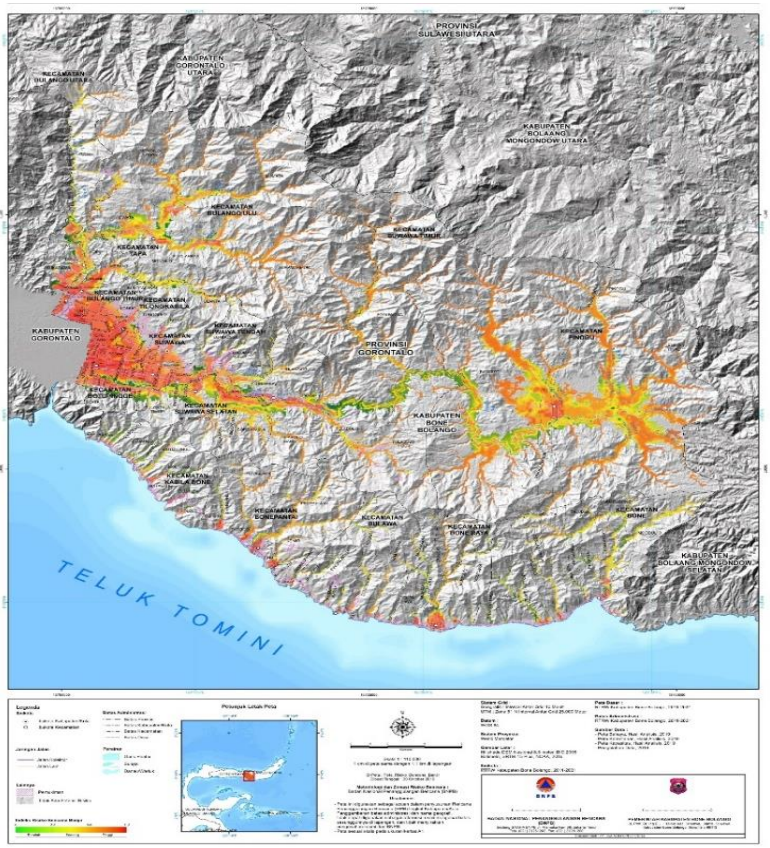

Gambar 10. Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Bone Bolango
Sumber : Dokumen Risiko Bencana Kabupaten Bone Bolango 2020-2024

B. Kawasan Rawan Longsor

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Bone Bolango di antaranya :

a. Kecamatan Bulango Timur (kerawanan rendah 619,75 ha; kerawanan sedang 539,37 ha; kerawanan tinggi 23,85 ha);
b. Kecamatan Bulango Utara (kerawanan rendah 1.294,6 ha; kerawanan sedang 6.705,34 ha; kerawanan tinggi 2.774,54 ha);
c. Kecamatan Bulango Ulu (kerawanan rendah 1.977,14 ha; kerawanan sedang 13.426,06 ha; kerawanan tinggi 10.322,34 ha);

d. Kecamatan Bulango Selatan (kerawanan rendah 568,76 ha)
e. Kecamatan Suwawa Timur (kerawanan rendah 11.368,19 ha; kerawanan sedang 42.848 ha; kerawanan tinggi 28.300,18 ha);
f. Kecamatan Suwawa Tengah (kerawanan rendah 931,88 ha; kerawanan sedang 1.352,2 ha; kerawanan tinggi 58,79 ha);
g. Kecamatan Suwawa Selatan (kerawanan rendah 1.163,31 ha; kerawanan sedang 4.190,93 ha; kerawanan tinggi 238,07);
h. Kecamatan Suwawa (kerawanan rendah 1.154,4 ha; kerawanan sedang 3.505,54 ha; kerawanan tinggi 1.047,31);
i. Kecamatan Tapa (kerawanan rendah 493,25 ha; kerawanan sedang 743,32 ha; kerawanan tinggi 29,3);
j. Kecamatan Tilongkabila (kerawanan rendah 2.336,75 ha; kerawanan sedang 2.377,75 ha; kerawanan tinggi 33,89);
k. Kecamatan Kabila (kerawanan rendah 1.273,84 ha);
l. Kecamatan Kabila Bone (kerawanan rendah 1.154,4 ha; kerawanan sedang 3.505,54 ha; kerawanan tinggi 1.047,31);
m. Kecamatan Bulawa (kerawanan rendah 339,18 ha; kerawanan sedang 6.522,98 ha; kerawanan tinggi 2.264,42);
n. Kecamatan Bone Pantai (kerawanan rendah 889,05 ha; kerawanan sedang 8.494,45 ha; kerawanan tinggi 1.165,42);
o. Kecamatan Bone Raya (kerawanan rendah 457,25 ha; kerawanan sedang 1.797, 7 ha; kerawanan tinggi 3.938,38);
p. Kecamatan Bone (kerawanan rendah 835,96 ha; kerawanan sedang 8.779,52 ha; kerawanan tinggi 5.721,7); dan
q. Kecamatan Botupingge (kerawanan rendah 455,19 ha; kerawanan sedang 980,31 ha; kerawanan tinggi 162,41). Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan longsor adalah dengan kepadatan bangunan di wilayah tersebut diarahkan pada kepadatan rendah (kepadatan diarahkan < 30 unit/Ha dengan luas lantai bangunan < 100m); pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan baru di kawasan rawan longsor; dan harus ada pembatasan kepadatan dan pertumbuhan fisik dan/atau aktivitas kawasan, diarahkan kurang dari 30 unit per hektar dengan luas lantai bangunan kurang dari 100 m^2. Tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Bone Bolango tertuang pada gambar 11 berikut ini.

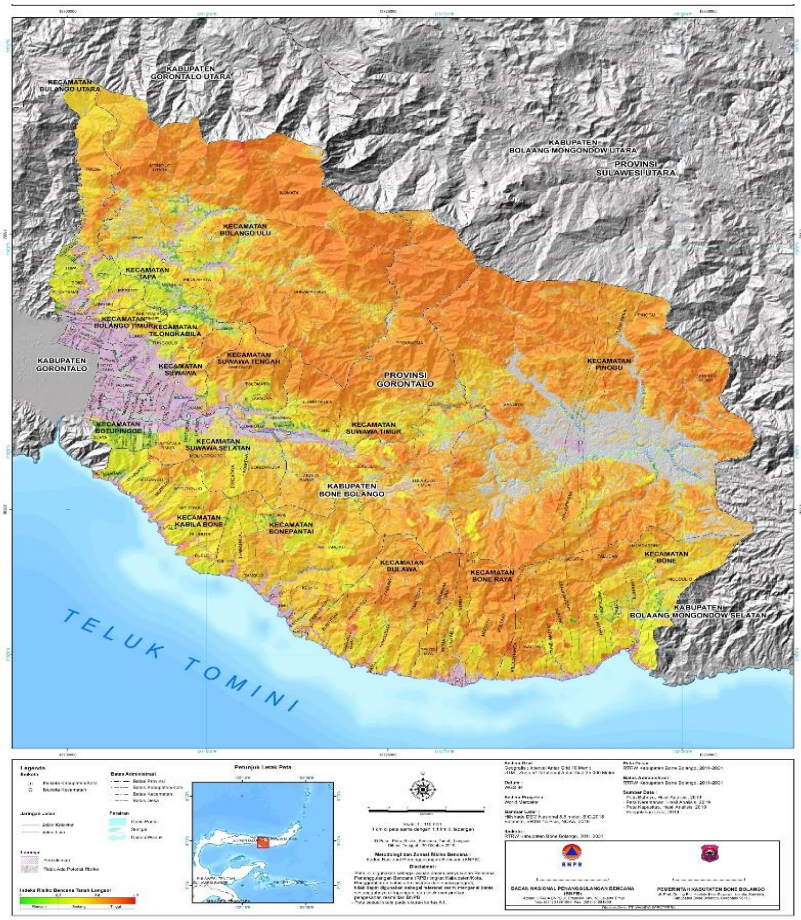

Gambar 11. Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Bone Bolango
Sumber : Dokumen Risiko Bencana Kabupaten Bone Bolango 2020-2024

3.1.9 Struktur Ruang Kabupaten Bone Bolango

- Rencana Struktur Tata Ruang wilayah Kabupaten adalah kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi dan rencana penempatan prasarana wilayah.
- Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang (2011-2031) meliputi :

- Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan, yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama, yang meliputi Sistem Jaringan Transportasi darat dan Sistem Jaringan Transportasi Laut

- Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, yang meliputi Sistem Jaringan Energi, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan Sistem Prasarana Pengelolaan lingkungan

Sistem Perkotaan Kabupaten Bone Bolango

Pengembangan sistem perkotaan (sistem kota-kota) bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antarwilayah sesuai fungsi yang diembannya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung struktur tata ruang yang telah direncanakan.

Pusat kegiatan perkotaan dalam hierarki dan skup pelayanannya berupa Pusat Kegiatan lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Mengembangkan secara terbatas pusat-pusat kegiatan di bagian selatan (Bone Pantai).
2. Menata distribusi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Sub Pusat Kegiatan Lokal (PPK) yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah
3. Menata Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sehingga dapat meningkatkan pelayanan kegiatan skala antar desa.

Sistem Jaringan Transportasi Darat Kabupaten Bone Bolango

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas pemukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

a. Sistem jaringan primer, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
b. Sistem jaringan jalan sekunder, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranana pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan

A. Infrastruktur Jalan

Rencana pengembangan infrakstruktur jalan diarahkan pada rencana pembuatan jaringan jalan baru untuk meningkatkan akses antara wilayah yang ada di Kabupaten Bone Bolango dan wilayah sekitarnya. Bentuk jalan baru tersebut adalah jalan lingkar yang melintasi Kecamatan Kabila, Kecamatan Tilongkabila dan Kecamatan Suwawa, jalan akses Aladi-Tulabolo, dan jalan akses Tulabolo-Pinogu.

Rencana peningkatan fungsi dan kualitas jaringan jalan, diarahkan pada kegiatan peningkatan daya dukung perkerasan, pelebaran jalan, pengaspalan perkerasan jalan ataupun pelapisan ulang perkerasan jalan.

B. Terminal

Rencana fasilitas transportasi jalan raya diarahkan pada pengembangan perencanaan terminal kendaraan umum. Terminal yang direncanakan adalah terminal kendaraan umum tipe B di Kecamatan Suwawa, Desa Boludawa seluas 2,5 Ha dan Kecamatan Bone Desa Taludaa Seluas 2,5 H. Serta rencana terminal penumpang tipe C di Kecamatan Kabila Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Tapa Desa Talulobutu dan Kecamatan Bone Raya, Desa Tambulilato. Fasilitas yang lain yaitu halte bus, pangkalan kendaraan umum, tempat pemberhentian kendaraan umum. Rencana pengembangan angkutan umum diarahkan pada penataan rute kendaraan umum meliputi rute angkutan umum dalam kota dan angkutan perdesaan

Rencana pengembangan transportasi laut

Dalam konteks wilayah regional, saat ini Kabupaten Bone Bolango belum memerlukan pelabuhan laut yang berskala regional. Untuk jangka panjang (20 tahun ke depan) untuk wilayah Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi, pelabuhan Kota Gorontalo secara teknis sulit dikembangkan karena terletak di muara Sungai Bone, yang sering mengalami pendangkalan akibat sedimentasi sehingga suatu saat nanti pengembangan pelabuhan laut yang berskala regional dapat dikembangkan di Kabupaten Bone Bolango untuk menggantikan fungsi pelabuhan Kota Gorontalo dalam melayani kebutuhan terutama untuk angkutan penumpang dan barang. Fungsi pelabuhan regional agar dapat menampung perkembangan arus orang dan barang, khususnya untuk menghubungkan Bone Bolango dengan wilayah Timur Indonesia, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur dan ke seluruh provinsi di Sulawesi.

Saat ini rencana pengembangan jaringan transportasi laut di Kabupaten Bone Bolango cukup berupa pelabuhan berskala lokal yang dapat

menghubungkan dengan wilayah-wilayah sekitar maupun wilayah-wilayah di luar Provinsi Gorontalo.

Adapun rencana tatanan kepelabuhan di Kabupaten Bone Bolango terdiri atas :

1. Rencana pelabuhan, yaitu ;
- Pelabuhan Kabila Bone (Tahap perencanaan), di Kec. Kabila Bone
- Terminal khusus pertambangan di kecamatan Bone Raya
2. Rencana pelabuhan khusus, terdiri atas ;
- Pelabuhan Perikanan Tongo di Kec. Bone Pantai
- Pelabuhan Perikanan Inengo (Tahap Perencanaan) di Kec. Kabila Bone
- Pelabuhan Perikanan Sogitia (Tahap Perencanaan) di Kec. Bone

Adapun alur pelayarannya yaitu :
Botutonuo – Pulau Una Una (Kab. Tojo Una Una) – Parigi (Kab. Parugi Moutong) – Pagimana (Kab. Teluk Banggai).

Sasaran dari rencana system jaringan prasarana terhadap muatan KLHS adalah:

- Terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
  PKL, PPK dan PPL perlu dikaji secara khusus bila melakukan pembukaan lahan di Kecamatan Suwawa, Tilongkabila, Botupinge, Bolango Selatan, Bolango Timur, Kabila , Kabila Bone, dan Tapa sebabkan kondisi status pangan di kecamatan tersebut telah terlampaui serta distribusi dan kelas Jasa pengaturan Mitigasi bencana banjir berpotensi.
- Terhadap Sumber daya Alam , Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati
  PKL, PPK dan PPL tidak mempengaruhi secara langsung terhadap System Jaringan Prasarana .

Pengembangan Sistem Jaringan Energy – Ketenagalistrikan

Rencana pengembangan sistem jaringan diarahkan pada pengembangan prasarana energi adalah :

1. Mengembangkan instalasi listrik untuk meningkatkan pasokan daya.
2. Mengembangkan energi alternatif.

- Sesuai dengan prediksi, kebutuhan listrik rumah tangga pada akhir tahun perencanaan (2031) minimum 24.597.170 KWH. Sedangkan kebutuhan listrik untuk fasilitas sosial, ekonomi, penerangan umum dan kehilangan energi listrik dalam transmisi diasumsikan sebesar 25 % dari kebutuhan rumah tangga.

- Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut, sistem jaringan listrik yang ada akan dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya, dan perlu ada penambahan jaringan dan pembangkit baru.
- Adapun rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik di Kab.Bone Bolango yaitu :
- Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kec. Suwawa Timur, Desa Tulabolo (dalam perencanaan)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya di PLTS Kec. Suwawa Timur (Desa Pinogu, Ds.Tulabolo Timur, Ds. Tulabolo Barat, Ds. Poduwoma) ; Kec. Suwawa Tengah (Desa Tapadaa) ; Kec. Suwawa Selatan (Desa Molintogupo, Ds. Pancuran, Ds Bulantala Timur) ; Kec. Tilongkabila (Desa Tunggulo) ; Kec. Kabila Bone (Desa Biluango) ; Kec. Bone Pantai (Desa Olele).
- Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro di PLTM Suwawa Timur Desa Tulabolo dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di PLTM Taludaa I & PLTM Taludaa II di Desa Ilohua dan PLTM Bulango utara di Desa Kopi serta PLTMH di Kecamatan persiapan Pinogu, desa Pinogu.
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap di PLTU Molotabu di Kec. Kabila Bone;
- Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (Goethermal) di Kec. Suwawa Selatan, desa Libungo dan Kec. Suwawa Tengah, desa Duano.
- Adapun rencana jaringan prasarana energi di atas terdiri dari jaringan :
  - Batas Sulawesi Tengah – Molosifat – Popayato – Lemito – Motolohu – Marisa – Bumbulan – Tilamuta – Pentadu – Tangkobu – Isimu – Limboto – Gorontalo – Suwawa – Tulabolo

Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi

Rencana pengembangan prasarana sumber daya air dan irigasi adalah :

- Mengembangkan waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka penyediaan air baku serta konservasi sumber air.
- Mengembangkan daerah irigasi yang diprioritaskan adalah daerah irigasi Lomaya – Alale seluas 2.688 ha.

Rencana sistem jaringan sumber daya air terdiri atas :

- Wilayah sungai lintas provinsi yaitu wilayah sungai Limboto – Bolango – Bone.
- Wilayah sungai lintas kabupaten/kota yaitu wilayah sungai Bone dan Bolango

- Daerah aliran sungai yaitu DAS Bolango, DAS Bone, DAS Bilungala, DAS Mamungaa Daa, DAS Monano 1, DAS Sogitia Daa, DAS Tengkorak, DAS Tolotio, DAS Bangahu, DAS Iya, DAS Limboto dan DAS Wulahu.

Rencana Sistem Sumber Air dan Jaringan Air Bersih

Rencana sistem sumber air dan jaringan air bersih diarahkan pada pengembangan sumber air dan jaringan (instalasi) pengolahan air bersih. Rencana ini bertujuan dalam mendukung pengembangan prasarana perumahan dan permukiman yaitu dengan menyediakan prasarana yang memiliki skala pelayanan lintas wilayah kecamatan dan desa.

Upaya pemenuhan air bersih di Kabupaten Bone Bolango sampai akhir tahun perencanaan diupayakan melalui: peningkatan kapasitas produksi air bersih, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber air baku lainnya dan serta pengoptimalisasian sistem dan distribusi/pengaliran air bersih khususnya pada kawasan perkotaan.

Pemenuhan kebutuhan air bersih melalui usaha tersebut direncanakan untuk melayani kawasan perkotaan dan perdesaan yang dialokasikan pada satuan wilayah pengembangan guna menunjang operasionalisasi kegiatan-kegiatan perkotaan dan perdesaan. Rencana pengembangan prasarana air bersih lebih difokuskan pada penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini belum dapat terlayani jaringan air bersih di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan untuk penentuan sumber air bersih (sumur dalam) berhubungan dengan penempatan sistem sanitasi lingkungan (air limbah/kotor) dalam hal ini penempatan *septictank* dan bak rembesan, sebaiknya diletakkan ±10 meter atau tidak menggunakan air tanah dalam sebagai sumber air bersih melainkan dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Adapun rencana sistem pengelolaan air minum (SPAM) akan dikembangkan pada pusat-pusat permukiman dengan cara memanfaatkan air permukaan yang dimana penempatan SPAM tersebut adalah di PKWp di Suwawa ; PKL di Tilongkabila dan Kabila serta PPK di Talulobutu dan Tombulilato.

Rencana Sistem Jaringan Drainase dan Pengelolaan Air Limbah

Sistem prasarana drainase yang direncanakan menggunakan sistem terbuka (riol terbuka) yang berfungsi sebagai wadah pengaliran air hujan dan limbah rumah tangga. Pemilihan sistem ini dilakukan untuk memudahkan sistem pengawasan dan penyesuaian anggaran biaya. Perencanaan prasarana drainase dilaksanakan guna menghindari/mengurangi genangan ataupun luapan air hujan dengan perbaikan dan pembangunan saluran drainase yang

didasarkan atas kondisi topografi dan kemiringan lereng wilayah untuk memudahkan pengaliran. Perbaikan/pembangunan drainase diprioritaskan pada kawasan genangan air hujan. Sungai, kanal saluran irigasi, waduk dan bendungan sebagai badan air terbuka selain sebagai penerima air hujan juga berfungsi penerima buangan air drainase, maka diperlukan pematangan pada bibir sungai untuk menjaga kapasitas tampung air.

3.1.10 Pola Ruang Kabupaten Bone Bolango

Kawasan Budidaya

Penetapan kawasan ini dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Adapun kawasan budidaya yang telah dikembangkan di Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan potensi yang ada adalah sebagai berikut :

(1) Kawasan Budidaya Pertanian, mencakup:

- Kawasan Pertanian Lahan Basah;

  Sesuai data BPS Bone Bolango 2018, Luas panen padi sawah di Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 adalah 4.824.2 ha yang terbagi dalam 2 kali musim tanam, dengan total produksi 27.568.48 ton, dan tingkat produktivitas mencapai 5.1 ton/ha. Luas panen terbesar di dominasi oleh wilayah di Kecamatan Tilongkabila seluas 1.559,5 ha dan Kecamatan Kabila seluas 1.213,9 ha. Kedua wilayah kecamatan ini merupakan lumbung padi terbesar karena mempunyai irigasi teknis, dimana saat musim kemarau, lahan sawah di kedua wilayah ini tetap berproduksi

- Kawasan Pertanian Lahan Kering;

  Komoditi yang dibudidayakan dan mendominasi pertanian lahan kering untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah komoditi jagung. Luas panen jagung di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan angka tetap BPS tahun 2018 adalah 12.698 Ha dengan total produksi 64.759,8 ton, dan tingkat produktivitas mencapai 5.1 ton/Ha. Luas panen terbesar berada di Kecamatan Bulango Ulu seluas 3.578 hektar.

- Kawasan Hutan Produksi;

  Berdasarkan data KPHP unit VII Bone Bolango luas hutan produksi Provinsi Gorontalo berdasarkan SK Menhut No. 325/Menhut-II/2010 adalah 19.663,77 hektar yang terdiri dari hutan produksi terbatas 18.827,32 hektar, hutan produksi tetap 836,45.

Tabel 9. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya di Kabupaten Bone Bolango

No	FUNGSI	LUAS (Ha)	PROSENTASE
1	Hutan Konservasi	104.904,72	75,68
2	Hutan Lindung	15.924,71	11,33
3	Hutan Produksi Terbatas	18.827,32	13,40
4	Hutan Produksi	836,45	0,59
5	Hutan Produksi Konversi	-	
	Jumlah	**140.493,19**	100

Sumber: SK Menteri Kehutanan No 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010

(2) Kawasan Budidaya Bukan Pertanian, mencakup:

- **Kawasan Permukiman;**

  Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagailingkungan tempat tinggal atau tempat tinggal yang berada di daerah perkotaan dan perdesaan. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk menyediakan tempat permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengembangan permukiman sedapat mungkin tidak terlalu jauh dari tempat usaha dan pusat pertumbuhan selama tidak mengakibatkan degradasi lingkungan. Pengembangan kawasan permukiman sejauh mungkin tidak menggunakan daerah pertanian lahan basah atau lahan yang beririgasi.

Kawasan Industri;

Kawasan ini mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan industri yang akan dikembangkan di daerah ini adalah kawasan industri rumah tangga di Kecamatan Tapa dan kawasan industri Agropolitan di Kecamatan Suwawa.

Pengembangan kawasan industri perlu dilakukan melalui suatu rencana dan strategi, sebagai berikut :

- Pengembangan infrastruktur energi sehingga memperoleh ruang industri besar, menengah dan kecil;

- Pengembangan sistem sarana prasarana transportasi dan sumberdaya air pada kasawan industri andalan kecil menegah sesuai rencana pembangunan industri Bone Bolango;
- Pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha;
- Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas sistem industri;

Kawasan Pertambangan;

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi tambang yang besar, khususnya logam emas (sumberdaya), dan batuan/mineral andesit, granit, sirtu, dan toseki. Pengembangan suatu kawasan pertambangan tidak sama dengan sumberdaya lainnya. Hal ini disebabkan keterdapatan bahan galian ini pada umumnya tidak dapat dilihat secara langsung. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah tergantung pada tingkat penyelidikan pada masing-masing sumberdaya.

Kawasan Pariwisata.

Pengembangan pariwisata menuntut adanya potensi daerah wisata yang memiliki karakteristik yang khas, disamping ketersediaan infrastruktur serta kestabilan keamanan dalam menarik arus kunjungan wisatawan. Potensi-potensi wisata tersebut dapat berupa keragaman budaya, seni dan pesona alam.

Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango perlu diarahkan pada:

- Pengembangan objek pariwisata pantai dan objek wisata bahari pulau diarahkan menjadi wisata terpadu sehingga dalam pengembangannya harus terintegrasi. Dengan diarahkannya kawasan pariwisata pantai menjadi kawasan pariwisata terpadu, diharapkan akan lebih memacu perkembangan kegiatan pariwisata di kawasan pesisir dan pulau-pulau;
- Penataan ruang (penyusunan rencana) pengembangan pariwisata kabupaten, terutama untuk kawasan pariwisata terpadu;
- Kawasan Pariwisata Meliputi :

(1) Kawasan pariwisata budaya, yaitu:

a. Wisata Makam dan Musium Nani Wartabone di Kecamatan Suwawa, Desa Bube Baru
b. Wisata Makam Hubulo yang terletak di Kecamatan Tapa, Desa Kramat
c. Wisata Makam Raja Bulonggodu yang terletak di Kecamatan Tapa, Desa Dunggala

d. Wisata Makam Manuli Sastrawan Lisan (Tanggomo) Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur; dan
e. Wisata Makam Kramat di Desa Pinogu Kecamatan Pinogu.
f. Wisata budaya perayaan adat religi, di Kecamatan Tapa.
g. Wisata Budaya Kampung Polahi di Longalo Kec Bulango Utara.

(2) Kawasan pariwisata alam yaitu :

a. Wisata alam Lombongo, Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah,
b. Wisata alam air panas Libungo, Desa Libungo Kecamatan Suwawa Selatan,
c. Wisata alam air panas Pangi, Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur,
d. Wisata Air Terjun Ilohuuwa, Desa Ilohuuwa Kecamatan Bone,
e. Wisata Pemandian ALam, Desa Meranti Kecamatan Tapa,
f. Wisata Danau Perintis, Kecamatan Suwawa
g. Wisata Taman Laut Olele, Desa Olele Kecamatan Kabila Bone,
h. Wisata Taman Bawah Laut, di Kawasan Bone Pesisir.
i. Wisata Pantai Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Desa Molotabu
j. Wisata Pantai Bulawa, Kecamatan Bulawa
k. Wisata Pantai kurinai, Kecamatan Kabila Bone
l. Wisata Air Terjun Molotabu di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone
m. Wisata alam Bukit Peyapata, di Kecamatan Tilongkabila;
n. Wisata alam Taman Nasional, di Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur.
o. Wisata Bukit Tangga Bali, Di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone
p. Wisata Pantai Pasir Putih di Desa Nyiur Hijau, Kecamatan Bulawa
q. Wisata Pantai Pasir Putih di Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa
r. Wisata Pantai Huangobotu di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone
s. Wisata Pantai Botubarani di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone
t. Wisata Wisata Goa Lumut, Savana Santuari Maleo, di Desa Hungayono Kecamatan Suwawa Timur.

(3) Kawasan pariwisata buatan, yaitu :

Wisata *riverside* (jasa dan pariwisata pinggiran sungai) di beberapa titik potensi sepanjang Sungai Bone di Kecamatan Kabila dan Kecamatan Suwawa.

a. Kawasan wisata kuliner di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila.
b. Kawasan wisata *Center Point*, di Kecamatan Tilongkabila.

Kawasan Perikanan;

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Bone Bolango terdiri atas :

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap Wilayah di wilayah Kabupaten Bone Bolango pada jarak 0 – 12 mil dan Panjang pantai ± 60 KM
- Kawasan budidaya perikanan air laut, berada di Kecamatan Kabila Bone dan Kecamatan Bone.
- Kawasan budidaya perikanan air tawar, di Kecamatan Tapa, Bulango Timur, Kabila, Tilongkabila, Bulango Utara, Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Pinogu, Bulango Selatan dan Kecamatan Botupingge.
- Kawasan pengolahan dan pelabuhan perikanan meliputi industri pengolahan perikanan di kecamatan Bone dan Kabila Bone, pelabuhan perikanan di kecamatan Bone dan Kabila Bone dan *cool storage* yang dikembangkan di Kecamatan Kabila Bone (Botubarani), Kecamatan Bone Pantai (Desa Tongo), dan Kecamatan Bone (Desa Sogitia).

Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan lindung adalah:

a. *Kawasan hutan lindung* adalah kawasan yang memiliki kemiringan lereng >45 % dan wilayah dengan ketinggian > 2.000 meter dari permukaan laut.
b. *Kawasan Yang Memberikan Pelindungan Kawasan Bawahannya*, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.
c. *Kawasan Perlindungan Setempat*, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.
d. *Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya*, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
e. *Kawasan Rawan Bencana Alam*, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah

longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan

f. *Kawasan Lindung Lainnya*, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Bone Bolango telah ditentukan, yaitu : hutan lindung dengan total luas **15.929,60** Ha yang terletak di Kecamatan Suwawa Timur (407,96 Ha) ; Kecamatan Botupingge (611,93 Ha) ; Kecamatan Bulango Ulu (1.219,66 Ha) ; Kecamatan Bulango Utara (6.180,29 Ha) ; Kecamatan Kabila Bone (1.884,09 Ha), Kecamatan Suwawa Selatan (2.853,65 Ha) ; Kecamatan Bone Pantai (2.623,84 Ha) dan di Kecamatan Bone (148,13 Ha), kawasan sempadan pantai luas kurang lebih 1.300 Ha. Kawasan sempadan sungai terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan luas kurang lebih 3.042,40 Ha yang meliputi kawasan sekitar Sungai Bone ; kawasan sekitar Sungai Bolango ; kawasan sekitar Sungai Palanggua ; kawasan sekitar Sungai Bilungala ; kawasan sekitar Sungai Taludaa dan kawasan sekitar Sungai Tapadaa, kawasan taman nasional Bogani Nani Wartabone 104.740,15 Ha atau 53,5 % dari total luasan Kabupaten Bone Bolango, Kawasan Konservasi Laut Daerah Olele ± 2460 Ha (Dinas Kelautan dan Perikanan Bone Bolango, 2009). Luasan tersebut diusulkan untuk ditingkatkan menjadi 5000 Ha, hingga tahun 2031

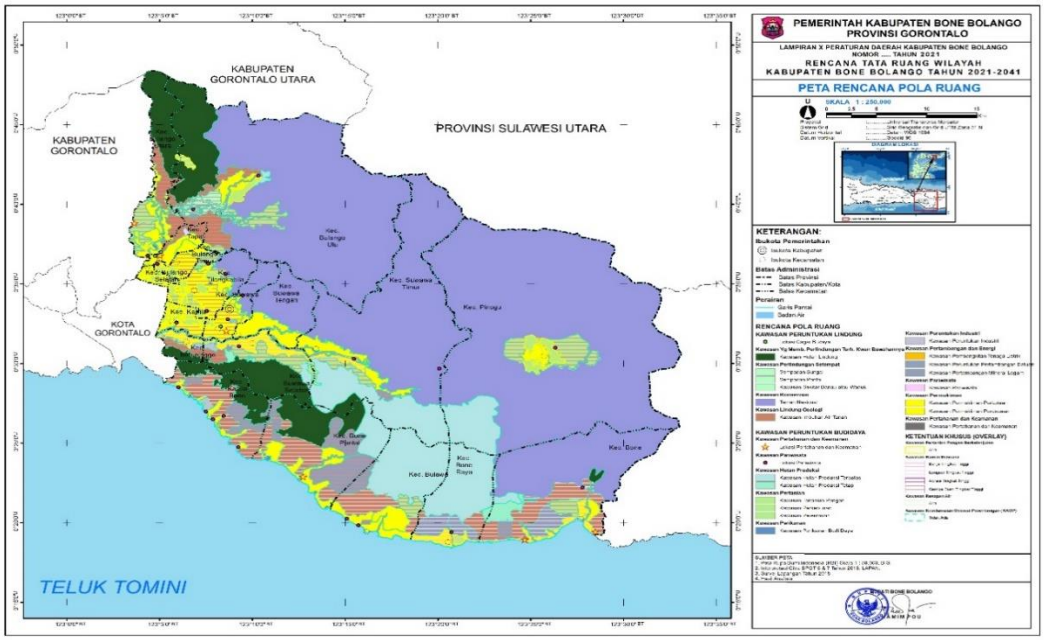

Gambar 12. Peta Pola Ruang Kabupaten Bone Bolango

3.1.11 Persampahan

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sebagai sisa hasil kegiatan manusia tentu saja timbulan sampah akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu pola konsumsi penduduk memberikan kontribusi terhadap jenis sampah, pola konsumsi yang berbeda menyebabkan komposisi jenis sampah yang berbeda. Timbulan sampah di Kabupaten Bone Bolango bersumber dari berbagai aktivitas, yaitu: 1). rumah tangga, 2). industri, 3). pasar dan pertokoan, 4). perkantoran, 5). rumah sakit dan puskesmas, 6). peternakan, dan 7). pertanian dan perkebunan.

Sampah yang bersumber dari aktivitas peternakan, pertanian, dan perkebunan umumnya sudah dapat ditangani oleh masyarakat. Kotoran ternak diolah masyarakat menjadi pupuk kandang atau diolah menjadi gas bio untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Sampah dari sisa panen dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung aktivitas peternakan maupun dikembalikan untuk mendukung aktivitas pertanian. Bagian tanaman sisa panen dapat digunakan untuk pakan ternak atau dikembalikan lagi ke tanah untuk menambah unsur hara tanah.

Sampah selain yang berasal dari pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagian besar masih dibakar atau dibuang sembarangan, sebagian kecil dikelola di tempat pemrosesan akhir (TPA). Dari 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango, hanya 7 kecamatan yang sudah mendapatkan layanan persampahan dengan cakupan layanan yang beragam. Cakupan layanan persampahan dapat diketahui dari sebaran tempat penampungan sampah (TPS) yang ada. Volume sampah yang ditangani ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Volume sampah yang ditangani di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019

NO	BULAN	URAIAN TPA DAN TPST	BERAT SAMPAH (TON)
1	Januari	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	162.489
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
2	Februari	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	140.413
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
3	Maret	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	**142.748**
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
4	April	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	148.860

NO	BULAN	URAIAN TPA DAN TPST	BERAT SAMPAH (TON)
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
5	Mei	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	166.740
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
6	Juni	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	**167.735**
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
7	Juli	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	173.956
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
8	Agustus	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	163.498
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
9	September	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	**161.814**
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
10	Oktober	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	207.485
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
11	November	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	155.816
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
12	Desember	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)	186.457
		Kompensasi Dampak Negatif (KDN)	
13	TPST	Sampah yang diolah	
Jumlah			1,791.554
			1,978.011

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Bone Bolango, 2020

3.1.12 Kondisi Demografi dan Sosial Budaya

a. Demografi

Deskripsi keadaan demografi Kabupaten Bone Bolango yang disajikan dalam laporan ini meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, proyeksi jumlah penduduk, jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk, jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga. Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 -2019 ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango Per Kecamatan Tahun 2015 – Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2015	2016	2017	2019
1	Tapa	7956	7521	7511	7742

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2015	2016	2017	2019
2	Bulango Utara	7825	7870	7914	8182
3	Bulango Selatan	10429	10841	10839	11164
4	Bulango Timur	5549	5652	5736	5833
5	Bulango Ulu	3918	4010	4077	4251
6	Kabila	23634	23162	23045	23714
7	Botupingge	6448	6464	6521	6782
8	Tilongkabila	18242	18438	18515	19321
9	Suwawa	12572	12625	12845	13202
10	Suwawa Selatan	5200	5325	5393	5656
11	Suwawa Timur	5245	5363	5470	5518
12	Suwawa Tengah	6221	6341	6322	6392
13	Pinogu	2006	2034	2097	2096
14	Bonepantai	10867	10905	10944	11123
15	Kabila Bone	11281	11206	11285	11598
16	Bone Raya	6648	6891	6935	7154
17	Bone	9372	9686	9671	9986
18	Bulawa	5137	5339	5377	5615
Kabupaten Bone Bolango		**158550**	**159673**	**160497**	**165334**

Sumber: Badan Pusat Statistik Bone Bolango, (2016; 2017; 2018; 2019; 2020)

Berdasarkan Tabel 11, jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 – Tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada Tahun 2015 sebanyak 158550 jiwa, Tahun 2016 sebanyak 159673 jiwa, Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 160497 jiwa, dan pada Tahun 2019 meningkat lagi menjadi 165334 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bone Bolango dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian dan migrasi. Perubahan jumlah penduduk jika dirinci per kecamatan pada umumnya mengalami peningkatan, namun terdapat 1 kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yaitu Kecamatan Tapa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone Bolango disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bone Bolango Per Kecamatan (Tahun 2018 – Tahun 2019)

Kecamatan		Laju Pertumbuhan Penduduk / Tahun (%)
		2018-2019
1	Tapa	1.76
2	Bulango Utara	1.63
3	Bulango Selatan	0.98
4	Bulango Timur	0.50
5	Bulango Ulu	0.43
6	Kabila	1.99
7	Botupingge	1.50
8	Tilongkabila	2.34
9	Suwawa	1.48
10	Suwawa Selatan	2.15
11	Suwawa Timur	1.10
12	Suwawa Tengah	-0.36
13	Pinogu	0.67
14	Bonepantai	0.90
15	Kabila Bone	1.43
16	Bone Raya	1.15
17	Bone	1.47
18	Bulawa	1.65
Kabupaten Bone Bolango		**1.45**

Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango, 2020

Berdasarkan BPS Kabupaten Bone Bolango (2019), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 – 2018 sebesar 1.39%, sedangkan berdasarkan Tabel 9, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018-2019 sebesar 1.45%. Laju pertumbuhan penduduk di setiap Kecamatan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Perubahan jumlah penduduk jika dirinci per kecamatan pada umumnya mengalami peningkatan. Namun Kecamatan Suwawa Tengah mengalami laju pertumbuhan penduduk -0.36% untuk Tahun 2018-2019. Komponen-komponen yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi) penduduk. Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 13.

Tabel 13. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	5958	5558	11516
5-9	7560	7141	14701
10-14	7777	7389	15166
15-19	8563	8267	16830
20-24	7540	7299	14839
25-29	6977	6896	13873
30-34	5660	5344	11004
35-39	6247	5916	12163
40-44	6259	6102	12361
45-49	5372	5326	10698
50-54	4492	4612	9104
55-59	3586	3679	7265
60-64	2718	2998	5716
65+	4565	5533	10098
Kabupaten Bone Bolango	**83274**	**82060**	**165334**

Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango, 2020

Tabel 13 menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone Bolango, penduduk laki-laki berjumlah 83274 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 82060 jiwa. Dilihat dari kelompok umur, penduduk di Kabupaten Bone Bolango paling banyak didominasi oleh kelompok umur 15-19 Tahun, yaitu dengan jumlah laki-laki sebanyak 8563 jiwa dan perempuan 8267 jiwa dan total keseluruhan berjumlah 16830 orang. Kelompok umur dengan jumlah penduduk paling rendah yaitu kelompok umur yang sudah berusia 60 - 64 Tahun, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2718 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2998 jiwa. Rasio jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
Tapa	97.85
Bulango Utara	101.85
Bulango Selatan	98.26
Bulango Timur	97.26
Bulango Ulu	106.36
Kabila	95.58
Botupingge	103.97
Tilongkabila	100.05
Suwawa	99.01
Suwawa Selatan	103.75
Suwawa Timur	105.90
Suwawa Tengah	105.93
Pinogu	103.89
Bonepantai	104.66
Kabila Bone	104.66
Bone Raya	103.18
Bone	102.19
Bulawa	105.38
Kabupaten Bone Bolango	101.48

Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango, 2020

Berdasarkan Tabel 14, *Sex Ratio* (Rasio Jenis Kelamin) di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 101.48, maka bisa dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Pada umumnya perbarasio jenis kelamin per kecamatan menunjukkan angka >100, namun terdapat 5 kecamatan yang memiliki *sex ratio* <100 yaitu Kecamatan Tapa, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Suwawa. Angka sex ratio <100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibanding jumlah penduduk laki-laki.

b. Sosial Budaya

Aspek sosial budaya yang dideskripsikan dalam laporan ini meliputi angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK), indeks pembangunan manusia (IPM), angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone Bolango. Tabel 15

menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019.

Tabel 15. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI	99.66	110.82
SMP/MTS	72.03	78.79
SMA/SMK/MA	56.69	78.98

Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango, 2020

Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Tabel 12 menunjukkan APM SD/MI sebesar 99.66, SMP/MTS sebesar 72.03, dan SMA/SMK/MA sebesar 56.69. Angka tersebut menunjukkan bahwa APM SD/MI sangat tinggi sebesar 99.66 artinya sekitar 99.66 persen penduduk di Kabupaten Bone Bolango yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/sederajat. Namun APM SMA/SMK/MK menunjukkan hasil yang rendah yaitu 56.69%, artinya hanya 56.69 persen penduduk di Kabupaten Bone Bolango yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA/sederajat.

Angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APK Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 sebesar 110.82 pada jenjang SD/MI, jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 78.79, dan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 79.98. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017- 2019

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2019	69.63
2018	69.06
2017	68.11

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2016	67.48
2015	66.83
2014	66.03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (2020)

Menurut BPS, IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM daerah, maka pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Tabel 13 menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Bone Bolango meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 IPM sebesar 66.03, tahun 2015 IPM sebesar 66.83, tahun 2016 IPM sebesar 67.48, tahun 2017 IPM sebesar 68.11, tahun 2018 sebesar 69.06, dan tahun 2019 69.63. Angka-angka IPM tersebut menunjukkan IPM Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2014 – tahun 2019 berada pada kategori sedang (angka IPM 60 hingga 70 tingkat pertumbuhan sedang). Angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 - 2019

Tahun	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	67.71	67.95	68.38
Harapan Lama Sekolah	13.09	13.44	13.45
Rata-rata Lama Sekolah	7.84	8.04	8.07

Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango, 2018, 2019, 2020

Angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone Bolango meningkat setiap tahunnya. Tabel 14 menunjukkan angka harapan hidup Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 sebesar 67.71, tahun 2018 sebesar 67.95, tahun 2019 sebesar 68.38. Harapan lama sekolah Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 sebesar 13.09, tahun 2018 sebesar 13.44, dan tahun 2019 sebesar 13.45. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 sebesar 7.84, tahun 2018 sebesar 8.04, dan tahun 2019 sebesar 8.07.

c. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan yang dideskripsikan dalam laporan ini meliputi jumlah penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut

jenis kegiatan selama seminggu yang lalu Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2019 dan jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2019. Jumlah penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja berdasarkan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2019

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	48945	28130	77075
Bekerja	47517	26203	73720
Pengangguran	1428	1927	3355
Bukan Angkatan Keja	14744	56498	71242
Sekolah	4592	5788	10380
Mengurus Rumah Tangga	1571	23952	25523
Lainnya/	3505	1403	4908
Jumlah	63689	84628	148317
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/	76.85	33.24	51.97
Tingkat Pengangguran	2,92	6.85	4.35

Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango ,2020

Tabel 18 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja dengan jumlah 73720 orang dan pengangguran dengan jumlah 3355 orang. Bukan angkatan kerja terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu sekolah dengan jumlah 10380 orang, mengurus rumah tangga dengan jumlah 25523 orang, dan kegiatan lainnya dengan jumlah 4908 orang. Jumlah seluruh angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk semua jenis kegiatan dalah sebesar 148317 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja untuk semua jenis kegiatan memiliki nilai 51.97, sedangkan tingkat pengangguran untuk semua jenis kegiatan berjumlah 435.

Tabel 19. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2019

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	15640	6391	22031
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	4020	1755	5775

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1993	277	2270
Buruh, Karyawan, Pegawai	20903	14041	34944
Pekerja bebas	3752	659	4411
Pekerja keluarga/tak dibayar	1209	3080	4289
Jumlah	**47517**	**26203**	**73720**

Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango ,2020

Jumlah penduduk berumur 15 Tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 16. Status pekerjaan utama terdiri dari 6 status yang memiliki jumlah yang berbeda-beda. Penduduk dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri berjumlah 22031 orang. Penduduk dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar berjumlah 5775 orang. Penduduk dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar berjumlah 2270 orang. Penduduk dengan status pekerjaan utama buruh, karyawan, dan pegawai berjumlah 34944 orang. Jumlah penduduk dengan status pekerja utama pekerja bebas sebanyak 4411 orang. Penduduk dengan status pekerja keluarga/tak dibayar berjumlah 4289 orang. Total keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan utama adalah sebesar 180874 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa status pekerjaan utama di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 didominasi oleh status pekerjaan utama berupa buruh, karyawan dan pegawai.

3.2 Daya Dukung Lingkungan Hidup

3.2.1 Daya Dukung Air di Kabupaten Bone Bolango

Analisis daya dukung air dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perhitungan Ketersediaan *(Supplay)* Air (SA)

   Perhitungan S_A diestimasi dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari Metode Rasional yaitu: (Permen LH No. 17 Tahun 2009).

   $$S_A = 10\ C\ R\ A \qquad (1)$$

   dimana:

$$C = \frac{\sum (C_i A_i)}{\sum A_i} \quad (2)$$

dan

$$R = \frac{\sum R_i}{m} \quad (3)$$

dimana:

S_A = ketersediaan air (m^3/tahun)
C = koefisien limpasan tertimbang
C_i = koefisien limpasan penggunaan lahan i
A_i = luas penggunaan lahan i
R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun)
R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i (mm/tahun)
m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan
A = luas wilayah (ha)
10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m^3.

2. Perhitungan Kebutuhan *(Deman)* Air (D_A)
   Perhitungan DA diestimasi dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Permen LH No. 17 Tahun 2009):

$$D_A = N \times KHL_A \quad (4)$$

   dimana:

   D_A = total kebutuhan air (m^3/tahun)
   N= jumlah penduduk (orang)
   KHL_A = kebutuhan air untuk hidup layak.

3. Penentuan Status Daya Dukung Air
   Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (S_A) dan kebutuhan air (D_A). Bila $S_A > D_A$ maka daya dukung air dinyatakan surplus. Sebaliknya jika $S_A < D_A$ maka daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui (Permen LH No. 17 Tahun 2009).

HASIL ANALISIS DAYA DUKUNG AIR

1. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang

   Data luas penggunaan lahan bersumber dari draft RTRW Kabupaten Bone Bolango 2019-2039, sedangkan koefisien penggunaan lahan mengacu pada SNI 2415:2016 Tentang Tata Cara Perhitungan Debit Banjir

Rencana. Hasil perhitungan koefisien penggunaan lahan tertimbang *(C)* berdasarkan persamaan (2) ditunjukkan pada Tabel 20.

Tabel 20. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang

Penggunaan Lahan	Koefisien Limpasan (C_i)	Luas (Ha) (A_i)	$C_i \times A_i$
Air Danau / Situ	0,05	21,81	1,09
Air Empang	0,05	0,88	0,04
Air Rawa	0,05	0,25	0,01
Air Tambak	0,05	2,83	0,14
Hutan Rimba	0,30	143.676,65	43.103,00
Padang Rumput	0,35	0,76	0,26
Pasir / Bukit Pasir Darat	0,20	124,22	24,84
Pasir / Bukit Pasir Laut	0,20	10,04	2,01
Perkebunan / Kebun	0,40	9.880,66	3.952,26
Permukiman dan Tempat Kegiatan	0,50	2.452,90	1.226,45
Sawah	0,15	2.028,65	304,30
Sawah Tadah Hujan	0,15	123,94	18,59
Semak Belukar / Alang Alang	0,30	12.767,60	3.830,28
Sungai	0,05	786,04	39,30
Tambang	0,40	21,28	8,51
Tanah Kosong / Gundul	0,20	56,49	11,30
Tegalan / Ladang	0,40	16.811,68	6.724,67
Jumlah		**59.247,07**	**59.247,07**
Koefsien Limpasan Tertimbang (*C*)			**0,31**

2. Perhitungan Rata-Rata Curah Hujan Wilayah

Nilai rata-rata curah hujan wilayah (*R*) diambil dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Klimatologi Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, 10 tahun terakhir (BPS Kab. Bone Bolango). Data rata-rata curah hujan di Kabupaten Bone Bolango 10 tahun terakhir (2010-2019) ditunjukkan pada Tabel 21.

Tabel 21. Jumlah curah hujan rata-rata tahunan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2019

	Curah Hujan (mm)									
Bulan	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Januari	100,0	248,0	109,0	109,0	146,0	120	96,0	183,9	183,0	74,5
Februari	45,0	202,0	130,0	130,0	15,0	68,0	170,0	174,5	148,0	45,9
Maret	38,0	269,0	67,0	67,0	107,5	15,0	0,0	127,1	238,0	83,0
April	153,0	194,0	159,0	159,0	124,0	23,0	118,0	89,7	192,0	330,7
Mei	378,0	97,0	116,0	116,0	135,8	188	208,0	85,2	122,0	51,4

Curah Hujan (mm)										
Bulan	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Juni	263,0	136,0	205,0	205,0	112,0	176	277,0	219,7	132,0	119,1
Juli	172,0	40,0	244,0	244,0	45,0	0,0	162,0	145,5	83,0	25,6
Agustus	277,0	19,0	107,0	107,0	54,0	0,0	37,0	135,3	91,0	6,7
September	302,0	104,0	46,0	46,0	6,0	0,0	167,0	121,4	9,0	0,0
Oktober	250,0	81,0	154,0	154,0	72,0	45,4	303,0	65,0	152,0	129,9
November	84,0	66	412	412	321	154	189	105,4	194,0	8,2
Desember	250	142	27,0	27,0	266,0	55,0	155,0	86,0	247,0	173,8
Jumlah	2.312	1.598	1.776	1.776	1.404,3	844,9	1.882,0	1.538,4	1.791,0	1.048,8
Rata-Rata	**1.597,1**									

Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango, 2011-2020

3. Penghitungan Ketersediaan (Supply) Air

   Berdasarkan persamaan (1), ketersediaan *(supply)* air (S_A) di wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

   $S_A = 10\ C\ R\ A$

   $= 10 \times 0{,}31 \times 1.597{,}1 \times 191.544$

   $= 948.336.259{,}4\ m^3/tahun$

4. Penghitungan Kebutuhan (Demand) Air

   Berdasarkan data BPS Kabupaten Bone Bolango (2020), jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2019 (N) sebesar 165.334 orang dan kebutuhan air untuk hidup layak (KHL_A) sesuai Permen LH No. 17 Tahun 2009 adalah sebesar 1.600 m^3/kapita/tahun, sehingga kebutuhan *(demand)* air (D_A) di wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dihitung sesuai persamaan (4) sebagai berikut:

   $D_A = N \times KHL_A$

   $= 165.334 \times 1.600$

   $= 264.534.400{,}0\ m^3/tahun$

5. Penentuan Status Daya Dukung Air

   Dari perhitungan di atas diperoleh nilai S_A (948.336.259,4 m^3/tahun) > D_A (264.534.400,0 m^3/tahun), sehingga berdasarkan kriteria Permen LH No. 17 Tahun 2009, status daya dukung air di wilayah Kabupaten Bone Bolango saat ini dinyatakan surplus.

6. Proyeksi Daya Dukung Air

Untuk menggambarkan ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Bone Bolango, dapat diproyeksikan daya dukung air Kabupaten Bone Bolango untuk 10 tahun ke depan (**Gambar 1**).
Laju pertumbuhan penduduk dihitung menggunakan metode geometrik sebagai berikut (https://sirusa.bps.go.id):

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1 \qquad (5)$$

dimana:

r = Laju pertumbuhan penduduk

P_t = Jumlah penduduk tahun t

P_0 = Jumlah penduduk tahun dasar

t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Sehingga dengan menggunakan persamaan (5), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone Bolango (2010-2019) sebesar:

$$r = \left(\frac{165.334}{141.915}\right)^{1/9} - 1 = 0{,}017$$

Ketersediaan air (S_A) sebesar 948.336.259,4 m³/tahun dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,017 diasumsikan konstan sepanjang tahun.

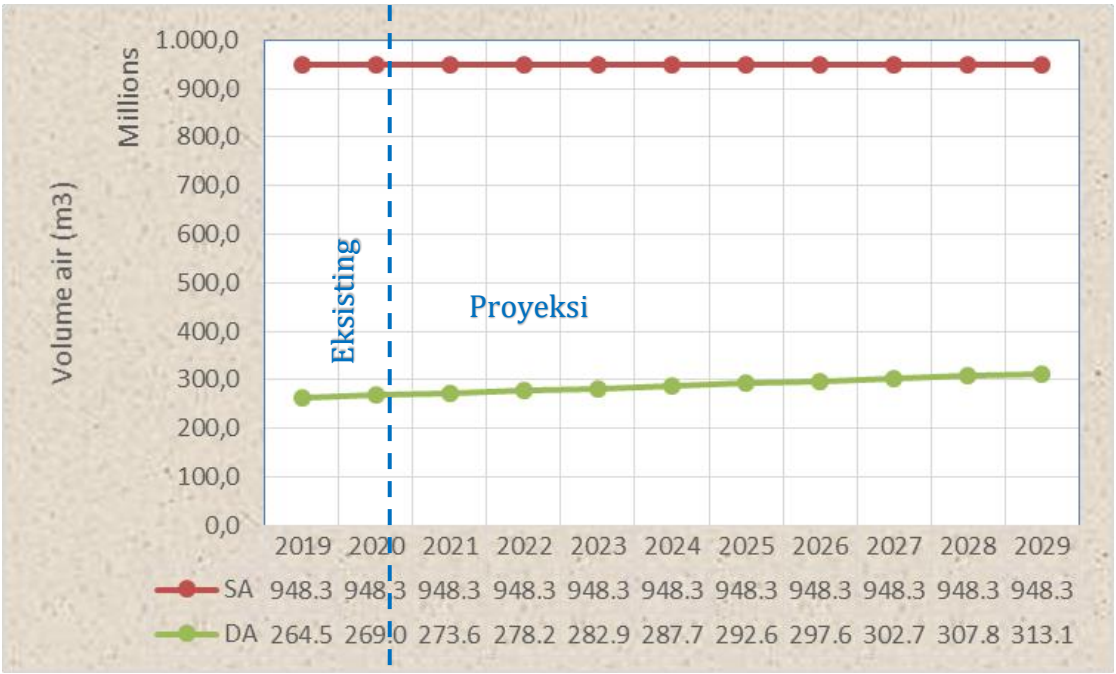

Gambar 13. Data Eksisting dan Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Bone Bolango 10 Tahun Ke Depan

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Bone Bolango disalurkan melalui 11 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA), yaitu:

- IPA Uabanga : kapasitas 30 liter/detik
- IPA Longalo : kapasitas 40 liter/detik
- IPA Lombongo 1 : kapasitas 20 liter/detik
- IPA Lombongo 2 : kapasitas 20 liter/detik
- IPA Botupingge : kapasitas 26 liter/detik
- IPA Ulanta : kapasitas 25 liter/detik
- IPA Langge : kapasitas 20 liter/detik
- SPL Bone Pantai : kapasitas 5 liter/detik
- IPA Tulabolo : kapasitas 5 liter/detik
- IPA Kabila Bone : kapasitas 20 liter/detik
- IPA Tinemba : kapasitas 10 liter/detik

Total : kapasitas 220 liter/detik

Gambar 15 menunjukkan daya dukug air di Kabupaten Bone Bolango belum terlampaui hingga Tahun 2030. Akan tetapi pencapaian indicator ketersediaan air masih belum tercapai. Terdapat 10,14% rumah tangga yang belum mendapatkan akses layanan sumber air minum yang layak.

3.2.2 Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Bone Bolango

Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. seperti digambarkan dalam diagram di bawah ini.

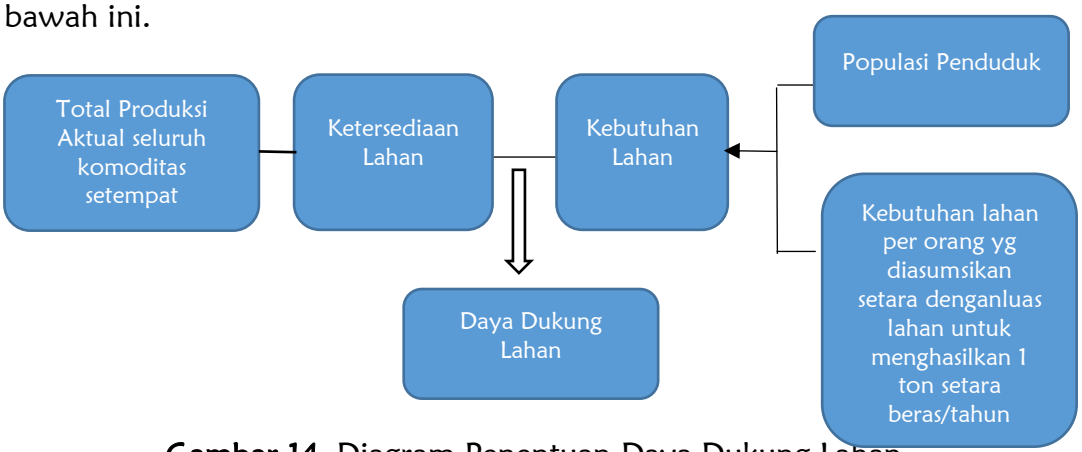

Gambar 14. Diagram Penentuan Daya Dukung Lahan

Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari setiap komoditas di suatu wilayah, dengan menjumlahkan produk dari semua komoditas yang ada di wilayah tersebut. Untuk penjumlahan ini digunakan harga sebagai faktor konversi karena setiap komoditas memiliki satuan yang beragam. Sementara itu, kebutuhan lahan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Daya dukung lahan di Kabupaten Bone Bolango ditunjukkan pada Tabel 23.

Tabel 22. Daya dukung lahan di Kabupaten Bone Bolango

Tahun	Penduduk	Kebutuhan Lahan	Ketersediaan Lahan	DDL	KETERANGAN
2019	165334	36289.29	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2020	167731	36815.48	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2021	170163	37349.31	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2022	172631	37890.87	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2023	175134	38440.29	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2024	177673	38997.67	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2025	177673	38997.67	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2026	182863	40136.81	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2027	185515	40718.79	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2028	188205	41309.21	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2029	190934	41908.20	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2030	193702	42515.87	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2031	196511	43132.35	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2032	199360	43757.76	95915.71	$S_L > D_L$	Belum terlampaui

Sumber : hasil analisis, 2020

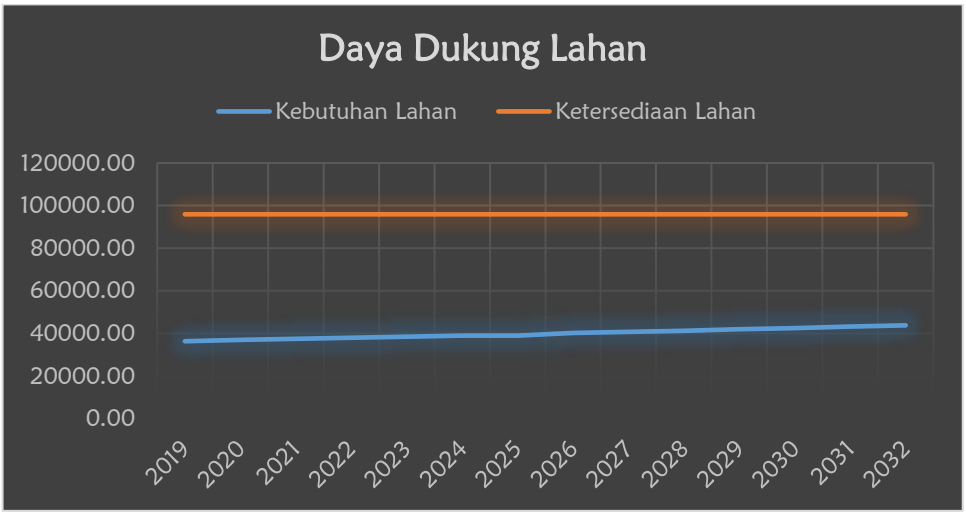

Gambar 15. Grafik daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019-2032

3.2.3 Daya Dukung Peternakan

Potensi peternakan merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil analisis indeks daya dukung (IDD) peternakan sapi diperoleh nilai 2,68. Hal ini menunjukkan kondisi daya dukung peternakan di Kabupaten Bone Bolango dalam posisi aman. Potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Bone Bolango sebesar 54.018 ekor sapi (Lampiran ……)

Tabel 23. Daya Dukung Hijauan Pakan Ternak di Kabupaten Bone Bolango

Kecamatan	Total Produksi Pakan	DD (ST)	Jumlah Ternak	Daya Dukung (ST)	Indeks Daya Dukung (IDD)	Status	Kapasitas penambahan
TAPA	7053.253	3093.532	1271	889.7	3.48	Aman	2203.83
BULANGO UTARA	7053.253	3093.532	2469	1728.3	1.79	Rawan	1365.23
BULANGO SELATAN	9282.823	4071.414	2819	1973.3	2.06	Aman	2098.11
BULANGO TIMUR	13766.87	6038.101	1555	1088.5	5.55	Aman	4949.60
BULANGO ULU	62147.31	27257.59	1669	1168.3	23.33	Aman	26089.29
KABILA	42144.7	18484.52	3192	2234.4	8.27	Aman	16250.12
BOTUPINGGE	1729.938	758.7445	1009	706.3	1.07	Kritis	52.44
TILONGKABILA	42136.79	18481.05	7648	5353.6	3.45	Aman	13127.45
SUWAWA	15805.98	6932.449	3478	2434.6	2.85	Aman	4497.85
SUWAWA SELATAN	8531.815	3742.024	970	679	5.51	Aman	3063.02
SUWAWA TIMUR	9912.501	4347.588	1886	1320.2	3.29	Aman	3027.39
SUWAWA TENGAH	10422.88	4571.437	653	457.1	10.00	Aman	4114.34
PINOGU	1453.949	637.6969	641	448.7	1.42	Kritis	189.00
BONE PANTAI	4864.999	2133.771	1576	1103.2	1.93	Aman	1030.57
KABILA BONE	5598	2455.263	1517	1061.9	2.31	Aman	1393.36
BONE RAYA	4548.375	1994.901	652	456.4	4.37	Aman	1538.50
BONE	4509.5	1977.851	1043	730.1	2.71	Aman	1247.75
BULAWA	11726.44	5143.174	918	642.6	8.00	Aman	4500.57
BONE BOLANGO	196474.3	86172.92	45935	32154.5	2.68	Aman	54035.96

Sumber : hasil analisis, 2020

Isu Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan masalah ketahanan pangan adalah TPB ke-2, yaitu "Menghilangkan kelaparan, mecapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan" dengan outcome berupa meningkatknya derajat kesehatan masyarakat dan terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Bone Bolango. Dinas Kesehatan merupakan OPD yang memiliki peran utama dalam meraih outcome meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Adapun outcome terkait terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Bone Bolango akan memerlukan peranan dari para pihak, antara lain dinas yang mengurusi

pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat; ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan; sosial; serta koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian.

3.2.4 Daya dukung lahan pemukiman

Daya dukung wilayah untuk permukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna manampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak (Muta'ali, 2015). Metode perhitungan dilakukan dengan membandingkan ketersedian lahan untuk pemukiman berdasarkan RTRW Kabupaten Bone Bolango dan kebutuhan lahan minimal untuk setiap penduduk. Kebutuhan lahan minimal untuk pemukiman sebesar 0,01 Ha (BSN, 2004). Daya dukung lahan pemukiman ditunjukkan pada Tabel 26.

Tabel 24. Daya Dukung Lahan Pemukiman Kabupaten Bone Bolango

No	Tahun	Kebutuhan Lahan Pemukiman (DL) (Ha)	Ketersediaan Lahan pemukima (SL) (Ha)	Daya Dukung	Status
1	2011	1527.63	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
2	2012	1601.18	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
3	2013	1662.35	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
4	2014	157624	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
5	2015	157924	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
6	2016	1596.73	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
7	2017	1604.97	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
8	2019	1653.34	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
9	2020	1677.31	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
10	2021	1701.63	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
11	2022	1726.31	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
12	2023	1751.34	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
13	2024	1776.73	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
14	2025	1802.50	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
15	2026	1828.63	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
16	2027	1855.15	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
17	2028	1882.05	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
18	2029	1909.34	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui
19	2030	1937.02	2172.34	$S_L > D_L$	Belum terlampaui

Sumber: hasil analisis, 2020

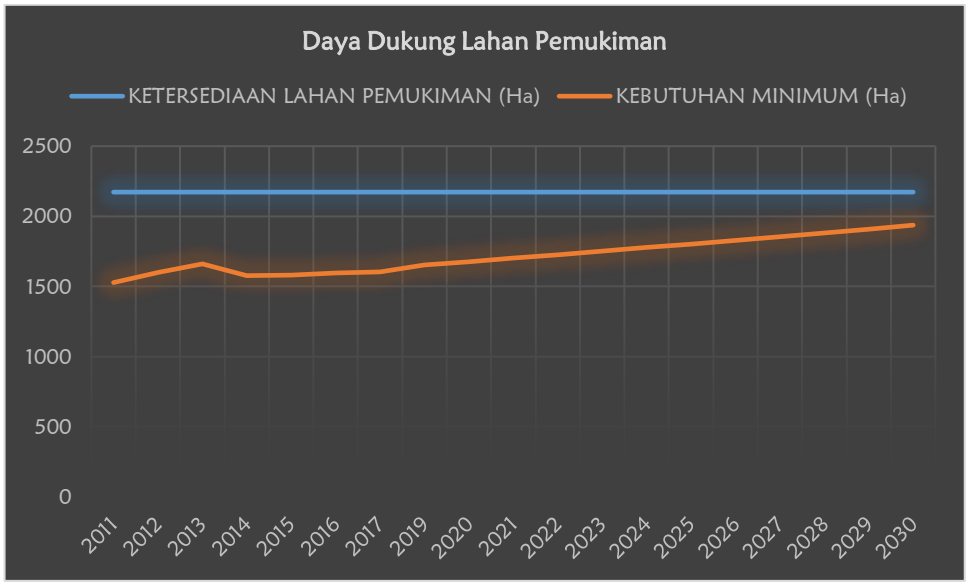

Gambar 16. Grafik daya dukung lahan pemukiman Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2030

Hasil analisis menunjukkan bahwa daya dukung lahan untuk pemukiman di Kabupaten Bone Bolango masih surplus hingga Tahun 2030. Daya dukung lahan pemukiman menurut kecamatan di Kabupaten Bone Bolango ditunjukkan pada Tabel 27.

Tabel 25. Daya dukung lahan pemukiman menurut kecamatan di Kabupaten Bone Bolango

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KETERSEDIAAN LAHAN PEMUKIMAN S_L (Ha)	KEBUTUHAN MINIMUM PEMUKIMAN $D_{L\,MIN}$ (HA)	KONDISI MINIMUM	STATUS MINIMUM
1	TAPA	7742	44.79	77.42	$S_L < D_{LMIN}$	DEFISIT
2	BULANGO UTARA	8187	4.94	81.87	$S_L > D_{LMIN}$	SURPLUS
3	BULANGO SELATAN	11164	19.61	111.64	$S_L > D_{LMIN}$	SURPLUS
4	BULANGO TIMUR	5833	8.61	58.33	$S_L > D_{LMIN}$	SURPLUS
5	BULANGO ULU	4251	34.29	42.51	$S_L < D_{LMIN}$	DEFISIT
6	KABILA	23714	220.65	237.14	$S_L < D_{LMIN}$	DEFISIT
7	BOTUPINGGE	6782	37.23	67.82	$S_L > D_{LMIN}$	SURPLUS
8	TILONGKABILA	19321	92.36	193.21	$S_L > D_{LMIN}$	SURPLUS
9	SUWAWA	13202	126.72	132.02	$S_L > D_{LMIN}$	SURPLUS
10	SUWAWA SELATAN	5656	19.61	56.56	$S_L < D_{LMIN}$	DEFISIT
11	SUWAWA TIMUR	5518	67.25	55.18	$S_L > D_{LMIN}$	SURPLUS
12	SUWAWA TENGAH	6392	34.88	63.92	$S_L < D_{LMIN}$	DEFISIT
13	PINOGU	2096	129.03	20.96	$S_L > D_{LMIN}$	SURPLUS
14	BONE PANTAI	11123	667.54	111.23	$S_L > D_{LMIN}$	SURPLUS
15	KABILA BONE	11598	276.3	115.98	$S_L > D_{LMIN}$	SURPLUS

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KETERSEDIAAN LAHAN PEMUKIMAN S_L (Ha)	KEBUTUHAN MINIMUM PEMUKIMAN $D_{L\,MIN}$ (HA)	KONDISI MINIMUM	STATUS MINIMUM
16	BONE RAYA	7154	71.35	71.54	$S_L < D_{LMIN}$	DEFISIT
17	BONE	9986	90.57	99.86	$S_L < D_{LMIN}$	DEFISIT
18	BULAWA	5615	39.55	56.15	$S_L < D_{LMIN}$	DEFISIT

Sumber: hasil analisis, 2020

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada 8 kecamatan yang deficit daya dukung lahan pemukiman yaitu:

- Kecamatan Tapa
- Kecamatan Bulango Ulu
- Kecamatan Kabila
- Kecamatan Suwawa Selatan
- Kecamatan Suwawa Tengah
- Kecamatan Bone Raya
- Kecamatan Bone
- Kecamatan Bulawa

3.3 Jasa Ekosistem

Menurut UU No 32 Tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Defisini daya dukung secara ekologi menurut Rees (1992) merupakan populasi maksimum suatu spesies tertentu yang dapat didukung tanpa batas di suatu habitat tanpa mengganggu produktivitas habitat itu secara permanen.

Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup (2014), daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

3.3.1 Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secaralangsung maupun tidak langsung (De Groot, 1992). Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat fungsi, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Empat fungsi jasa ekosistem dikelaskan menjadi 24 kelas jenis jasa ekosistem, yaitu:

1. Jasa penyediaan : (1) pangan, (2) air bersih, (3) serat, (4) energi, (5) sumber daya genetik.
2. Jasa Pengaturan : (6) Iklim (7) Tata aliran air dan banjir, (8) Pencegahan dan perlindungan dari bencana, (9) Pemurnian air, (10) Pengolahan dan penguraian limbah, (11) Pemeliharaan kualitas udara, (12) Penyerbukan alami, (13) Pengendalian hama dan penyakit.
3. Jasa Budaya : (14) Tempat Tinggal dan ruang hidup, (15) Rekreasi dan Ecotourisme, (16) Estetika Alam, (17) Pendidikan dan pengetahuan, (18) Ikatan budaya, adat, pola hidup, (19) Spiritual dan warisan leluhur.
4. Jasa Pendukung : (20) Pembentukan lapisan tanah dan kesuburan (21) Siklus hara, (22) Produksi primer, (23) Perlindungan plasma nutfah (Biodiversitas), (24) Habitat berkembang biak flora fauna.

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada kegiatan ini ditentukan dengan pendekatan jasa ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan P3E Sumatera (2011), penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar:

- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung)
- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan)

Hasil perhitungan jasa ekosistem berupa nilai indeks yang merupakan representasi dari tinggi rendahnya nilai jasa ekosistem pada suatu wilayah.

Nilai indeks jasa ekosistem berkisar antara 0 (sangat rendah) dan 1 (sangat tinggi), yang ditampilkan menurut administrasi dan ekoregion. Berdasarkan nilai indeks tersebut, kondisi jasa ekosistem dibagi dalam 5 (lima) kriteria berikut; Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST).

a. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pangan didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Penyediaan pangan bagi manusia sangat memerlukan jasa-jasa ekosistem baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Jasa ekosistem penyediaan pangan dalam kajian ini dibagi menjadi lima kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Wilayah dengan jasa ekosistem penyedia pangan tinggi menunjukkan bahwa ekosistem pada wilayah tersebut memiliki daya dukung atau kemampuan menyediakan pangan yang tinggi. Distribusi serta luas jasa ekosistem penyediaan pangan tiap Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango disajikan pada Tabel 29 dan Gambar 17.

Tabel 29 menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Bone Bolango dididominasi oleh jasa ekosistem dengan kelas tinggi dengan persentase 73.34% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Bone Bolango. Lahan yang berpotensi tinggi dalam penyediaan pangan memiliki luas 138450,45 Ha. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan bahan pangan memiliki luasan yang sangat kecil yaitu 503.83 Ha atau sekitar 0.27% dari seluruh lahan di Kabupaten Bone Bolango. Lahan yang memiliki

potensi sedang dalam penyediaan pangan seluas 46871.62 Ha atau sebesar 24.83%. Lahan di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki potensi penyediaan bahan pangan rendah dan sangat rendah memiliki persentase yang sangat kecil yaitu masing-masing seluas 2056.80 Ha dan 883.99 Ha atau sebesar 1.09% dan 0.47%.

Tabel 26. Distribusi Jasa Ekoaiatem Penyediaan Pangan Kabupaten Bone Bolango

NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Bolango Utara	13.26	0.01%	87.25	0.05%	3,006.31	1.59%	2,909.02	1.54%	31.59	0.02%	6,047.43	3.20%
2	Bone	-	0.00%	130.58	0.07%	860.13	0.46%	14,187.28	7.52%	23.47	0.01%	15,201.46	8.05%
3	Bone Raya	-	0.00%	97.17	0.05%	389.59	0.21%	6,036.33	3.20%	6.82	0.00%	6,529.91	3.46%
4	Bonepantai	-	0.00%	144.26	0.08%	526.12	0.28%	9,754.63	5.17%	12.23	0.01%	10,437.23	5.53%
5	Botupingge	-	0.00%	118.70	0.06%	171.85	0.09%	978.14	0.52%	21.79	0.01%	1,290.48	0.68%
6	Bulango Selatan	144.46	0.08%	19.86	0.01%	50.51	0.03%	329.78	0.17%	16.86	0.01%	561.47	0.30%
7	Bulango Timur	101.37	0.05%	3.82	0.00%	553.67	0.29%	532.37	0.28%	-	0.00%	1,191.23	0.63%
8	Bulangoulu	15.41	0.01%	35.79	0.02%	19,633.56	10.40%	17,621.56	9.34%	-	0.00%	37,306.32	19.76%
9	Bulawa	-	0.00%	69.14	0.04%	-	0.00%	8,710.55	4.61%	2.42	0.00%	8,782.12	4.65%
10	Kabila	157.28	0.08%	219.94	0.12%	213.70	0.11%	584.28	0.31%	88.25	0.05%	1,263.45	0.67%
11	Kabila Bone	-	0.00%	136.66	0.07%	922.39	0.49%	4,781.69	2.53%	-	0.00%	5,840.73	3.09%
12	Pinogu	28.44	0.02%	307.76	0.16%	8,774.57	4.65%	40,409.85	21.41%	79.65	0.04%	49,600.27	26.28%
13	Suwawa	77.19	0.04%	170.57	0.09%	672.31	0.36%	1,636.32	0.87%	21.79	0.01%	2,578.18	1.37%
14	Suwawa Selatan	-	0.00%	106.60	0.06%	103.02	0.05%	5,416.46	2.87%	76.01	0.04%	5,702.08	3.02%
15	Suwawa Tengah	6.49	0.00%	123.11	0.07%	1,108.83	0.59%	3,296.39	1.75%	1.33	0.00%	4,536.14	2.40%
16	Suwawa Timur	-	0.00%	133.76	0.07%	7,595.29	4.02%	18,801.12	9.96%	82.39	0.04%	26,612.55	14.10%
17	Tapa	55.79	0.03%	70.71	0.04%	958.84	0.51%	234.03	0.12%	24.14	0.01%	1,343.51	0.71%
18	Tilongkabila	284.31	0.15%	81.12	0.04%	1,330.94	0.71%	2,230.66	1.18%	15.09	0.01%	3,942.12	2.09%
TOTAL		**883.99**	**0.47%**	**2,056.80**	**1.09%**	**46,871.62**	**24.83%**	**138,450.45**	**73.34%**	**503.83**	**0.27%**	**188,766.70**	**100%**

Tabel 29 juga menunjukkan distribusi hasil perhitungan jasa ekosistem penyediaan pangan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan analisis, terdapat 13 Kecamatan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan tinggi sebesar 50% -90 % dari luas wilayahnya. Bahkan terdapat kecamatan yang hampir 100% wilayahnya memiliki jasa ekosistem penyediaan pangan tinggi yaitu Kecamatan Bulawa dengan luas 99.19% dari total wilayah. Kecamatan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan tinggi 50% - 90% yaitu Kecamatan Bone sebesar 93.33%, Kecamatan Bone Raya sebesar 92.44%, Kecamatan Bone Pantai sebesar 93.46%, Kecamatan Botupingge sebesar 75.80%, Kecamatan Bulango Selatan sebesar 58.74%, Kecamatan Kabila Bone sebesar 81.87%, Kecamatan Pinogu 81.47%, Kecamatan Suwawa 63.47%, Kecamatan Suwawa Selatan sebesar 94.99%, Kecamatan Suwawa Tengah sebesar 72.67%, Kecamatan Suwawa Timur sebesar 70.65% dan Kecamatan Tilongkabila sebesar 56.59%.

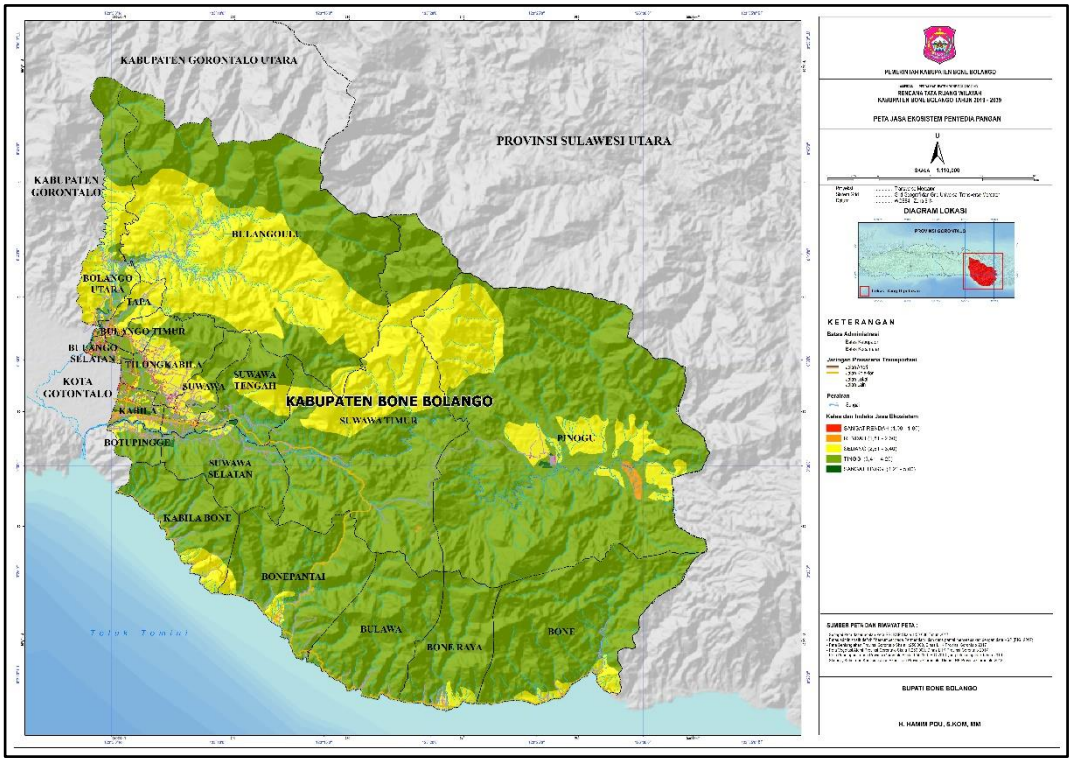

Gambar 17. Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Bone Bolango

Karakteristik penyediaan pangan Kabupaten Bone Bolango yang ditunjukkan pada Tabel 29 dan Gambar 17 menunjukan bahwa secara umum kondisi ekosistem Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi penyediaan pangan tinggi. Namun perlu diperhatikan kecamatan-kecamatan dengan potensi penyediaan pangan didominasi kelas sedang diantaranya Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Bulangoulu, dan Kecamatan Tapa.

b. Jasa Ekosistem Penyediaan Air

Kelangsungan hidup semua makhluk hidup sangat ditentukan pula oleh ketersediaan air. Berdasarkan keterdapatan, air tawar di daratan digolongkan menjadi dua yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan air yang berada di sungai, danau, waduk, rawa dan badan air lain, yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah. Sedangkan air tanah mupakan air yang berada di bawah permukaan tanah. Ketersediaan air bagi makhluk hidup tersebut merupakan manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air, selain itu air hujan juga dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Jasa penyediaan air bersih oleh ekosistem sangat dipengaruhi

oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan.

Jasa ekosistem penyediaan air dibagi menjadi lima kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Wilayah dengan jasa ekosistem penyedia air tinggi menunjukkan bahwa ekosistem pada wilayah tersebut memiliki daya dukung atau kemampuan menyediakan air yang tinggi. Distribusi serta luas jasa ekosistem penyediaan air tiap Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango disajikan pada Tabel 30 dan Gambar 18.

Tabel 30 menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyediaan air di Kabupaten Bone Bolango dididominasi oleh jasa ekosistem kelas sedang yaitu sebesar 87.13% dari total wilayah Kabupaten Bone Bolango diikuti oleh jasa ekosistem kelas rendah yaitu sebesar 11.13% dari total wilayah Kabupaten Bone Bolango. Lahan yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi dalam menyediakan air memiliki luasan yang sangat kecil yaitu masing-masing seluas 36.44 Ha dan 771.67 Ha atau sebesar 0.02% dan 0.41% dari seluruh lahan di Kabupaten Bone Bolango. Lahan yang berpotensi sangat rendah dalam penyediaan air memiliki luas 2486.74 Ha atau sebesar 1.32%. Lahan yang memiliki potensi rendah dalam penyediaan air seluas 21002.44 Ha atau sebesar 11.13%. Berdasarkan analisis, seluruh kecamatan memiliki jasa ekosistem penyediaan air tinggi dan sangat tinggi <5% dari luas wilayahnya.

Tabel 27. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyediaan Air Kabupaten Bone Bolango

NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Bolango Utara	34.42	0.02%	705.03	0.37%	5,253.45	2.78%	6.03	0.00%	48.50	0.03%	6,047.43	3.20%
2	Bone	287.80	0.15%	1,759.30	0.93%	13,116.98	6.95%	-	0.00%	37.38	0.02%	15,201.46	8.05%
3	Bone Raya	-	0.00%	572.63	0.30%	5,949.24	3.15%	-	0.00%	8.05	0.00%	6,529.91	3.46%
4	Bonepantai	7.50	0.00%	3,162.34	1.68%	7,248.63	3.84%	-	0.00%	18.76	0.01%	10,437.23	5.53%
5	Botupingge	155.45	0.08%	524.74	0.28%	567.53	0.30%	9.36	0.00%	33.40	0.02%	1,290.48	0.68%
6	Bulango Selatan	194.97	0.10%	346.92	0.18%	16.86	0.01%	0.15	0.00%	2.57	0.00%	561.47	0.30%
7	Bulango Timur	284.18	0.15%	398.35	0.21%	508.70	0.27%	-	0.00%	-	0.00%	1,191.23	0.63%
8	Bulangoulu	-	0.00%	1,061.64	0.56%	36,194.24	19.17%	0.25	0.00%	50.19	0.03%	37,306.32	19.76%
9	Bulawa	-	0.00%	1,090.73	0.58%	7,688.96	4.07%	-	0.00%	2.42	0.00%	8,782.12	4.65%
10	Kabila	256.88	0.14%	830.29	0.44%	138.03	0.07%	3.47	0.00%	34.78	0.02%	1,263.45	0.67%
11	Kabila Bone	34.53	0.02%	2,412.51	1.28%	3,393.70	1.80%	-	0.00%	-	0.00%	5,840.73	3.09%
12	Pinogu	-	0.00%	103.64	0.05%	49,227.65	26.08%	10.08	0.01%	258.90	0.14%	49,600.27	26.28%
13	Suwawa	252.67	0.13%	1,032.84	0.55%	1,252.20	0.66%	6.34	0.00%	34.12	0.02%	2,578.18	1.37%
14	Suwawa Selatan	-	0.00%	1,992.52	1.06%	3,647.41	1.93%	-	0.00%	62.15	0.03%	5,702.08	3.02%
15	Suwawa Tengah	90.28	0.05%	1,081.56	0.57%	3,322.76	1.76%	-	0.00%	41.54	0.02%	4,536.14	2.40%
16	Suwawa Timur	-	0.00%	1,728.52	0.92%	24,749.15	13.11%	-	0.00%	134.88	0.07%	26,612.55	14.10%
17	Tapa	117.99	0.06%	463.31	0.25%	758.49	0.40%	0.69	0.00%	3.04	0.00%	1,343.51	0.71%
18	Tilongkabila	770.08	0.41%	1,735.57	0.92%	1,435.44	0.76%	0.07	0.00%	0.97	0.00%	3,942.12	2.09%
TOTAL		**2,486.74**	**1.32%**	**21,002.44**	**11.13%**	**164,469.41**	**87.13%**	**36.44**	**0.02%**	**771.67**	**0.41%**	**188,766.70**	**100%**

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bone Bolango, (2020)

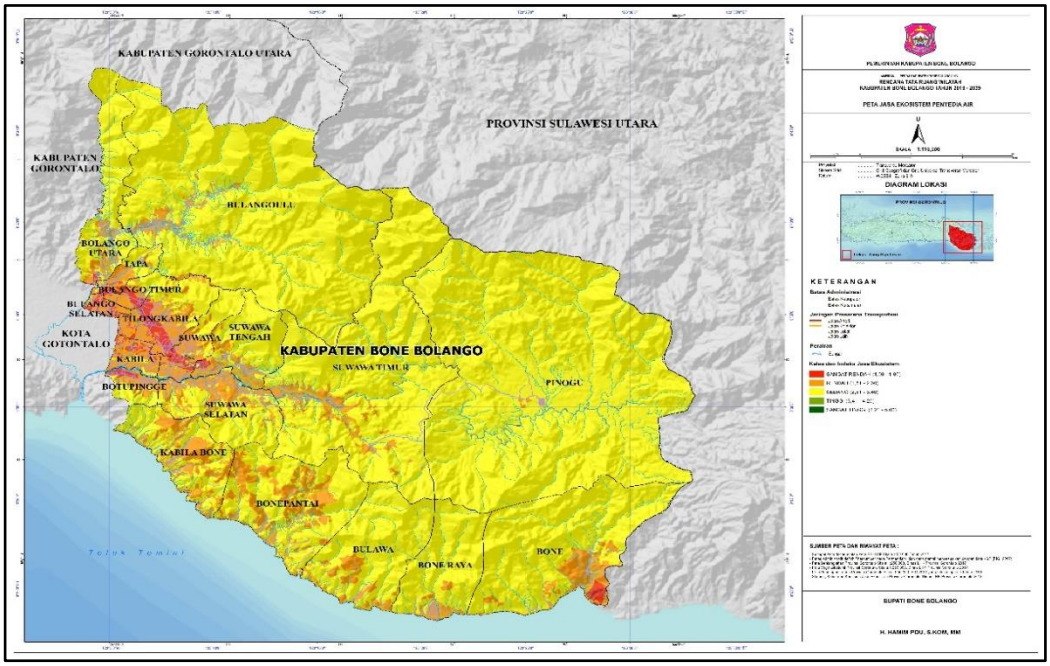

Gambar 18. Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kabupaten Bone Bolango

c. Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terhadap bencana alam. Hal tersebut dikarenakan Indonesia terletak diantara pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, Indonesia juga diapit oleh dua samudera besar yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta Indonesia dilewati jalur *ring of fire* pasifik. Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo juga rawan terhadap beberapa jenis bencana alam yaitu banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Kondisi tersebut disebabkan oleh letak geografis, kondisi fisik lahan, dan pengaruh manusia dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan.

Ekosistem memberikan manfaat pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana alam. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Manfaat ekosistem dalam pengaturan pencegahan bencana alam berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuklahan. Tempat-tempat yang memiliki tutupan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami.

Bentuk lahan secara spesifik juga berpengaruh terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Jasa

ekosistem pengaturan pencegahan bencana alam di suatu wilayah diklasifikasikan menjadi lima kelas yaitu kelas jasa pengaturan pencegahan bencana alam sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Wilayah dengan kelas jasa pengaturan pencegahan bencana alam sangat tinggi memiliki daya dukung pencegahan terhadap bencana alam yang baik. Distribusi kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan bencana alam longsor di Kabupaten Bone Bolango ditampilkan pada Tabel 31 dan Gambar 19.

Tabel 28. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor Kabupaten Bone Bolango

NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Bolango Utara	-	0.00%	151.49	0.08%	1,238.06	0.66%	4,603.35	2.44%	54.53	0.03%	6,047.43	3.20%
2	Bone	-	0.00%	130.92	0.07%	4,717.67	2.50%	10,315.49	5.46%	37.38	0.02%	15,201.46	8.05%
3	Bone Raya	-	0.00%	97.17	0.05%	2,372.22	1.26%	4,052.48	2.15%	8.05	0.00%	6,529.91	3.46%
4	Bonepantai	-	0.00%	157.83	0.08%	5,439.38	2.88%	4,821.26	2.55%	18.76	0.01%	10,437.23	5.53%
5	Botupingge	-	0.00%	118.70	0.06%	611.17	0.32%	517.84	0.27%	42.77	0.02%	1,290.48	0.68%
6	Bulango Selatan	-	0.00%	504.44	0.27%	54.31	0.03%	-	0.00%	2.72	0.00%	561.47	0.30%
7	Bulango Timur	-	0.00%	493.57	0.26%	376.05	0.20%	303.74	0.16%	17.87	0.01%	1,191.23	0.63%
8	Bulangoulu	-	0.00%	51.21	0.03%	3,423.42	1.81%	33,781.51	17.90%	50.19	0.03%	37,306.32	19.76%
9	Bulawa	-	0.00%	113.13	0.06%	4,321.65	2.29%	4,344.92	2.30%	2.42	0.00%	8,782.12	4.65%
10	Kabila	-	0.00%	929.36	0.49%	295.85	0.16%	-	0.00%	38.25	0.02%	1,263.45	0.67%
11	Kabila Bone	-	0.00%	193.75	0.10%	3,983.74	2.11%	1,663.24	0.88%	-	0.00%	5,840.73	3.09%
12	Pinogu	-	0.00%	60.34	0.03%	1,542.41	0.82%	36,784.32	19.49%	11,213.20	5.94%	49,600.27	26.28%
13	Suwawa	-	0.00%	544.32	0.29%	835.72	0.44%	1,118.80	0.59%	79.34	0.04%	2,578.18	1.37%
14	Suwawa Selatan	-	0.00%	107.30	0.06%	2,819.42	1.49%	2,486.28	1.32%	289.08	0.15%	5,702.08	3.02%
15	Suwawa Tengah	-	0.00%	223.91	0.12%	1,457.10	0.77%	2,673.10	1.42%	182.03	0.10%	4,536.14	2.40%
16	Suwawa Timur	-	0.00%	159.82	0.08%	3,137.59	1.66%	20,587.52	10.91%	2,727.61	1.44%	26,612.55	14.10%
17	Tapa	-	0.00%	229.70	0.12%	806.38	0.43%	303.71	0.16%	3.73	0.00%	1,343.51	0.71%
18	Tilongkabila	-	0.00%	1,512.41	0.80%	1,070.46	0.57%	1,342.00	0.71%	17.26	0.01%	3,942.12	2.09%
TOTAL		**-**	**0.00%**	**5,779.34**	**3.06%**	**38,502.60**	**20.40%**	**129,699.56**	**68.71%**	**14,785.20**	**7.83%**	**188,766.70**	**100%**

Tabel 31 menunjukkan bahwa jasa ekosistem pengaturan pencegahan bencana longsor di Kabupaten Bone Bolango didominasi oleh kelas tinggi yaitu seluas 68.71% dari total keseluruhan wilayah Kabupaten Bone Bolango, wilayah dengan kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan bencana longsor sangat tinggi seluas 14785.20 Hektar atau seluas 7.83% dari seluruh wilayah. Wilayah dengan kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan bencana longsor sedang seluas 38502.60 Hektar atau seluas 20.40% dari seluruh wilayah. Analisis secara rinci berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa terdapat dua kecamatan yang memiliki wilayah dengan kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan bencana longsor tinggi dan sangat tinggi seluas >90% dari wilayahnya yaitu Kecamatan Bulangoulu seluas 90.69% dan Kecamatan Pinogu seluas 96.77%. Peta daya dukung lingkungan hidup jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana longsor Kabupaten Bone Bolango ditunjukkan pada Gambar 4. Gambar 4 menggambarkan bahwa Kabupaten Bone Bolango didominasi oleh jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana longsor kelas tinggi, kemudian diikuti oleh jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana longsor kelas sedang.

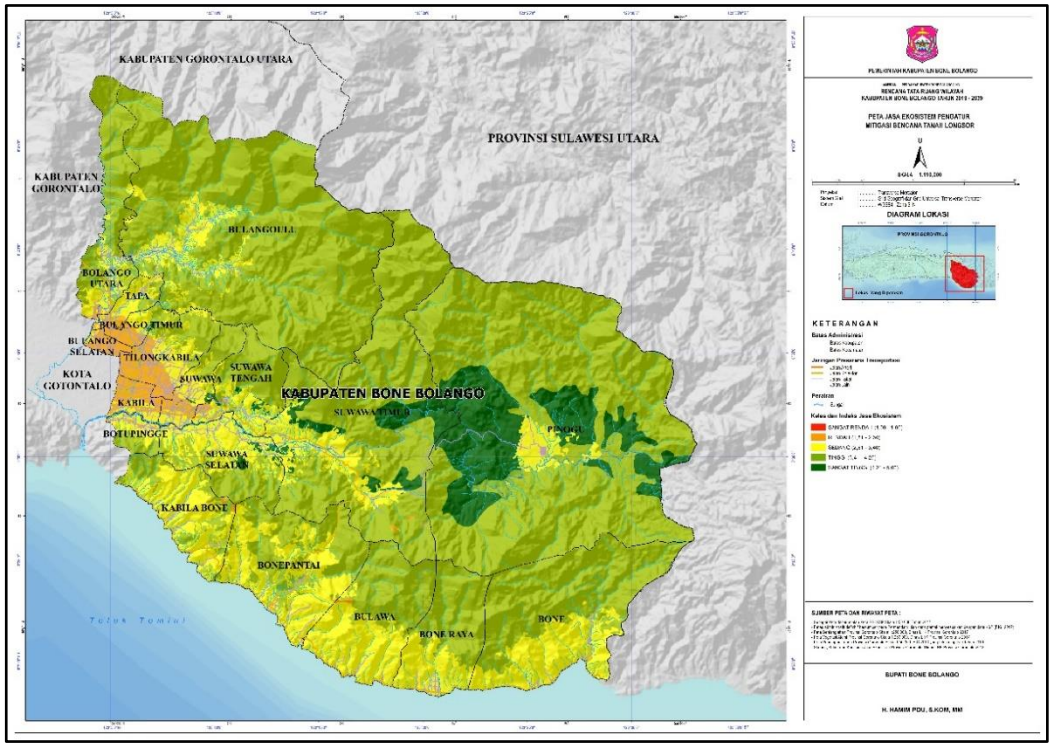

Gambar 19. Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bone Bolango

d. Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir

Banjir merupakan salah satu jenis bencana hidrometeorologis yaitu bencana yang diakibatkan oleh faktor-faktor meteorologis seperti hujan, angin, suhu udara dan kelembaban udara. UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan definisi banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Bencana banjir selain diakibatkan oleh faktor meteorologis yang ekstrim, juga diyakini disebabkan oleh menurunnya daya dukung lingkungan.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering terjadi dan jenis bencana yang paling merata distribusinya di seluruh provinsi di Indonesia. Ekosistem mempunyai mekanisme alami dalam pengaturan pencegahan bencana banjir yang disebut jasa ekosistem pencegahan bencana banjir. Hasil perhitungan kinerja jasa ekosistem pengaturan pencegahan bencana alam banjir di Kabupaten Bone Bolango disajikan pada Tabel 32 dan Gambar 20.

Tabel 29. Distribusi dan Luas Kelas Jasa Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Bone Bolango

NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Bolango Utara	50.51	0.03%	887.77	0.47%	451.27	0.24%	52.53	0.03%	4,605.36	2.44%	6,047.43	3.20%
2	Bone	-	0.00%	3,277.86	1.74%	1,570.73	0.83%	13.91	0.01%	10,338.97	5.48%	15,201.46	8.05%
3	Bone Raya	-	0.00%	2,095.89	1.11%	373.49	0.20%	7.04	0.00%	4,053.48	2.15%	6,529.91	3.46%
4	Bonepantai	-	0.00%	5,331.47	2.82%	265.73	0.14%	6.54	0.00%	4,833.49	2.56%	10,437.23	5.53%
5	Botupingge	-	0.00%	362.91	0.19%	366.97	0.19%	42.77	0.02%	517.84	0.27%	1,290.48	0.68%
6	Bulango Selatan	434.07	0.23%	124.69	0.07%	-	0.00%	2.72	0.00%	-	0.00%	561.47	0.30%
7	Bulango Timur	306.94	0.16%	413.89	0.22%	148.79	0.08%	-	0.00%	321.61	0.17%	1,191.23	0.63%
8	Bulangoulu	-	0.00%	2,788.56	1.48%	686.32	0.36%	40.93	0.02%	33,790.51	17.90%	37,306.32	19.76%
9	Bulawa	-	0.00%	4,169.29	2.21%	265.49	0.14%	-	0.00%	4,347.34	2.30%	8,782.12	4.65%
10	Kabila	610.07	0.32%	538.95	0.29%	76.18	0.04%	38.25	0.02%	-	0.00%	1,263.45	0.67%
11	Kabila Bone	-	0.00%	4,116.74	2.18%	60.75	0.03%	-	0.00%	1,663.24	0.88%	5,840.73	3.09%
12	Pinogu	-	0.00%	1,566.00	0.83%	36.75	0.02%	478.58	0.25%	47,518.94	25.17%	49,600.27	26.28%
13	Suwawa	198.27	0.11%	735.67	0.39%	446.10	0.24%	40.49	0.02%	1,157.64	0.61%	2,578.18	1.37%
14	Suwawa Selatan	-	0.00%	1,857.69	0.98%	1,069.03	0.57%	33.69	0.02%	2,741.67	1.45%	5,702.08	3.02%
15	Suwawa Tengah	17.00	0.01%	1,371.08	0.73%	292.93	0.16%	24.21	0.01%	2,830.92	1.50%	4,536.14	2.40%
16	Suwawa Timur	-	0.00%	2,894.06	1.53%	403.36	0.21%	9.53	0.01%	23,305.60	12.35%	26,612.55	14.10%
17	Tapa	96.79	0.05%	756.98	0.40%	182.30	0.10%	3.73	0.00%	303.71	0.16%	1,343.51	0.71%
18	Tilongkabila	945.52	0.50%	1,100.13	0.58%	537.21	0.28%	2.66	0.00%	1,356.60	0.72%	3,942.12	2.09%
TOTAL		**2,659.17**	**1.41%**	**34,389.64**	**18.22%**	**7,233.39**	**3.83%**	**797.58**	**0.42%**	**143,686.92**	**76.12%**	**188,766.70**	**100%**

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bone Bolango, (2020)

Tabel 32 menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango didominasi jasa lingkungan pengaturan perlindungan banjir sangat tinggi yaitu 76.12% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Bone Bolango. Wilayah yang memiliki jasa lingkungan rendah merupakan wilayah dengan penutup lahan berupa pemukiman dan tempat kegiatan, lahan terbuka, kebun campuran, pemakaman, sawah, semak belukar, dan tegalan. Sedangkan wilayah yang memiliki jasa lingkungan sangat tinggi yaitu danau/situ dan sungai.

Analisis secara rinci berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa terdapat lima kecamatan yang memiliki wilayah dengan kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan bencana banjir sangat rendah dan rendah seluas >50% dari wilayahnya yaitu Kecamatan Bone Pantai seluas 51.08%, Kecamatan Bulango Selatan sebesar 99.52%, Kecamatan Bulango Timur seluas 60.51%, Kecamatan Kabila seluas 90.94%, Kecamatan Kabila Bone 70.48%, Kecamatan Tapa 63.55% dan Kecamatan Tilongkabila sebesar 51.89%. Peta daya dukung lingkungan hidup jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana banjir Kabupaten Bone Bolango ditunjukkan pada Gambar 5. Gambar 5 menggambarkan bahwa Kabupaten Bone Bolango didominasi oleh jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana banjir kelas sangat tinggi kemudian diikuti oleh jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana banjir kelas rendah.

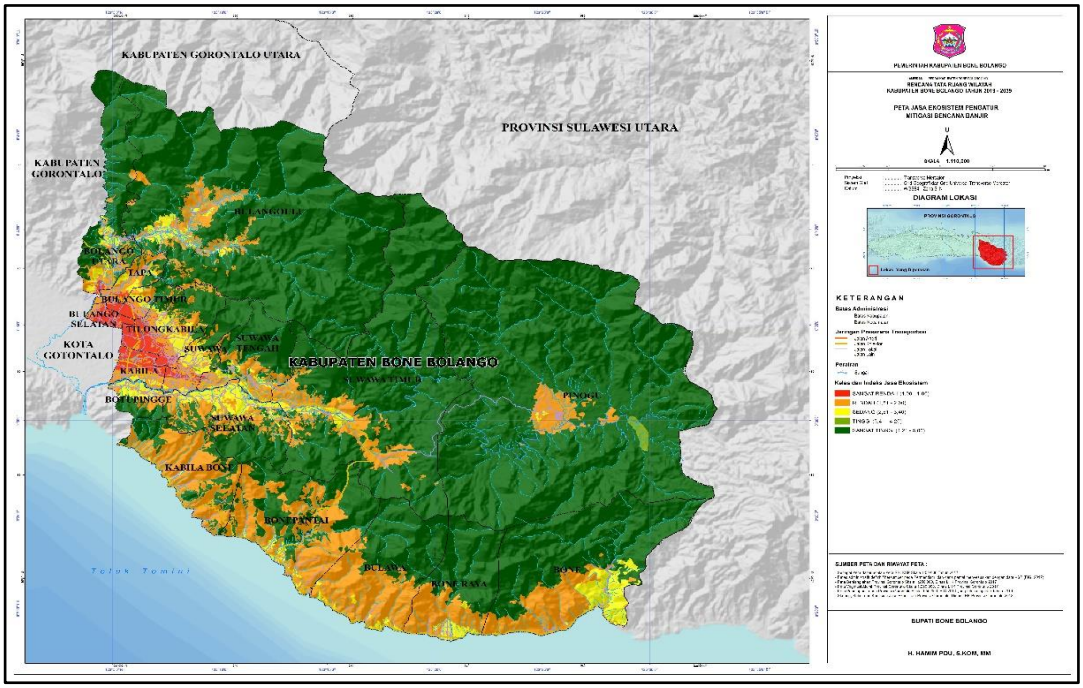

Gambar 20. Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Bone Bolango

3.3.2 Status Daya Dukung Lingkungan Hidup

a. Status Daya Dukung Pangan

Analisis daya dukung pangan Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan menghitung selisih antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan. Data ketersediaan pangan digunakan yang digunakan dalam kajian ini adalah data produksi bahan pangan atau Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019. Jenis bahan pangan yang beragam disamakan dengan mengonversikan data produksi yang memiliki satuan berat (gram) menjadi satuan energi (kkal) untuk mendapatkan nilai energi bahan pangan. Pendistribusian ketersediaan energi bahan pangan dalam sistem grid, dilakukan dengan membandingkan total energi bahan pangan Kabupaten Bone Bolango. Analisis kebutuhan pangan dilakukan dengan menghitung kebutuhan penduduk pada setiap grid. Kebutuhan penduduk pada setiap grid dihitung berdasarkan distribusi jumlah penduduk pada setiap grid.

Hasi perhitungan status daya dukung pangan Kabupaten Bone Bolango bertujuan untuk mengetahui apakah daya dukung pangan terlampaui atau belum terlampaui. Hasil perhitungan status daya dukung pangan juga bermanfaat untuk mengetahui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan pangannya secara alamiah oleh karakteristik wilayah Kabupaten Bone Bolango. Status daya dukung pangan indikatif Kabupaten Bone Bolango ditunjukkan Pada Tabel 33.

Tabel 30. Status Daya Dukung Pangan Indikatif Kabupaten Bone Bolango

NO	KECAMATAN	KETERSEDIAAN PANGAN	KEBUTUHAN PANGAN	SELISIH	AMBANG BATAS PENDUDUK	SELISIH AMBANG BATAS	KETERANGAN
		(Kkal/Tahun)	(Kkal/Tahun)	(Kkal/Tahun)	(Jiwa)	(Jiwa)	
1	BOLANGO UTARA	7,855,528,265	6,420,824,500	1,434,703,765	10,042	1,860	BELUM TERLAMPAUI
2	BONE	18,360,268,663	7,821,603,250	10,538,665,413	23,289	13,322	BELUM TERLAMPAUI
3	BONE RAYA	8,174,447,014	5,598,406,500	2,576,040,514	10,377	3,243	BELUM TERLAMPAUI
4	BONEPANTAI	12,950,000,856	8,711,509,750	4,238,491,106	16,428	5,327	BELUM TERLAMPAUI
5	BOTUPINGGE	1,827,869,269	5,322,174,500	-3,494,305,231	2,322	-4,460	TERLAMPAUI
6	BULANGO SELATAN	873,327,652	8,761,733,750	-7,888,406,098	1,113	-10,052	TERLAMPAUI
7	BULANGO TIMUR	1,712,482,365	4,577,446,750	-2,864,964,385	2,184	-3,649	TERLAMPAUI
8	BULANGOULU	40,465,206,353	3,332,048,500	37,133,157,853	51,738	47,492	BELUM TERLAMPAUI
9	BULAWA	10,909,347,656	4,422,851,000	6,486,496,656	13,837	8,201	BELUM TERLAMPAUI
10	KABILA	1,776,385,927	18,608,776,750	-16,832,390,823	2,263	-21,450	TERLAMPAUI
11	KABILA BONE	7,250,467,721	9,092,898,250	-1,842,430,529	9,218	-2,369	TERLAMPAUI
12	PINOGU	55,113,289,220	1,644,836,000	53468453219.75	70,152	68,056	BELUM TERLAMPAUI
13	SUWAWA	3,561,309,749	10,361,054,250	-6,799,744,501	4,531	-8,672	TERLAMPAUI
14	SUWAWA SELATAN	7,493,876,533	4,436,191,750	3,057,684,783	9,522	3,869	BELUM TERLAMPAUI
15	SUWAWA TENGAH	5,693,965,850	5,019,261,000	674,704,850	7,259	863	BELUM TERLAMPAUI
16	SUWAWA TIMUR	31,201,684,071	4,337,313,250	26,864,370,821	39,819	34,292	BELUM TERLAMPAUI
17	TAPA	1,775,580,949	6,076,319,250	-4,300,738,301	2,283	-5,460	TERLAMPAUI
18	TILONGKABILA	4,952,759,192	15,160,585,250	-10,207,826,058	6,305	-13,014	TERLAMPAUI
TOTAL		221,947,797,306	129,705,834,250	92,241,963,056	282,682	117,399	BELUM TERLAMPAUI

Sumber : hasil analisis tim, 2020.

Berdasarkan Tabel 33 dapat diketahui bahwa terdapat sepuluh kecamatan yang daya dukung pangannya belum melampaui dan terdapat delapan kecamatan yang daya dukung pangannya telah terlampaui. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang daya dukung pangannya telah terlampaui yaitu Kecamatan Botupingge, Kecamatan Bulango Selatan, Kecamatan Bulango Timur, Kecamatan Kabila, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Tapa dan Kecamatan Tilongkabila. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang daya dukung pangannya belum melampui meliputi Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bone, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bone Pantai, Kecamatan Bulangoulu, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Pinogu, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Tengah, dan Kecamatan Suwawa Timur.

Tabel 33 menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan bahan pangan secara alamiah Kabupaten Bone Bolango sebesar 221,947,797,306 Kkal/Tahun an jumlah kebutuhan pangan Kabupaten Bone Bolango sebesar 129,705,834,250 Kkal/tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan pangannya secara alamiah oleh Kabupaten Bone Bolango adalah adalah 282,692 jiwa. Sehingga masih terdapat selisih ambang batas sejumlah 117,399 jiwa yang

dapat dicukupi kebutuhan pangan secara alamiah di Kabupaten Bone Bolango. Dengan demikian, daya dukung daya tampung penyediaan pangan bagi penduduk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2019 **Belum Terlampaui**.

Peta status daya dukung pangan indikatif Kabupaten Bone Bolango ditunjukkan pada Gambar 21. Gambar 21 menggambarkan bahwa Kabupaten Bone Bolango didominasi oleh status daya dukung pangan indikatif yang belum melampuai. Wilayah yang telah terlampaui status daya dukung pangannya umumnya berada di kawasan yang padat penduduknya dan kawasan pesisir pantai.

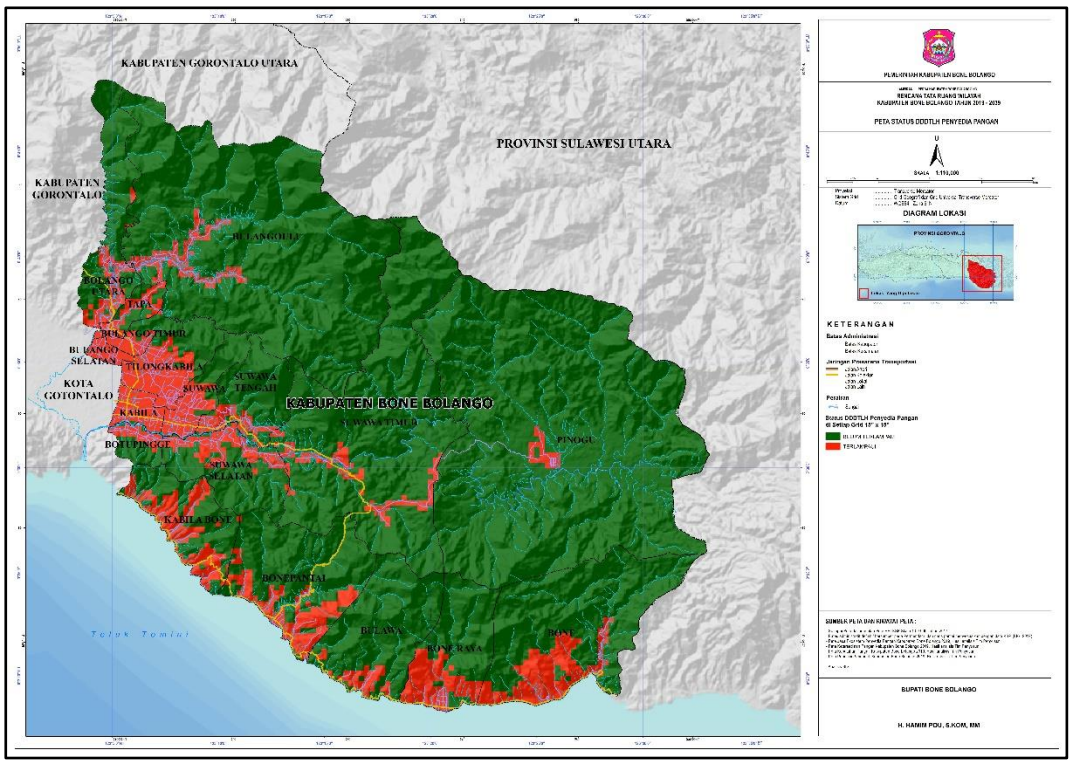

Gambar 21. Peta Status Daya Dukung Pangan Indikatif Kabupaten Bone Bolango

b. **Status Daya Dukung Air**

Analisis daya dukung air Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan menghitung selisih antara ketersediaan air dengan kebutuhan air untuk lahan dan domestik penduduk. Data ketersediaan air menggunakan potensi ketersediaan material air permukaan dan air tanah yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Perhitungan daya dukung air bertujuan untuk menganalisis apakah status daya dukung daya air di Kabupaten Bone Bolango apakah terlampaui atau atau belum terlampaui. Kajian ini juga dapat memberikan gambaran secara spasial wilayah-wilayah yang daya dukung airnya telah melampaui. Analisis status daya dukung penyediaan air juga dilakukan untuk

mengetahui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan airnya secara alamiah di Kabupaten Bone Bolango.

Hasil analisis status daya dukung air indikatif Kabupaten Bone Bolango disajikan pada Tabel 34. Berdasarkan Tabel 34 tersebut dapat dilihat bahwa jika dirinci berdasar ketersediaan dan kebutuhan air dengan skala kecamatan maka hanya terdapat dua kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki status daya dukung air terlampaui yaitu Kecamatan Bulango Selatan dan Kecamatan Kabila.

Tabel 31. Status Daya Dukung Air Indikatif Kabupaten Bone Bolango

NO	KECAMATAN	KETERSEDIAAN AIR	KEBUTUHAN AIR UNTUK LAHAN	KEBUTUHAN AIR UNTUK DOMESTIK	KEBUTUHAN AIR TOTAL	SELISIH	AMBANG BATAS PENDUDUK	SELISIH AMBANG BATAS	KETERANGAN
		(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(m3/Tahun)	(Jiwa)	(Jiwa)	
1	BOLANGO UTARA	136,735,103	6,743,321	13,091,200	19,834,521	116,900,582	81,252	73,070	BELUM TERLAMPAUI
2	BONE	287,691,348	26,736,858	15,947,200	42,684,058	245,007,290	163,151	153,184	BELUM TERLAMPAUI
3	BONE RAYA	130,621,783	12,857,721	11,414,400	24,272,121	106,349,663	73,632	66,498	BELUM TERLAMPAUI
4	BONEPANTAI	199,899,725	14,649,813	17,761,600	32,411,413	167,488,312	115,783	104,682	BELUM TERLAMPAUI
5	BOTUPINGGE	27,390,288	3,520,252	10,851,200	14,371,452	13,018,836	14,921	8,139	BELUM TERLAMPAUI
6	BULANGO SELATAN	10,468,957	7,038,957	17,864,000	24,902,957	-14433999.55	2,144	-9021	TERLAMPAUI
7	BULANGO TIMUR	24,352,082	6,939,834	9,332,800	16,272,634	8,079,447	10,884	5,051	BELUM TERLAMPAUI
8	BULANGOULU	714,446,847	12,308,117	6,793,600	19,101,717	695,345,130	438,937	434,691	BELUM TERLAMPAUI
9	BULAWA	171,993,241	19,399,960	9,017,600	28,417,560	143,575,681	95,396	89,760	BELUM TERLAMPAUI
10	KABILA	23,138,239	13,476,681	37,940,800	51,417,481	-28279242.38	6,039	-17674	TERLAMPAUI
11	KABILA BONE	110,464,123	9,443,023	18,539,200	27,982,223	82,481,900	63,133	51,546	BELUM TERLAMPAUI
12	PINOGU	958,432,438	9,722,448	3,353,600	13,076,048	945,356,390	593,053	590,957	BELUM TERLAMPAUI
13	SUWAWA	52,486,941	8,895,306	21,124,800	30,020,106	22,466,835	27,249	14,046	BELUM TERLAMPAUI
14	SUWAWA SELATAN	113,562,902	13,627,781	9,044,800	22,672,581	90,890,320	62,469	56,816	BELUM TERLAMPAUI
15	SUWAWA TENGAH	91,005,606	6,978,537	10,233,600	17,212,137	73,793,469	52,527	46,131	BELUM TERLAMPAUI
16	SUWAWA TIMUR	535,106,185	9,639,333	8,843,200	18,482,533	516,623,652	328,458	322,931	BELUM TERLAMPAUI
17	TAPA	28,332,729	4,319,317	12,388,800	16,708,117	11,624,612	15,008	7,265	BELUM TERLAMPAUI
18	TILONGKABILA	66,960,903	22,322,586	30,910,400	53,232,986	13,727,916	27,905	8,586	BELUM TERLAMPAUI
TOTAL		3,683,089,440	208,619,846	264,452,800	473,072,646	3,210,016,794	2,171,941	2,006,658	BELUM TERLAMPAUI

Jika dilihat secara umum pada skala Kabupaten, Tabel 34 menjelaskan jumlah ketersediaan air secara alamiah Kabupaten Bone Bolango sebesar 3,683,089,440 m^3/tahun dan jumlah kebutuhan air untuk lahan Kabupaten Bone Bolango sebesar 208,619,846 m^3/tahun dan jumlah kebutuhan air untuk domestik Kabupaten Bone Bolango sebesar 264,452,800 m^3/tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan pangannya secara alamiah oleh Kabupaten Bone Bolango adalah adalah 2,171,941 jiwa. Sehingga masih terdapat selisih ambang batas sejumlah 2,006,658 jiwa yang dapat dicukupi kebutuhan air secara alamiah di Kabupaten Bone Bolango.

Peta status daya dukung air indikatif Kabupaten Bone Bolango ditunjukkan pada Gambar 22. Gambar 22 menunjukkan sebaran spasial wilayah-wilayah yang belum terlampaui dan telah terlampaui daya dukung airnya. Wilayah yang belum terlampaui daya dukung airnya digambarkan dengan simbol warna hijau sedangkan wilayah yang telah terlampaui daya dukung airnya digambarkan dengan simbol warna merah. Berdasarkan

Gambar 22, daya dukung daya tampung penyediaan air bagi penduduk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2019 **Belum Terlampaui**.

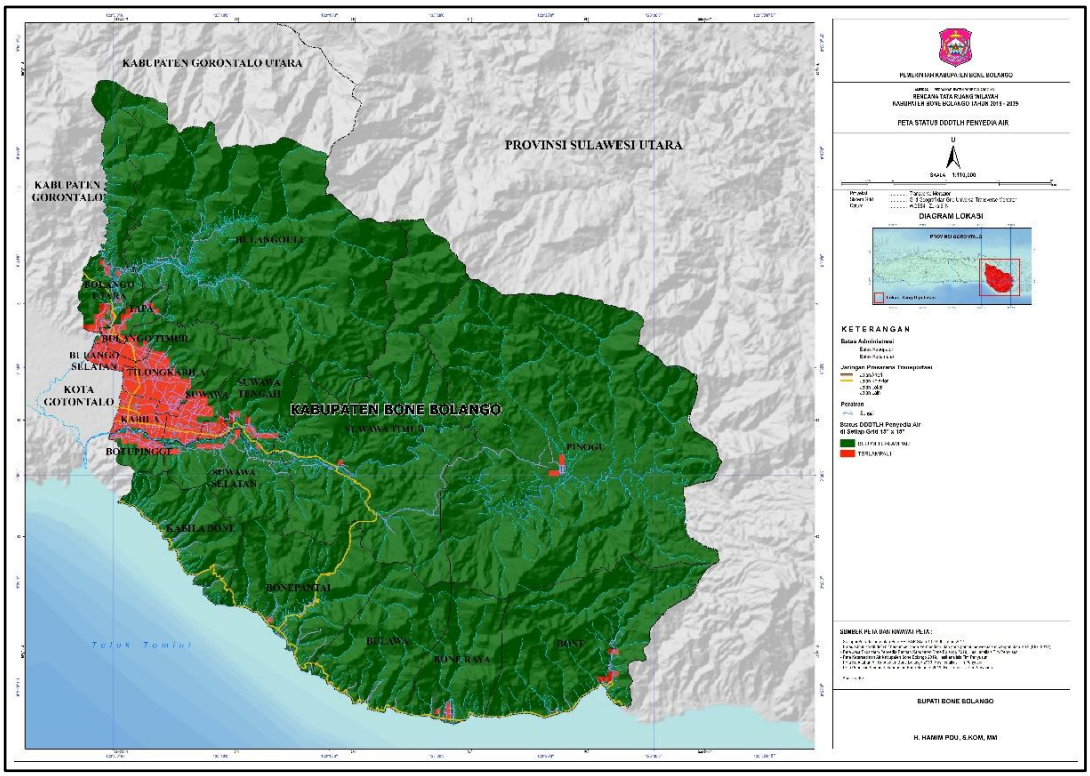

Gambar 22. Peta Status Daya Dukung Air Indikatif Kabupaten Bone Bolango

Hasil analisis D3TLH jasa ekosistem menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango belum mempunyai masalah dengan distribusi jasa ekosistem. Hal ini terjadi karena 70% wilayah administrasi Kabupaten Bone bolango merupakan kawasan konservasi. Secara fungsi kawasan konservasi merupakan wilayah yang menyediakan jasa lingkungan dan merupakan sistem penyanggah kehidupan

Hasil analisis D3TLH status daya dukung Air dan daya dukung Pangan, pada umumnya belum terlampaui, kondisi ini bisa dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Bone Bolango masih membuka ruang untuk investasi untuk mendukung prikehidupan manusia, mahluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya.

3.4 Sumber Daya Alam

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang kaya akan sumber daya alam. Potensi Pertambangan di Kabupaten Bone Bolango ini adalah pertambangan:

- Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri).
- Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri.

Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang **belum** dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur; Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone; dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan.

Potensi Energi yang **sudah** dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit). (Dinas PM-ESDM Transmigrasi, 2017).

3.5 Perubahan Iklim

Perubahan iklim saat ini telah menjadi salah satu tema penting dalam pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Hal ini wajar karena perubahan iklim mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan iklim diyakini sebagai akibat dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di permukaan bumi sehingga menimbulkan pemanasan global yang pada gilirannya membuat perilaku iklim berubah dari keadaan normalnya. Laporan Fourth Assessment of IPCC (2007) juga menyebutkan kenaikan konsentrasi gas rumah kaca sebesar 70% dari tahun 1974 - 2005. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa sektor kehutanan dunia dianggap memegang peran yang cukup signifikan dalam emisi gas karbon dioksida karena menyumbang tidak kurang dari 17,4 % dari total emisi di muka bumi ini.

Data dari INCAS (*Indonesia National Carbon Accounting System*) menunjukkan bahwa emisi tahunan gas CO_2 (t CO_2-eq) dari hutan di Gorontalo berfluktuasi. Tahun 2001 : 5.796.092; Tahun 2002 : 10.710.978; Tahun 2003 : 8.264.095; Tahun 2004 : 5.101.274; Tahun 2005 : 5.171.581; Tahun 2006 : 5.680.260; Tahun 2007 : 3.981.916; Tahun 2008 : 3.743.379;

Tahun 2009 : 3.551.443; Tahun 2010 : 2.269.100; Tahun 2011 : 1.937.220; Tahun 2012 : 1.898.703 (Sumber : Indonesia National Carbon Acounting System, 2015)

3.6 Keanekaragaman Hayati

Makna keanekaragaman hayati menurut *Convention on Biological Diversity* PBB tahun 1992 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologik tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya, meliputi keanekaragaman jenis, antar jenis dan ekosistem. Keanekaragaman hayati ialah fungsi-fungsi ekologi atau layanan alam, berupa layanan yang dihasilkan oleh satu spesies dan/atau ekosistem (ruang hidup) yang memberi manfaat kepada spesies lain termasuk manusia.

Provinsi Gorontalo memiliki 16 flora khas yaitu: (1) Gadung (*Bitule, Ondote*), *Dioscorea Hispida Dennts*, dari famili *Dioscoreaceae*, tanaman ini dapat dimakan umbinya, (2) nam nam, *Namu namu*, *Cynometra Cauliflora L.* famili *Caesalpiniaceae*, ordo *Rosales*; (3) Belimbing Buluh, B. botol, *Averrhoa Bilimbi L*, famili *Oxalidaceae*; (4) Mangga embacang, Dulamayo, *Mangifera Caesia* Jack ex Wall, famili Anacardiaciae; (5) Kapulasan, Bolangaso, *Nephelium Ramboutanake* (labill) (*Nephelium Mutabile BI*), (Atinggola), famili Sapindaceae, (6) Durian, Duea, *Durio Zibethinus Murr*, famili *Bombacaceae*; (7) Rukem, Lobe-lobe; *Flacourtia inermis Roxb*, famili *Flacourtiaceae*; (8) Molahengo, *Eugenia Densiflora Duthie*, famili *Myrtaceae*; (9) Buni, Takuti, *Antidesma Bunius Spreng*, famili *Euphorbiaceae*; (10) Pisang Tanduk, *Musa Paradisiaca*, famili *Musaceae*; (11) Srikaya, *Annona Squamosa* L. famili *Annonaceae*; (12) Aren, Pohon saguer, Seho, Bagiso, *Arenga Pinnata (Wurmb) Merr*, famili *Arecaceae*; (13) Ceremai, Tili, Cerme, *Phyllanthus Acidus* (L.) Skeels, famili *Euphorbiaceae*; (14) Jagung, Binte, *Zea Mays L.* (15) Padi ladang, *Oryza Sativa L.* famili *Poaceae*; (16) Sukun, Amu, *Artocarpus altilis* famili *Moraceae* (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, 2019).

Kabupaten Bone Bolango memilki Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) merupakan Taman Nasional yang terletak di Semenanjung Minahasa, diantara Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki potensi flora yang beraneka raga yang didominasi oleh kelompok (genus) ficus. Beberapa jenis flora yang dapat anda temui di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi antara lain: nantu (*Palaqium obtusifolium*), kayu hitam (*Diospyros* spp), kayu besi (*Metrosiderus vera*), kayu inggris (*Eucalyptus deglupta*), cempaka (*Elmerrillia ovalis*) dan metayangan (*Pholydacarpus*

ihur). Selain ini di TNBW anda masih dapat menemukan berbagai flora lain seperti paku-pakuan, palem, rotan, hanjuang hijau dan bunga bangkai.

Sebagian besar satwa yang ada di taman nasional merupakan satwa khas/endemik pulau Sulawesi seperti monyet hitam/yaki (*Macaca nigra nigra*), monyet dumoga bone (*M. nigrescens*), tangkasi (*Tarsius spectrum spectrum*), musang Sulawesi (*Macrogalidia musschenbroekii musschenbroekii*), anoa besar (*Bubalus depressicornis*), anoa kecil (*B. quarlesi*), babirusa (*Babyrousa babirussa celebensis*), dan berbagai jenis burung. Satwa burung yang menjadi maskot taman nasional adalah maleo (*Macrocephalon maleo*), dan kelelewar bone (*Bonea bidens*) merupakan satwa endemik taman nasional (Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, 2017).

3.7 Kondisi Pencapaian TPB di Kabupaten Bone Bolango

Tahap evaluasi dilakukan melalui evaluasi terhadap pencapaian TPB dalam periode Tahun 2017 hingga Tahun 2019. Sebagai acuan pencapaian adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah 220 indikator. Kategori pencapaian TPB dibagi atas 4 (empat) kategori yaitu :

- Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional (SS)
- Indiaktor yang sudah dilakanakan tapi belum mencapai target nasional (SP)
- Indikator yang belum dilaksanakan (SB)
- Indiaktor yang belum ada data (NA)

Hasil evaluasi pencapaian TPB di Kabupaten Bone Bolango diperoleh 82 indikator (37,27%) indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator yang telah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional berjumlah 52 indikator (23,62%). Indikator yang belum dilaksanakan berjumlah 22 indikator (10%). Indikator yang belum ada data sejumlah 64 indikator (29,09%).

Grafik persentase hasil evaluasi pencapaian TPB ditunjukkan pada Gambar 23.

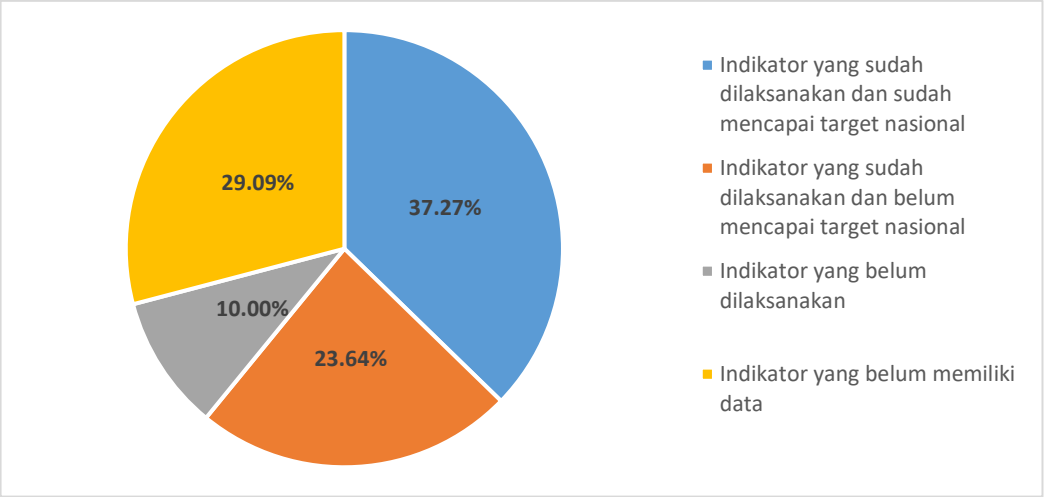

Gambar 23. Grafik persentase hasil evaluasi pencapaian TPB

3.8 Kondisi Keuangan Daerah

3.8.1 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Bone Bolango tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 17. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%), di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 – 2019 disajikan pada Tabel 35.

Tabel 32. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar) di Kabupaten Bone Bolango, Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	853.57	912.55	981.14	1039.90	1094.66
Pertambangan dan Penggalian	45.67	44.73	44.72	45.18	47.78
Industri Pengolahan	147.16	157.73	168.70	179.76	199.65
Pengadaan Listrik dan Gas	0.99	1.08	1.17	1.25	1.36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.66	0.75	0.86	0.98	1.13
Konstruksi	271.82	293.72	325.25	326.42	351.23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	294.67	322.13	359.03	399.27	451.51
Transportasi dan Pergudangan	28.93	30.98	32.29	34.00	35.84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.16	29.80	32.54	35.37	37.61
Informasi dan Komunikasi	49.04	53.84	59.53	65.28	70.36
Jasa Keuangan dan Asuransi	48.42	57.69	63.52	65.33	63.75
Real Estat	62.62	68.25	72.47	76.49	83.61
Jasa Perusahaan	3.16	3.35	3.59	3.78	4.01

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	309.52	309.56	310.14	315.90	324.23
Jasa Pendidikan	118.46	124.71	129.79	141.17	154.15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.56	135.17	143.82	156.94	172.40
Jasa Lainnya	53.51	55.27	57.09	59.01	61.63
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**2439.92**	**2601.32**	**2785.64**	**2966.02**	**3154.92**

Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango, 2020

Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB dibagi menjadi 17 lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (Miliar) Kabupaten Bone Bolango tahun 2015 sebesar 2439.92, tahun 2016 sebesar 2601.32, tahun 2017 sebesar 6,62, tahun 2017 sebesar 2785.64, tahun 2018 sebesar 2966.02 dan Tahun 2019 sebesar 3154.92.

Tabel 33. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%), di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 – 2019

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2019	6.37
2018	6.48
2017	7.09
2016	6.62
2015	6.51

Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango, 2020

Tabel 36 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha di Kabupaten Bone Bolango mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2015 sebesar 6.51%, tahun 2016 6.62%, tahun 2017 7.09%, kemudian menurun pada tahun 2018 yaitu sebesar 6.48% dan menurun Kembali pada

tahun 2019 sebesar 6.51%. Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, menandakan bahwa terjadi perlambatan kegiatan produksi pada tahun 2019, dibandingkan dengan tahun 2018, serta terjadi perlambatan kegiatan produksi pada tahun 2018, dibandingkan dengan tahun 2017.

3.8.2 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan salah satu komponen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Peran APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta sebagai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan Perundang-Undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

APBD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan transfer.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

❖ Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal kinerja pemerintah daerah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapai.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dengan instrumen yang dapat mengukur pengelolaan APBD secara obyektif. Instrumen pengukur ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan mesin pemerintahan daerah. Secara umum kinerja APBD Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami pertumbuhan, dimana rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 2,53% dan belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,22%. Sementara itu pembiayaan secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 14,51%. Hal ini dapat dilihat pada pada tabel 37

Tabel 34. Rata-rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Bone Bolango

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**875.639.023.437,41**	**871.081.755.716,34**	**975.640.606.512,13**	**976.537.865.263,44**	**962.485.223.766,60**	**2,53%**
1,1	**PAD :**	**62.079.454.189,41**	**86.197.832.174,34**	**65.095.212.711,13**	**75.724.604.086,44**	**75.145.390.393,60**	7,48%
1.1.1	Pajak Daerah	6.943.332.346,00	9.472.060.893,00	10.915.823.421,00	11.312.834.112,00	9.742.167.901,00	10,35%
1.1.2	Retribusi Daerah	1.734.677.570,25	1.275.340.230,00	1.438.637.979,50	6.078.249.935,00	4.843.324.437,00	72,13%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	515.533.098,00	793.174.405,00	1.244.178.967,00	1.838.644.385,00	1.194.084.374,00	30,86%
1.1.4	Lain - Lain PAD yang Sah	52.885.911.175,16	74.657.256.646,34	51.496.572.343,63	56.494.875.654,44	59.365.813.681,60	6,23%
1,2	**Dana Perimbangan :**	**679.378.911.420,00**	**628.335.535.038,00**	**699.012.975.688,00**	**681.063.152.789,00**	**627.022.366.054,00**	**0,22%**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan Pajak	17.965.540.658,00	10.897.234.433,00	9.669.679.495,00	7.784.364.675,00	8.308.732.672,00	-15,84%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	495.957.190.000,00	487.244.817.000,00	487.244.817.000,00	500.040.037.000,00	458.408.122.000,00	-1,86%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	165.456.180.762,00	130.193.483.605,00	202.098.479.193,00	173.238.751.114,00	160.305.511.382,00	-7,90%
1,3	**Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah :**	**134.180.657.828,00**	**156.548.388.504,00**	**211.532.418.113,00**	**219.750.108.388,00**	**260.317.467.319,00**	9,17%
1.3.1	HIBAH	13.242.300.000,00	7.500.000.000,00	31.419.032.867,00	24.592.391.200,00	34.050.424.449,00	73,07%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Daerah Lainnya	16.502.474.943,00	17.715.400.004,00	16.156.056.012,00	20.029.032.688,00	27.740.029.837,00	15,25%
1.3.3	Dana Penyesuaian	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	34.250.000.000,00	31.353.470.000,00	52.128.432.000,00	116,12%
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.565.135.935,00	1.869.816.500,00	-	-	2.480.382.450,00	-
1.3.5	Pendapatan Lainnya	96.870.746.950,00	121.963.172.000,00	129.707.329.234,00	143.775.214.500,00	143.918.198.583,00	10,81%
2	**BELANJA**	**844.697.822.533,00**	**893.701.137.577,60**	**958.487.778.266,80**	**997.640.190.347,00**	**955.340.258.355,20**	**3,22%**
2,1	**Belanja Tidak Langsung**	**502.322.816.320,00**	**490.162.053.168,00**	**496.360.660.808,00**	**537.098.291.998,00**	**598.188.038.543,00**	4,61%
2.1.1	Belanja Pegawai	339.624.790.476,00	304.154.538.802,00	309.167.275.006,00	332.713.219.387,00	330.865.998.038,00	-0,43%
2,12	Belanja Hibah	4.583.600.000,00	10.165.862.000,00	7.375.670.000,00	8.324.834.750,00	56.389.533.474,00	171,14%
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	10.012.337.000,00	1.000.000.000,00	2.698.000.000,00	752.500.000,00	4.520.838.850,00	127,11%
2.1.4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota,	147.794.226.290,00	174.475.112.366,00	176.867.963.988,00	195.198.342.491,00	192.718.713.924,00	7,13%

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Pemerintahan Desa dan Partai Politik						
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	307.862.554,00	366.540.000,00	251.751.814,00	109.395.370,00	13.692.954.257,00	3087,03%
2,2	**Belanja Langsung**	**342.375.006.213,00**	**403.539.084.409,60**	**462.127.117.458,80**	**460.541.898.349,00**	**357.152.219.812,20**	2,40%
2.2.1	Belanja Pegawai	50.369.955.082,00	55.770.230.533,60	62.186.430.754,00	49.287.380.028,00	55.054.545.613,00	3,30%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.594.150.650,00	174.550.306.421,00	203.922.106.769,80	219.513.603.785,00	179.517.432.294,20	9,47%
2.2.3	Belanja Modal	159.410.900.481,00	173.218.547.455,00	196.018.579.935,00	191.740.914.536,00	122.580.241.905,00	-4,11%
3	**Pembiayaan**	**35.815.498.245,76**	**59.330.672.300,17**	**22.709.690.438,91**	**28.602.671.448,24**	**3.449.937.466,08**	**-14,51%**
3,1	Penerimaan Pembiayaan	42.815.498.245,76	66.830.672.300,17	36.709.690.438,91	46.333.409.538,24	13.712.969.536,08	-8,29%
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	14.000.000.000,00	17.730.738.090,00	10.263.032.070,00	19,59%

Sumber : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

❖ Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara kontinu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan. Secara keseluruhan, pendapatan Kabupaten Bone Bolango cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Proporsi pendapatan terbesar pada tahun 2020 berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 71% dari keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango. Sementara itu, PAD hanya menyumbang 8% dari seluruh pendapatan daerah. hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango masih bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Gambar 24.

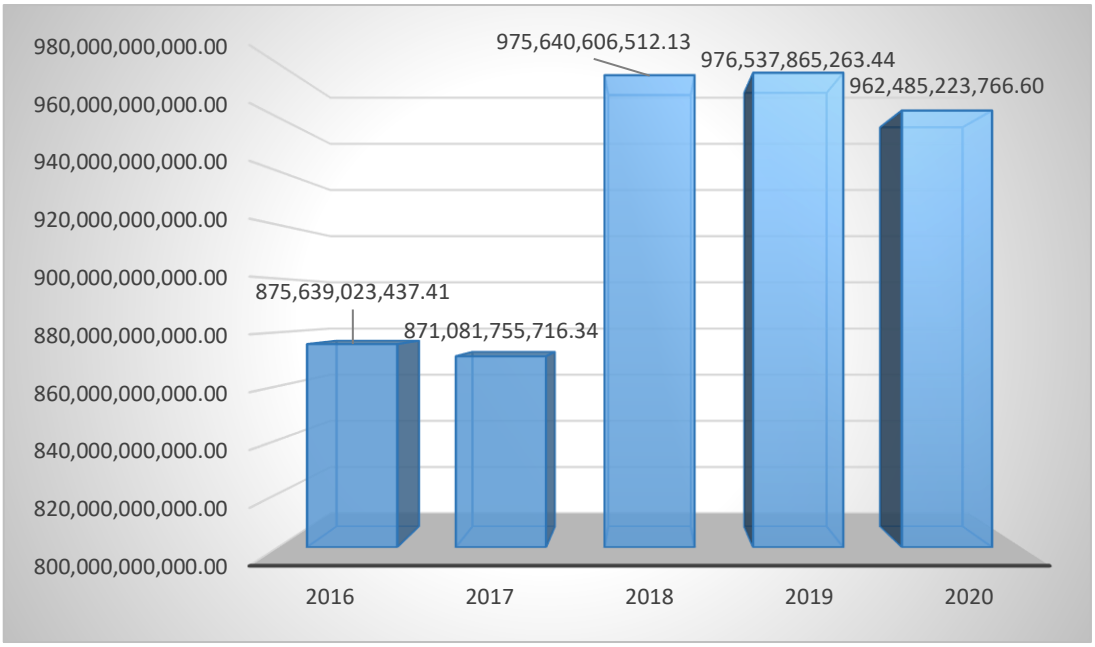

Gambar 24. Perkembangan Pendapatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2020

❖ **Belanja Daerah**

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam APBD yang menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor yang ada di masyarakat.

Belanja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama kurun waktu tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, belanja daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp844.697.822.533,00 sementara pada 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi Rp762.621.544.431,20 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun berada di angka -1,61%. Gambaran rinci perkembangan

belanja daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar 25.

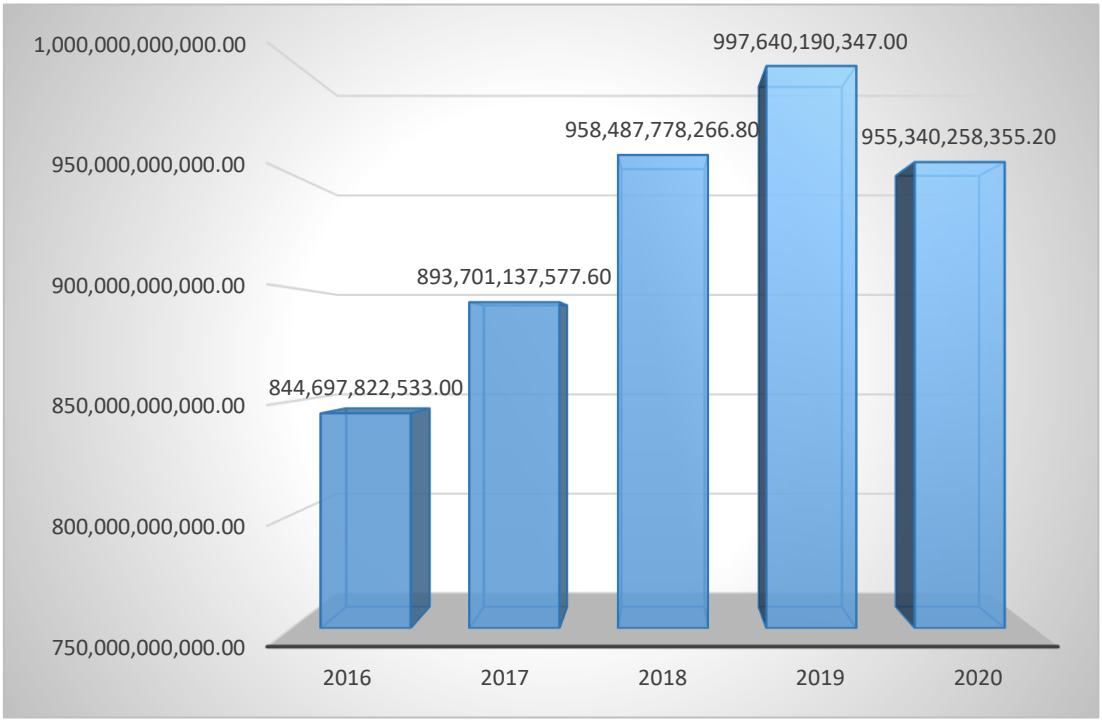

Gambar 25. Perkembangan Belanja Kabupaten Gorontalo

❖ Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung fluktuatif. Hal ini merupakan dampak dari fluktuasi penerimaan pembiayaan sementara pengeluaran terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Informasi detail mengenai perkembangan pembiayaan daerah di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar 26.

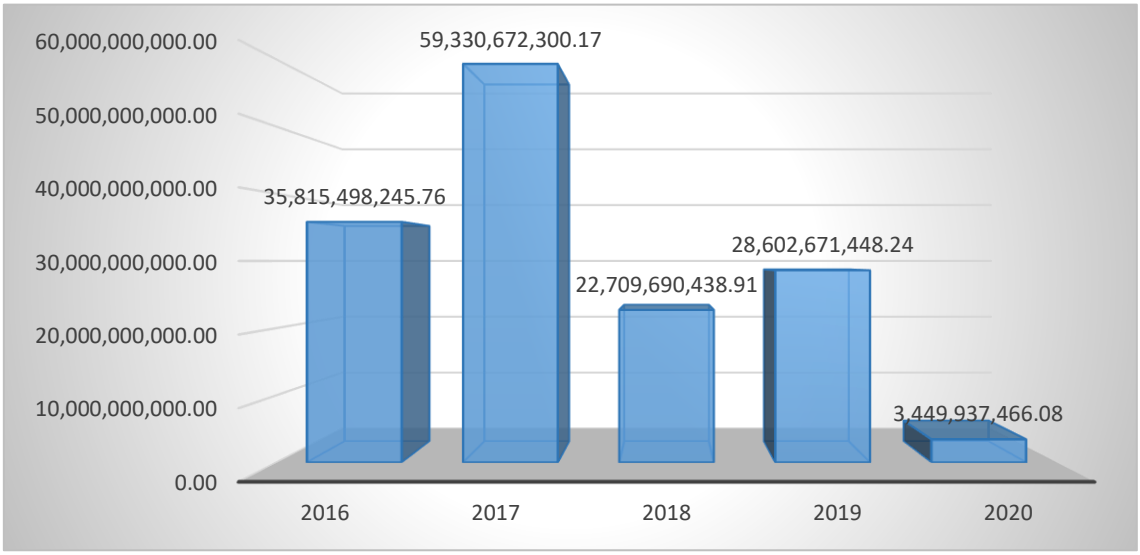

Gambar 26. Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021

3.8.3 Neraca Daerah

Kinerja Neraca Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel 38.

Tabel 35. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	ASET	12,91%	8,81%	0,76%	5,61%
1.1	ASET LANCAR	13,19%	-24,72%	-26,18%	-23%
1.1.1	Kas	10%	-81%	42%	-19%
1.1.2	Piutang	27%	53%	-54%	-11%
1.1.3	Persediaan	6%	35%	-6%	-5%
1.2	ASET TETAP	15%	11%	2%	10%
1.2.1	Tanah	18%	7%	0%	8%
1.2.2	Peralatan dan Mesin	14%	15%	20%	14%
1.2.3	Gedung dan Bangunan	12%	11%	6%	11%
1.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12%	18%	2%	12%
1.2.5	Aset tetap lainnya	11%	13%	7%	9%
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	669%	-24%	1%	139%
1.2.7	Akumulasi Penyusutan Nilai Tetap	17%	18%	14%	13%

No.	Uraian	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1.3	**ASET LAINNYA**	-60%	-7%	-34%	-40%
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran				
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah				
1.3.3	Kemitraan dengan pihak ketiga				
1.3.4	Aset tak berwujud	-12%	-27%	-48%	-29%
1.3.5	Aset Lain-lain	-56%	-4%	-32%	-39%
1.4	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	7%	0%	-3%	1%
1.4.1	Jumlah Investasi Permanen	7%	0%	-4%	1%
1.4.2	Jumlah Investasi Non permanen				
2	**KEWAJIBAN**	17,97%	4,21%	0,69%	5,71%
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	22%	30%	-25%	-2%
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	80934%	-72%	114%	20222%
2.1.2	Uang muka dari kas daerah				
2.1.3	pendapatan diterima di muka	-48%	1%	-2%	-20%
2.1.4	Utang Bunga				
2.1.5	Bagian lancar Utang Jangka Panjang				
2.1.6	Utang Beban	88%	33%	-7%	59%
2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	-25%	28%	-59%	-28%
3	**EKUITAS DANA**				
3.1	**EKUITAS DANA LANCAR**				
3.1.1	SILPA				
3.1.2	Cadangan piutang				
3.1.3	Cadangan persediaan				
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**	18%	4%	1%	6,00%
3.2.1	Diinvestasikan dalam aset tetap				
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya				
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	18%	4%	1%	6%

Sumber: Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Tabel 38 di atas menggambarkan kondisi rata-rata pertumbuhan neraca keuangan Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Total aset daerah selama periode tersebut mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,61%.

Di sisi lain, kewajiban daerah Kabupaten Bone Bolango juga mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 5,71%. Secara keseluruhan, jumlah kewajiban dan ekuitas dana daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6%

3.8.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

❖ Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran tentang belanja daerah yang berisi informasi tentang realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 36. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**309.167.275.006,00**	**313.972.201.572,00**	**330.834.935.538,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	279.734.109.090,00	242.553.655.884,00	291.672.901.471,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	26.740.004.521,00	69.466.467.681,00	36.446.549.974,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.279.700.000,00	1.510.200.000,00	2.277.000.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	413.461.395,00	441.878.007,00	438.484.093,00
B	**Belanja Langsung**	**282.333.232.281,00**	**179.559.388.923,00**	**207.839.830.932,00**
1	Belanja Honorarium PNS**)	14.598.455.100,00	12.371.093.000,00	15.840.206.874,00
2	Belanja Uang Lembur**)	413.461.395,00	245.478.750,00	21.960.000,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	80.000.000,00	228.000.000,00	289.003.500,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	5.987.912.381,00	2.049.838.680,00	4.692.488.393,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	-9.881.003.000,00	2.925.000,00	8.388.045.000,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	13.437.571.841,00	956.467.700,00	10.018.849.256,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	753.921.650,00	530.735.800,00	114.405.000,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1.439.726.690,00	648.384.500,00	532.903.045,00
9	Belanja perjalanan dinas**)	59.484.606.289,00	34.200.206.396,00	45.361.727.959,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas			
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	196.018.579.935,00	128.326.259.097,00	122.580.241.905,00
	TOTAL	**591.500.507.287,00**	**493.531.590.495,00**	**538.674.766.470,00**

Sumber: Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

Berdasarkan Tabel 39 di atas, terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bone Bolango cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai 591,5 Milyar Rupiah. Selanjutnya turun menjadi 493,5 Milyar Rupiah pada tahun 2019, dan kembali naik menjadi 538,6 Milyar Rupiah pada tahuun 2020. Jika dilihat dari perkembangan proporsinya, belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan dari 60,82% menjadi 48,61% dan 48,61% namun mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 55,79%. Rincian analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bone Bolango tahun 2018 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 37. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(%)
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2018	591.500.507.287,00	972.487.778.266,80	60,82%
2	2019	493.531.590.495,00	1.015.370.928.437,00	48,61%
3	2020	538.674.766.470,00	965.603.290.425,20	55,79%

Sumber : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021

3.8.5 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Defisit riil anggaran Kabupaten Bone Bolango tahun 2018 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 41 berikut:

Tabel 38. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018-2020

NO	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	975.640.606.512,13	976.537.865.263,44	962.485.223.766,60
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	958.487.778.266,80	997.640.190.347,00	955.340.258.355,20
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.000.000.000,00	17.730.738.090,00	3.449.937.466,08
	Defisit riil	**Rp3.152.828.245**	**-Rp38.833.063.174**	**Rp3.695.027.945**

Berdasarkan tabel 47 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2020, realisasi anggaran Kabupaten Bone Bolango mengalami surplus sebesar Rp3.695.027.945. Secara keseluruhan, defisit riil anggaran Kabupaten Bone Bolango cenderung mengalami kenaikan. Pada dasarnya, defisit anggaran tersebut harus ditutupi di antaranya dengan optimalisasi pembiayaan seperti yang terlihat pada tabel 42 berikut ini

Tabel 39. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil		
		2017	2018	2019
		(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	122%	1264%	23%
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6	Penerimaan Piutang Daerah			

Sementara itu, perkembangan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 hingga 2019 dapat dilihat pada tabel 43 berikut ini.

Tabel 40. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017-2019

Uraian	2017		2018		2019		Rata-rata pertumbuhan
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
Jumlah SiLPA	36.711.290.438,91		39.862.518.684,24		7.500.346.364,68		(36,30)
Pelampauan penerimaan PAD	0,00	-	0,00		0,00		
Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0,00		0,00		0,00		
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	7.000.000.000,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	3.019.800.000,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	2017		2018		2019		Rata-rata pertumbuhan
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kegiatan lanjutan	28.667.102.649,00	78,09	15.031.404.169,47	37,71	0,00	0,00	(73,78)

Sumber : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Berdasarkan tabel 43 di atas, terlihat bahwa secara rata-rata, SiLPA Kabupaten Bone Bolango mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -36,30%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran di daerah.

3.8.6 Kerangka Pendanaan

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan Perundang-Undangan.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat pentingnya kerangka pendanaan daerah yang diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan.

❖ Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pada umumnya pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam APBD dan laporan keuangan daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Proyeksi APBD disusun untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan selama 5 tahun. Penyusunan APBD didasarkan pada prioritas kebutuhan. Proyeksi pendapatan digunakan untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang akan digunakan dalam pembangunan. Sedangkan proyeksi belanja disusun dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan belanja sesuai prioritas I, prioritas II dan prioritas III.

Pada dasarnya, struktur APBD terutama komponen Belanja Daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam struktur lama, komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Sementara itu, dalam struktur APBD terbaru, komponen Belanja Daerah dibagi menjadi Belanja Modal dan Belanja Operasi Secara keseluruhan proyeksi pendanaan pembangunan Kabupaten Bone Bolango tahun 2022 – 2026 disajikan pada tabel berikut

Tabel 41. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022-2026

KOREK	URAIAN	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.093.369.403.955**	**1.109.248.940.706**	**1.129.925.979.310**	**1.156.149.906.142**	**1.188.797.379.868**	
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**134.748.208.628**	**152.925.741.972**	**173.555.424.564**	**196.968.051.338**	**223.539.041.463**	**13,49%**
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	23.630.320.350,00	26.818.050.565,22	30.435.805.586,46	34.541.595.760,08	39.201.257.028,11	
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	21.187.782.738,88	24.046.014.630,36	27.289.822.003,99	30.971.218.992,33	35.149.236.434,40	
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.269.800.000,00	2.575.996.020,00	2.923.497.883,10	3.317.877.747,53	3.765.459.455,67	
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	87.660.305.539,24	99.485.680.756,49	112.906.299.090,54	128.137.358.837,85	145.423.088.545,08	
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**902.647.132.781**	**889.378.219.929**	**876.304.360.096**	**863.422.686.003**	**850.730.372.518**	**-1,47%**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	886.034.004.547,20	873.009.304.680,36	860.176.067.901,56	847.531.479.703,40	835.072.766.951,76	
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.613.128.233,78	16.368.915.248,74	16.128.292.194,58	15.891.206.299,32	15.657.605.566,72	
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**55.974.062.545**	**66.944.978.804**	**80.066.194.650**	**95.759.168.801**	**114.527.965.886**	**19,60%**
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	26.610.229.345,44	31.825.834.297,15	38.063.697.819,39	45.524.182.591,99	54.446.922.380,02	
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.363.833.200,00	35.119.144.507,20	42.002.496.830,61	50.234.986.209,41	60.081.043.506,46	
5	**BELANJA DAERAH**	**1.082.768.741.032**	**1.097.383.277.783**	**1.116.668.816.387**	**1.141.362.093.219**	**1.172.325.851.945**	
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**677.645.630.230**	**685.862.677.454**	**698.032.917.567**	**715.150.019.450**	**738.202.236.326**	**4,28%**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	375.441.652.839,96	378.445.186.062,68	381.472.747.551,18	384.524.529.531,59	387.600.725.767,84	0,80%
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.669.656.304,46	280.790.301.362,91	288.793.336.254,62	301.670.235.672,08	320.406.971.430,59	2,00%
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	625.680.000,00	652.459.104,00	680.384.353,65	709.504.803,99	739.871.609,60	
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	23.211.332.358,19	24.204.777.383,12	25.240.741.855,12	26.321.045.606,52	27.447.586.358,48	
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1.697.308.727,40	1.769.953.540,93	1.845.707.552,48	1.924.703.835,73	2.007.081.159,90	
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**204.597.970.579**	**210.735.909.696**	**217.057.986.987**	**223.569.726.597**	**230.276.818.395**	**3,00%**
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	6.481.866.709,25	6.676.322.710,53	6.876.612.391,84	7.082.910.763,60	7.295.398.086,51	

KOREK	URAIAN	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.036.894.953,16	43.298.001.801,75	44.596.941.855,81	45.934.850.111,48	47.312.895.614,83	
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.337.629.367,46	105.407.758.248,48	108.569.990.995,94	111.827.090.725,82	115.181.903.447,59	
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.969.934.844,87	53.529.032.890,21	55.134.903.876,92	56.788.950.993,23	58.492.619.523,02	
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.771.644.704,06	1.824.794.045,18	1.879.537.866,54	1.935.924.002,53	1.994.001.722,61	
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.100.109.585**	**1.050.054.792**	**525.027.396**	**262.513.698**	**131.256.849**	**-50,00%**
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	2.100.109.584,50	1.050.054.792,25	525.027.396,13	262.513.698,06	131.256.849,03	
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**198.425.030.638**	**199.734.635.840**	**201.052.884.437**	**202.379.833.474**	**203.715.540.375**	**0,66%**
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	874.735.397,99	880.508.651,61	886.320.008,71	892.169.720,77	898.058.040,93	
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	197.550.295.240,26	198.854.127.188,84	200.166.564.428,29	201.487.663.753,52	202.817.482.334,29	
6	**PEMBIAYAAN**	**14.699.337.077**	**15.964.337.077**	**17.355.837.077**	**18.886.487.077**	**20.570.202.077**	**-19,24%**
6 . 1	Penerimaan Pembiayaan						
6 . 1 . 1	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
6 . 1 . 2	SILPA	2.049.337.077	2.049.337.077	2.049.337.077	2.049.337.077	2.049.337.077	-2,00%
6 . 2 . 1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	12.650.000.000	13.915.000.000	15.306.500.000	16.837.150.000	18.520.865.000	10,00%

Sumber: Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2021

❖ Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan bertujuan menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan belanja daerah, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan Kabupaten Bone Bolango selama 5 Tahun ke depan (2022-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara umum, kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bone Bolango diproyeksikan mengalami tren peningkatan setiap tahunnya.

Dalam upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur ekonom dan layanan publik ditengah pandemi maupun pasca pandemi covid-19 di Kabupaten Bone Bolango, perlu didukung penganggaran yang memadai, Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan mengalokasikan penerimaan pembiayaan daerah melalui Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah, maka ditetapkan pula proyeksi rencana penggunaan keuangan daerah tersebut. Pengeluaran yang wajib didahulukan adalah anggaran untuk mendanai program/kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama baik dalam belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Hal ini menggambarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bone Bolango lebih menekankan pada efektivitas program dan efisiensi anggaran kedua hal tersebut digambarkan pada tabel 51 dan 52 berikut ini

Tabel 42. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022-2026

NO.	URAIAN	PROYEKSI				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan	1.093.369.403.955	1.109.248.940.706	1.129.925.979.310	1.156.149.906.142	1.188.797.379.868
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	2.049.337.077,00	2.049.337.077,00	2.049.337.077,00	2.049.337.077,00	2.049.337.077,00
	Total penerimaan	**1.095.418.741.032,00**	**1.111.298.277.783,00**	**1.131.975.316.387,00**	**1.158.199.243.219,00**	**1.190.846.716.945,00**
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	582.142.361.298,63	596.088.482.935,31	610.034.604.571,99	623.980.726.208,67	637.926.847.845,35
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**513.276.379.733,37**	**515.209.794.847,69**	**521.940.711.815,01**	**534.218.517.010,33**	**552.919.869.099,65**

Tabel 43. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
I	**Kapasitas riil kemampuan keuangan**	**710.841.259.328,65**	**724.407.542.526,19**	**742.504.534.973,60**	**765.880.453.705,53**	**795.407.862.551,63**
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	503.302.421.543,69	551.482.585.294,38	605.847.221.789,09	667.273.490.389,27	736.767.606.863,28
II.b	Pembentukan dana cadangan					
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	9.516.594.946,92	9.706.926.845,86	9.901.065.382,78	10.099.086.690,43	10.301.068.424,24
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	12.650.000.000,00	13.915.000.000,00	15.306.500.000,00	16.837.150.000,00	18.520.865.000,00
II	**Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)**	**506.435.826.596,77**	**555.690.658.448,53**	**611.252.656.406,32**	**674.011.553.698,84**	**744.987.403.439,04**

No	Uraian	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	204.405.432.731,88	168.716.884.077,66	131.251.878.567,28	91.868.900.006,69	50.420.459.112,59
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	670.260.091.573,37	710.475.697.067,78	753.104.238.891,84	798.290.493.225,35	846.187.922.818,87
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	565.131.809.078,20	569.375.068.507,94	573.650.440.565,82	577.958.170.052,14	582.298.503.645,69
III	**Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)**	**105.128.282.495,17**	**141.100.628.559,84**	**179.453.798.326,02**	**220.332.323.173,22**	**263.889.419.173,18**
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	**99.277.150.236,71**	**27.616.255.517,82**	**(48.201.919.758,74)**	**(128.463.423.166,53)**	**(213.468.960.060,59)**

BAB IV. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1 Capaian Target TPB Pilar Sosial

Total indikator pada Pilar sosial adalah 93 indikator. Hail evaluasi capaia TPB untuk target sosial menunjukkan bahwa 39 indikator (41%) telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indicator yg telah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional berjumlah 26 indikator (27%). Indikator pada Pilar sosial yang belum dilaksanakan sejumlah 4 indicator (4%) dan indikator yang belum ada data sejumlah 27 indikator (28%).

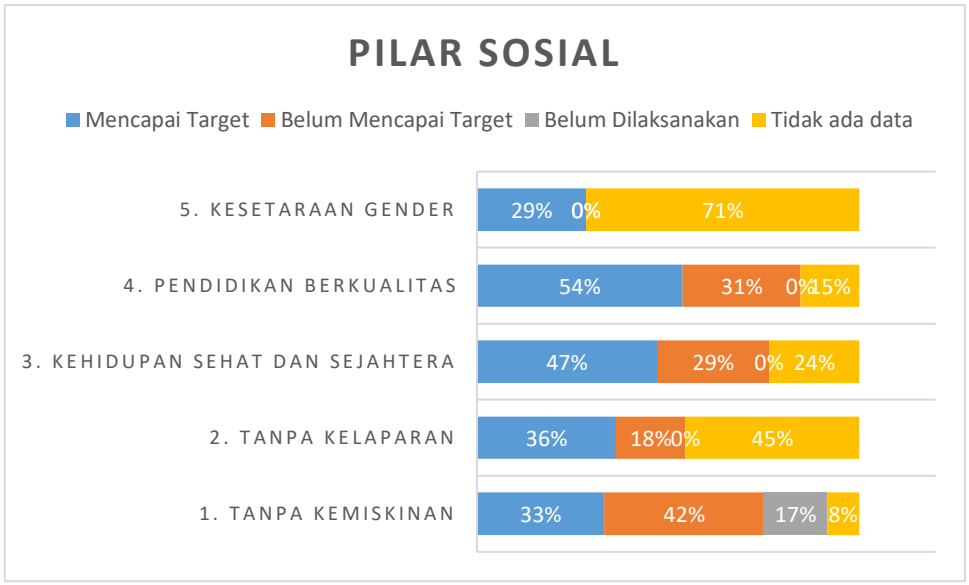

Gambar 27. Grafik capaian TPB untuk pilar sosial

Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target national ditunjukkan pada Tabel 48.

Tabel 44. Indikator pilar sosial yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1d	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	Tahun 2016: 5771 Tahun 2017: 8124 Tahun 2018: 8059 Tahun 2019: Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2018: menjadi 2,8 juta	Rp. 207.930.000	Program perlindungan dan jaminan sosial	Bazda Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 76,39% Tahun 2017: 85,55% Tahun 2018: 100% Tahun 2019: 100% Tahun 2020: Target 2026: 100% Target Nasional 2019: 70%	Rp. 5.161.000.000,-	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan - Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Klinik bersalin swasta

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
		1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 88,62% Tahun 2017: 97,29% Tahun 2018: 93,36% Tahun 2019: Tahun 2020: Target 2026: 100% Target Nasional 2019: 63%		- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan - Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa: - Memberikan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi - Berperan aktif dalam membantu pelayanan Pos Yandu Ikatan Dokter Indonesia (IDI): - Memberikan pelayanan imunisasi gratis - Memberikan penyuluhan tentang imunisasi
		1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tahun 2016: - Tahun 2017: 88,82% Tahun 2018: 83,32% Tahun 2019: 75,58 Tahun 2020: Target 2026: 100%	Rp. 3.800.000.000, -	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program peningkatan kapasitas sumber daya	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa: - Membentuk Kampung KB di setiap wilayah kecamatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI):

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
					Target Nasional 2019: 65%		manusia kesehatan - Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	- Memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi gratis - Memberikan penyuluhan tentang KB
		1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016: 76,56 Tahun 2017: 78,29 Tahun 2018: 90 Tahun 2019: - Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: 65%	-	-	Tim penggerak PKK: - Memberikan sosialisasi tentang pentignya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar Swasta: - Memberikan CSR dalam bentuk beasiswa untuk anak sekolah - Memberikan CSR dalam bentuk bantuan peralatan sekolah

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
		1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinas Sosial	Tahun 2016: 96,19% Tahun 2017: 89,93% Tahun 2018: 100% Tahun 2019:100% Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: 100%	-	-	PT PLN (Persero) UP3 Gorontalo: - Memberikan CSR dalam bentuk pemasangan listrik gratis bagi masyarakat miskin
		1.5.3*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.	BPBD	Tahun 2016: 1 Tahun 2017: 1 Tahun 2018: 1 Tahun 2019:1 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Ada		- Program penanganan bencana - Rogram penanggulangan bencana	Swasta: - Memberikan CSR berupa bantuan social bagi korban bencana
		1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahun 2016: 42% Tahun 2017: 38% Tahun 2018: 42% Tahun 2019: Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: tidak ada dalam perpres 59/2017	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: Tahun 2018: 9,24% Tahun 2019: 7,96 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: 28%	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang gizi anak - Menggalakkan program Kebun PKK
		2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: Tahun 2018: 9,24% Tahun 2019: 7,96 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: 28%	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang gizi anak - Menggalakkan program Kebun PKK
		2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: Tahun 2018: 5,24% Tahun 2019: 1,28% Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: 28%			Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang gizi ibu hamil - Menggalakkan program Kebun PKK

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
		2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 11,09% Tahun 2017: 7,32% Tahun 2018: 5,4% Tahun 2019: 1,28% Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: 50%			Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 318 Tahun 2017: 226 Tahun 2018: 119 Tahun 2019: Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: 306			
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 17 Tahun 2017: 13 Tahun 2018: 6 Tahun 2019: Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun			
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Dinas Kesehatan				

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.		per 1000 kelahiran hidup.					
		3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : 16 Tahun 2017 : 3 Tahun 2018 : 5 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: 'Menurun menjadi 24			
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 5 Tahun 2018 : 1 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
		3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yangmencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Ya Tahun 2018 : Ya Tahun 2019 : Ya Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 300			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
		3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Ada Tahun 2018 : Ada Tahun 2019 : Ada Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
		3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : 42 Tahun 2019 : 29 Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
		3.3.5(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 35.			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 41,8% Tahun 2018 : 24,4% Tahun 2019 : 24,3% Target Nasional 2019: Menurun menjadi 24,3%			
		3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : Tahun 2019 : Belum ada Targte 2026: - Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 280			
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan	3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahun 2016 : 10,28 Tahun 2017 : 8,14 Tahun 2018 : 5,83 Tahun 2019 : Target Nasional 2019:	Rp. 3.800.000.000-	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	BKKBN Provinsi Gorontalo: - Melaksanakan Mini Survei Keluarga Berencana -
		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup	Dinas Pengendalian	Tahun 2016 : 97,4%	Rp. 1.000.000.000,-	Program pemberdayaan dan	BPJS

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahun 2017 : 86,4% Tahun 2018 : 98,1% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		peningkatan keluarga sejahtera (ks)	
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : 97,43% Tahun 2017 : 86,44% Tahun 2018 : 98,13% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi minimal 95%			
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : 82,1% Tahun 2017 : 100% Tahun 2018 : 100% Tahun 2019 : 100% Target Nasional 2019:	Rp. 350.000.000,-	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan				(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	akses obat bagi semua.							
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : Tahun 2019 : 278,3 Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 221.000.000,-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Klinik swasta: - Menyediakan fasilitas kesehatan
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016 : 90,17 Tahun 2017 : 90,79 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 : 78,79 Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 114,09%	-	-	Tim penggerak PKK: - Memberikan sosialisasi tentang pentignya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar Swasta: - Memberikan CSR dalam bentuk beasiswa untuk anak sekolah - Memberikan CSR dalam bentuk

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	pembelajaran yang relevan dan efektif.							bantuan peralatan sekolah
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DInas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016 : 94,48% Tahun 2017 : 90,28% Tahun 2018 : 91,86% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 77,2%	-	-	Tim penggerak PKK: - Memberikan sosialisasi tentang pentignya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar Swasta: - Memberikan CSR dalam bentuk beasiswa untuk anak sekolah - Memberikan CSR dalam bentuk bantuan peralatan sekolah
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Komunikasi dan Inforamtika	Tahun 2016 : 30,45 Tahun 2017 : 35,97 Tahun 2018 : 38,75 Tahun 2019 :	-	-	Perguruan Tinggi: - Pengembangan Program Studi Sistem Informasi PT Telkom: Penyediaan fasilitas jaringan internet

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.				Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; di (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; 4) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016 : 101,13 Tahun 2017 : 101,80 Tahun 2018 : 101,50 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat	-	-	Tim penggerak PKK: - Memberikan sosialisasi tentang pentignya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar Swasta: - Memberikan CSR dalam bentuk beasiswa untuk anak sekolah - Memberikan CSR dalam bentuk bantuan peralatan sekolah
4.6	Pada tahun 2030, menjamin	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016 : 98,89%	-	-	Tim penggerak PKK: - Memberikan sosialisasi tentang

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.		penduduk umur ≥15 tahun.		Tahun 2017 : 98,99% Tahun 2018 : 98,92% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 96,1%			pentignya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar Swasta: - Memberikan CSR dalam bentuk beasiswa untuk anak sekolah - Memberikan CSR dalam bentuk bantuan peralatan sekolah
		4.6.1(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016 : 99,41% Tahun 2017 : 99,35% Tahun 2018 : 94,45% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun	-	-	Tim penggerak PKK: - Memberikan sosialisasi tentang pentignya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar - Memberikan layanan latihan membaca dan menulis bagi yang buta aksara Swasta: - Memberikan CSR dalam bentuk beasiswa untuk anak sekolah - Memberikan CSR dalam bentuk bantuan peralatan sekolah

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016 : 82,71 Tahun 2017 : 84,56 Tahun 2018 : 84,63 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 11.909.655.000	Program Pendidik dan tenaga kependidikan	Perguruan Tinggi: - Mengembangkan program pendidikan guru profesional
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Tahun 2016 : Perda No. 8/2019 ttg Pengarus utamaan Gender Tahun 2017 : 2 Tahun 2018 : 2 Tahun 2019 : 2 Target Nasional 2019: Meningkat dan bertambah sebanyak 16	Rp. 300.000.000	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Polres Bone Bolango

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Tahun 2016 : 23,9 Tahun 2017 : 21,06 Tahun 2018 : 21 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 300.000.000	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Polres Bone Bolango
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	-	Tahun 2016 : 4,34% Tahun 2017 : 4% Tahun 2018 : 4% Tahun 2019 : Target Nasional 2019 : Meningkat	-	-	Partai Politik
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Telekomunikasi dan informatika	Tahun 2016 : 55,29 Tahun 2017 : 56,29	-	-	PT Telkom: Penyediaan fasilitas jaringan internet Swasta:

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.				Tahun 2018 : 61,33 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			- Menyediakan ponsel murah dengan harga terjangkau

Sumber: hasil evaluasi TPS, 2020

Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 27.

Tabel 45. Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8%	Dinas Sosial	Tahun 2016 : 17,97% Tahun 2017 : 17,81% Tahun 2018 : 17,40 Tahun 2019 : 16,12% Target Nasional 2019: Menurun menjadi 7-8%	Rp. 5.989.000.000	Program pemberdayaan sosial	Bazda Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo: - Pemberian bantuan sosial untuk pemberdayaan masyarakat

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	13.1%	Dinas Sosial	Tahun 2016 : 84,98% Tahun 2017 : 60,25% Tahun 2018 : 60,25 Tahun 2019 : 81,99% Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 95%	Rp. 3.400.000.000	Program pemberdayaan sosial	BPJS
		1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	72%	Dinas Penanaman Modal	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 59% Tahun 2018 : 18% Tahun 2019 : 28% Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	-	-	BPJS Ketenagakerjaan: - Mengawasi pelaksanaan BPJS ketenaga kerjaan dari perusahaan Swasta: - Kewajiban membayar asuransi ketenagakerjaan.
		1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	9,62%	Dinas Sosial	Tahun 2016 : 0,5% Tahun 2017 : 1,4% Tahun 2018 : 1,70 Tahun 2019 : Target Nasional : Meningkat menjadi 17,12%	Rp. 3.572.840.000	Program rehabilitasi sosial	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	23,92%	Dinas PUPR	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 59,21% Tahun 2018 : 62,22% Tahun 2019 : 76,09% Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 100%	Rp. 13.545.325.500	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	PDAM Kabupaten Bone Bolango
		1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	37,97%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Tahun 2016 : 45,34% Tahun 2017 : 41,86% Tahun 2018 : 50,59% Tahun 2019 : 62,03% Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 100%	Rp. 1.000.000.000,-	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	
		1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	0,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Target 2016 : 54,87% Target 2017 : 57,08% Target 2018 : 81,36% Target 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 82,2%	-	-	Tim penggerak PKK: - Memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar Swasta: - Memberikan CSR dalam bentuk

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
									- beasiswa untuk anak sekolah - Memberikan CSR dalam bentuk bantuan peralatan sekolah
		1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	9%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Target 2016 : 52,17% Target 2017 : 54,22% Target 2018 : 57,32% Target 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 100%	184.853.800	Program pencatatan sipil	
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meningkat	BPBD	Tahun 2016 : 795,4 Tahun 2017 : 2874,1 Tahun 2018 : 473,2 Tahun 2019 : Target 2026 : menurun 0 jiwa Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3.919.290.669	Rogram penanggulangan bencana	
		1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	12 Kecamatan	BPBD	Tahun 2016 : 6 Tahun 2017 : 6 Tahun 2018 : 6 Tahun 2019 : 6	-	-	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
						Target 2026: - Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 39 daerah			
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Target 2016 : 0,64% Target 2017 : 0,95% Target 2018 : 7,51% Target Nasional 2019: Menurun menjadi 17%	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang gizi anak - Menggalakkan program Kebun PKK
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : 34,7% Tahun 2017 : 25,50% Tahun 2018 : 28,94% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang gizi anak - Menggalakkan program Kebun PKK

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	35%	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : 75,72% Tahun 2017 : 79,6% Tahun 2018 : 76,4% Tahun 2019 : 60% Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 95%	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang gizi anak - Menggalakkan program Kebun PKK
		3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	25%	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : 75,72% Tahun 2017 : 79,6% Tahun 2018 : 75,6% Tahun 2019 : 60% Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 85 %	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang gizi anak - Menggalakkan program Kebun PKK
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah,	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	3,48%	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : 84,24% Tahun 2017 : 93,33% Tahun 2018 : 91,52% Tahun 2019 :	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang gizi anak

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 95%		kesehatan masyarakat	
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	3.5%	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 10 Tahun 2018 : 6 Tahun 2019 : 4 Tingkat Nasional 2019 : Menurun menjadi 0.5%	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang kesehatan seksual
		3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Meningkat	Dinas Kesheatan	Tahun 2016 : 27,1 Tahun 2017 : 27,8 Tahun 2018 : 37 Tahun 2019 : Target Nasional 2019 : Menurun menjadi 245	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang TB
		3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Belum eliminasi	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : Tahun 2019 : Target Nasional 2019:	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang kusta

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
						Meningkat menjadi 34 provinsi		kesehatan masyarakat	
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	24,67%	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : 30,75% Tahun 2019 : 30,07% Target Nasional 2019: Menurun menjadi 5,4%	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang Rokok dan narkoba
		3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 6357 Tahun 2018 : 7356 Tahun 2019 : 10294 Target Nasional 2019: Tidak meningkat 15,4	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang gizi
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 : 12 Tahun 2017 : 25 Tahun 2018 : 38 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02%	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang Rokok dan narkoba

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016 ; 26,46% Tahun 2017 : 28,09% Tahun 2018 : 30,07% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 90.000.000,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Tim penggerak PKK: - Memberikan penyuluhan tentang Rokok dan narkoba
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	4,97%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016 : 86,96 Tahun 2017 : 93,62 Tahun 2018 : 95,03 Tahun 2019 : Target Nasional:	Rp. 107.426.660.400	Program pengelolaan pendidikan	Perguruan Tinggi: - Melakukan pendampingan dalam pengembangan kualitas pendidikan - Melakukan proses akreditasi
		4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	22,45%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016 : 71,74 Tahun 2017 : 66,67 Tahun 2018 : 77,55 Tahun 2019 : Target Nasional:	Rp. 107.426.660.400	Program pengelolaan pendidikan	Perguruan Tinggi: - Melakukan pendampingan dalam pengembangan kualitas pendidikan - Melakukan proses akreditasi
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	28,15%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016 : 82,28% Tahun 2017 : 83,67% Tahun 2018 : 100%	-	-	Tim penggerak PKK: - Memberikan sosialisasi tentang pentignya

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
						Tahun 2019 : 78,79% Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 106,94%			pendidikan usia dini dan pendidikan dasar Swasta: - Memberikan CSR dalam bentuk beasiswa untuk anak sekolah - Memberikan CSR dalam bentuk bantuan peralatan sekolah
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	0,4 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016 : 8,42% Tahun 2017 : 8,44% Tahun 2018 : 8,46% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 8,8 tahun	-	-	Tim penggerak PKK: - Memberikan sosialisasi tentang pentignya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar Swasta: - Memberikan CSR dalam bentuk beasiswa untuk anak sekolah - Memberikan CSR dalam bentuk bantuan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
									peralatan sekolah

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Indikator TPB pada pilar sosial yang belum dilaksanakan ditunjukkan pada Tabel 28.

Tabel 46. Indikator TPB pada pilar sosial yang belum dilaksanakan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD	-	-	-	-
		1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	BPBD	-	-	-	-
		1.5.1(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	BPBD	-	-	-	-

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Indikator TPB pada pilar sosial yang belum memiliki data ditunjukkan pada Tabel 29.

Tabel 47. Indikator TPB pada pilar sosial yang belum memiliki data

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2.(a)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	-	-	-	-
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi							
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi,	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Pangan	-	Rp. 405.000.000	Program pengawasan keamanan pangan	-
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pangan	-	Rp. 405.000.000	Program pengawasan keamanan pangan	-
		2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Pangan	-	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	dan cukup sepanjang tahun.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Pangan	-	Rp. 1.658.000.000	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	-
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan,	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DInas Tenaga Kerja	-	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.							
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		-	-	-	Polres Bone Bolango
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Dinas Kesehatan	-	-	-	Polres Bone Bolango

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	-	-	-	BKKBN Provinsi Gorontalo
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	-	Rp. 3.800.000.000	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa: - Membentuk Kampung KB di setiap wilayah kecamatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI): - Memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi gratis - Memberikan penyuluhan tentang KB
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan	-	Rp. 3.800.000.000	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa:

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
			(MKJP) cara modern.	Perempuan dan Perlindungan anak				- Membentuk Kampung KB di setiap wilayah kecamatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI): - Memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi gratis - Memberikan penyuluhan tentang KB
		3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan	-	-	--	
		3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DInas Kesehatan	-	-	-	
3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan	3.9.3(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	-	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	kontaminasi udara, air, dan tanah.							
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	Tim penggerak PKK: - Memberikan sosialisasi tentang pentignya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar Swasta: - Memberikan CSR dalam bentuk beasiswa untuk anak sekolah - Memberikan CSR dalam bentuk bantuan peralatan sekolah
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai	Dinas Pendidikann dan Kebudayaan	-	-	-	Swasta: - Pemberian CSR berupa fasilitas internet, infratruktur dan material memedai

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.		bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).					bagi siswa disabilitas, computer untk pengajaran
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	-	Rp. 268.372.000 Rp. 100.000.000	Program perlindungan perempuan Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Polres Bone Bolango: - Melakukan penyidikan terhadap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	-	Rp. 116.350.000 Rp. 125.131.200	Program perlindungan khusus anak Program pemenuhan hak anak (pha)	Polres Bone Bolango
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan	-	-	-	Polres Bone Bolango

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
			15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Perempuan dan Perlindungan anak				
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	-	-	-	
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	-	-	-	
		5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	-	-	-	
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	-	-	-	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	-	Rp. 3.800.000.000	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa: - Membentuk Kampung KB di setiap wilayah kecamatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI): - Memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi gratis - Memberikan penyuluhan tentang KB
		5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan	-	Rp. 3.800.000.000	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa: - Membentuk Kampung KB

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
				Perlindungan anak				di setiap wilayah kecamatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI): - Memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi gratis - Memberikan penyuluhan tentang KB
		5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	-	Rp. 3.800.000.000	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa: - Membentuk Kampung KB di setiap wilayah kecamatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI): - Memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi gratis - Memberikan penyuluhan tentang KB

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

4.2 Capaian Target TPB Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Capaian TPB untuk pilar ekonomi ditunjukkan pada Gambar 11.Indikator

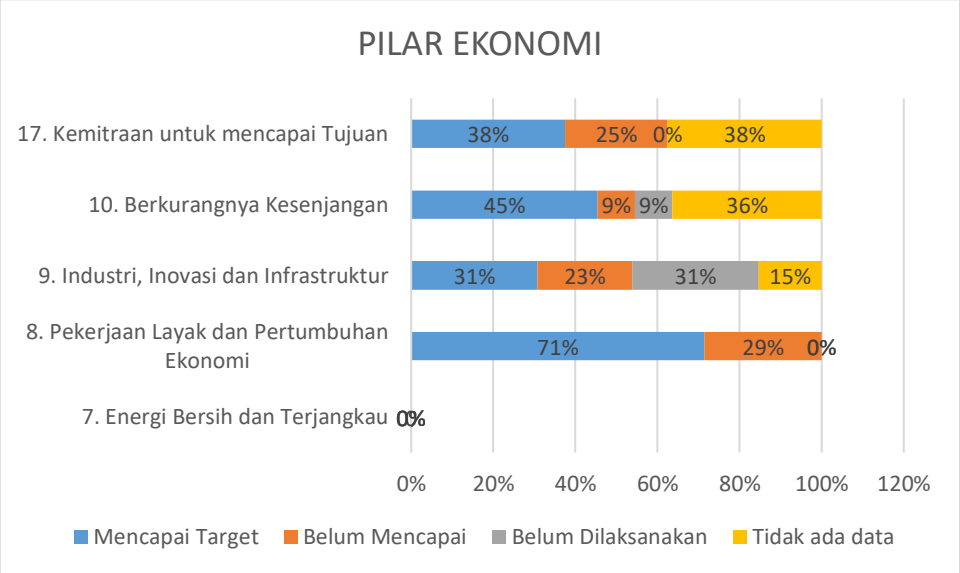

Gambar 28. Capaian TPB untuk pilar ekonomi

Data pada gambar 11 menunjukkan bahwa capaian tertinggi pada tujuan 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan 7 yaitu energy bersih dan terjangkau belum sesuai dengan kondisi Kabupaten Bone Bolango. Capaian indikator pada tujuan 9 yaitu Industri, inovasi dan infrastruktur mencapai 31%. Pada tujuan 9 juga menunjukkan masih 23% indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional. Data yang belum tersedia terbesar pada tujuan 10 yaitu berkurangnya kesenjangan (36%).

Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target national ditunjukkan pada Tabel 30.

Tabel 48. Indikator pada pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahun 2016 : 22,60% Tahun 2017 : 24,53% Tahun 2018 : 26,41% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 226.223.404.800	Program pengelolaan keuangan daerah	
		8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahun 2016 : Rp 22.606.114,31 Tahun 2017 : Rp 24.607.150,14 Tahun 2018 : Rp 27.227.691,41 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp. 226.223.404.800	Program pengelolaan keuangan daerah	
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Pertumbuhan	Rp. 226.223.404.800	Program pengelolaan keuangan daerah	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.		orang bekerja per tahun.		PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.			
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 48,32% Tahun 2018 : 51,64% Tahun 2019 : Target Nasional 2019 : (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Tahun 2016 : 18,57% Tahun 2017 : 15,33% Tahun 2018 : 15,44% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
8.5	Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Rp 11827, 418 Tahun 2018 : Rp 11401,789 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
8.6	Mngurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 30,95246696 Tahun 2018 : 2926 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat			
8.9	Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara .	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 20 Juta	Rp. 5.750.000.000	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Swasta pelaku usaha pariwisata

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : 1910000 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 5.750.000.000	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Swasta pelaku usaha pariwisata
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 2,31% Tahun 2018 : 2,22% Tahun 2019 : 3,71% Target Nasional 2019: Meningkat	-	-	Perbankan: Menyediakan fasilitas kredit dengan bunga rendah bagi UMKM
9.2	Meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Tahun 2016 : 6,31% Tahun 2017 : 6,38% Tahun 2018 : 6,41% Tahun 2019 : 6,62% Target Nasional 2019: (tidak ada	-	-	Swasta sektor industri

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	negara kurang berkembang.				dalam lampiran Perpres 59/2017)			
		9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Tahun 2016 : 7,18% Tahun 2017 : 6,96% Tahun 2018 : 6,56% Tahun 2019 : 11,06% Target Nasional 2019: Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	-	-	Swasta sektor industri
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 6,38% Tahun 2018 : 6,41% Tahun 2019 : 6,62% Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 0,03% Tahun 2018 : 2,30%	-	-	PT Telkom: Menyediakan infrastruktur jaringan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.				Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			internet hingga ke pedesaan
10.1	Mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahun 2016 : 0,390% Tahun 2017 : 0,4% Tahun 2018 : 0,394% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Menurun menjadi 0,36			
		10.1.1(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal	Tahun 2016 : 17,91% Tahun 2017 : 17,81% Tahun 2018 : 17,34% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Menurun menjadi 14%	Rp. 5.989.000.000	Program pemberdayaan sosial	Bazda Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo: - Pemberian bantuan sosial untuk pemberdayaan masyarakat

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
		10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal	Tahun 2016 : 155 Kab Tahun 2017 : 155 Kab Tahun 2018 : 158 Kab Tahun 2019 : 164 Kab Target Nasional 2019: Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019	Rp. 1.454.592.910	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
		10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal	Tahun 2016 : 10 Desa Tahun 2017 : 10 Desa Tahun 2018 : 7 Desa Tahun 2019 : 1 Desa Target Nasional 2019: Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	Rp. 1.454.592.910	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
10.2	Memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Dinas Sosial	Tahun 2016 : 5,18 Tahun 2017 : 5,79 Tahun 2018 : 5,65 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 5.989.000.000	Program pemberdayaan sosial	Bazda Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo: - Pemberian bantuan sosial untuk pemberdayaan masyarakat
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 2,5% Tahun 2018 : 1,7% Tahun 2019 : 1,8% Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
		17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahun 2016 : 7.150.000.000.00 Tahun 2017 : 9.600.000.000.00 Tahun 2018 : 10.675.000.000.00 Tahun 2019 :			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
					Target Nasional :			
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PTD), dan melalui mekanisme	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi dan Informatikan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 74 Tahun 2018 : 73 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi			PT Telkom: Menyediakan infrastruktur jaringan internet hingga ke pedesaan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	fasilitasi teknologi global.							
17.18	Meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Badan Pusat Statistik	Tahun 2016 : 82,61 Tahun 2017 : 85,71 Tahun 2018 : 65,38 Tahun 2019 : 100 Target Nasional 2019:			
		17.18.1(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Badan Pusat Statistik	Tahun 2016 : 2 Tahun 2017 : - Tahun 2018 : 2 Tahun 2019 : 1 Target Nasional 2019:			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Badan Pusat Statistik	Tahun 2016 : 5290 Tahun 2017 : 5554 Tahun 2018 : 4839 Tahun 2019 : 10330 Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Indikator TPB pada pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 31

Tabel 49. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	11,91	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 39,19% Tahun 2018 : 39,09% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).			
8.5	Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkat	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 4,70% Tahun 2018 : 6,33% Tahun 2019 : Target Nasional 2019:			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
						(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
		8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Meningkat	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 7,94% Tahun 2018 : 9,69% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang	8.9.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	21,8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 4,67%	-	-	Perbankan: Menyediakan fasilitas kredit dengan bunga rendah bagi UMKM

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					Tahun 2018 : 5,42% Tahun 2019 : 3,2% Target Nasional 2019: Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25%			
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Menurun	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 8,06% Tahun 2018 : 5,06% Tahun 2019 :	-	-	Swasta sektor industri

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	lipat proporsinya di negara kurang berkembang.					Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Menurun	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 74% Tahun 2018 : 73% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	-	-	PT Telkom: Menyediakan infrastruktur jaringan internet hingga ke pedesaan
		9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memili	Tetap	-	Tahun 2016 :	-	-	Swasta

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
			ki telepon genggam			Tahun 2017 : 13% Tahun 2018 : 13% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun 4%	Dinas Sosial	Tahun 2016 : 17,49% Tahun 2017 : 18,10% Tahun 2018 : 14,57% Tahun 2019 : Target Nasional 2019:	Rp. 5.989.000.000	Program pemberdayaan sosial	Bazda Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo: - Pemberian bantuan sosial untuk pemberdayaan masyarakat

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
						Menurun menjadi 7-8%			
17.8	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Menurun	Dinas Komunikasi dan Inforamatika	Tahun 2016 : 23,74% Tahun 2017 : 27,67% Tahun 2018 : 25,05% Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	-	-	PT Telkom: Menyediakan infrastruktur jaringan internet hingga ke pedesaan
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang	17.18.1(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	4,28%	Badan Pusat Statistik	Tahun 2016 : 92,75% Tahun 2017 : 98,1% Tahun 2018 : 98,72%	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.					Tahun 2019 : 95,72% Target Nasional 2019:			
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	4,28	BPS	Tahun 2016 : 92,75% Tahun 2017 : 98,1% Tahun 2018 : 98,72 Tahun 2019 : 95,72 Target Nasional 2019:	-	-	-

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum dilaksanakan ditunjukkan pada Tabel 32.

Tabel 50. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum dilaksanakan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : Tahun 2019 : Target Nasional 2019 : Meningkat menjadi 275			
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal	Tahun 2016 : 0 Tahun 2017 : 0 Tahun 2018 : 0 Tahun 2019 : 0 Target Nasional 2019: Meningkat paling sedikit 2.000 desa	Rp. 1.454.592.910	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							

Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum memiliki data ditunjukkan pada Tabel 33

Tabel 51. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum memiliki data

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	-	-	-	Perbankan: Menyediakan fasilitas kredit dengan bunga rendah bagi UMKM
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	Rp. 5.750.000.000	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Swasta pelaku usaha pariwisata

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	-	-	-	-
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa		-	-	-	Perbankan
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	-	-	-	-	Perbankan: Menyediakan gerai ATM yang terjangkau

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	-	-	-	Perbankan: Menyediakan fasilitas kredit dengan bunga rendah bagi UMKM
9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Balitbang	-	-	-	-
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal	-	Rp. 1.454.592.910	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						dan masyarakat hukum adat	
		10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal		Rp. 1.454.592.910	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
		10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal		Rp. 1.454.592.910	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
		10.1.1(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	BAPPEDA/Litbang				
		10.3.1(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.					

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja				BPJS Ketenagakerjaan
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
		17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	-	-	
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Dinas Komunikasi dan Iformatika	-	-	-	PT Telkom: Menyediakan infrastruktur jaringan internet hingga ke pedesaan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PTD), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.8	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi dan Iformatika	-	-	-	PT Telkom: Menyediakan infrastruktur jaringan internet hingga ke pedesaan
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		-	-	-	-
		17.17.1(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan					

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
			dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).					
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BAPPEDA	-	-	-	-
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas	17.19.2(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital	Badan Pusat Statistik	-	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggungjawab	Analisis target capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran para pihak
	kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.		Statistics Register)					

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

4.3 Capaian Target TPB Pilar Lingkungan Hidup

Pilar lingkungan hidup terdiri dari tujuan ke 6 (air bersih dan sanitasi layak), tujuan 11 (Kota dan pemukiman layak), tujaun 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab), tujuan ke 13 (penanganan perubahan iklim), dan tujuan 15 (ekosistem daratan). Hasil evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Gambar 25.

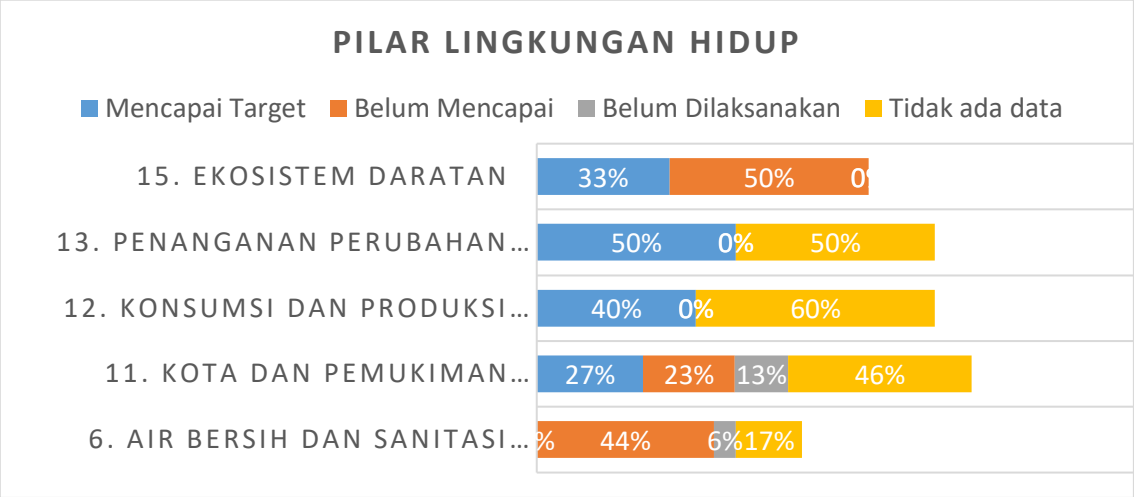

Gambar 29. Hasil evaluasi TPB pilar lingkungan hidup

Indikator pilar lingkungan hidup yang telah mencapai target nasional berjumlah 9 indikator (21%). Indikator yang belum mencapai target adalah 11 indikator (26%). Indikator yang belum dilaksanakan berjumlah 11 indikator (26%) dan indicator yang belum memiliki data berjumlah 11 indikator (26%).

Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 34.

Tabel 52. Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas LH dan SDA	Tahun 2016 : Ada Tahun 2017 : Ada Tahun 2018 : Ada Tahun 2019 : Ada Target Nasional 2019: Meningkat	Rp. 224.907.261	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	
11.b	Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Tahun 2016 : Ada Tahun 2017 : Ada Tahun 2018 : Ada Tahun 2019 : Ada Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 3.919.290.669	Rogram penanggulangan bencana	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Tahun 2016 : 0 Tahun 2017 : 0 Tahun 2018 : 0 Tahun 2019 : 0 Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 3.919.290.669	Rogram penanggulangan bencana	
12.5	Secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : Tahun 2019 : 23,2 ton/hari Target Nasional 2019: Meningkat	Rp. 50.000.000	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
					menjadi 20 Ton per hari			
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Tahun 2016 : Ada Tahun 2017 : Ada Tahun 2018 : Ada Tahun 2019 : Ada Target Nasional 2019: Menurun			
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Tahun 2016 : 0 orang Tahun 2017 : 0 orang Tahun 2018 : 0 orang Tahun 2019 : 0 orang Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 3.919.290.669	Rogram penanggulangan bencana	
15.1	Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas	Dinas Lingkungan Hidup	Tahun 2016 : 73,77%	-	-	BPKH Provinsi Gorontalo:

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.		lahan keseluruhan.		Tahun 2017 : 73,77% Tahun 2018 : 73,78 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat			Melakukan pendataan tutupan luas lahan hutan

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 35.

Tabel 53. Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	10,14%	Dinas PUPR	Tahun 2016 : 58,92% Tahun 2017 : 72,99% Tahun 2018 : 76% Tahun 2019 : 89,86% Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 100%	Rp. 13.545.325.500	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
		6.1.1(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	19,67%	Dinas PUPR	Tahun 2016 : 65,74 Tahun 2017 : 70,44 Tahun 2018 : 75,13 Tahun 2019 : 80,83 Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 100%	Rp. 13.545.325.500	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	27,10%	Dinas Perumahan Rakyat Permukiman	Tahun 2016 : 45,34% Tahun 2017 : 52,37%	Rp. 1.998.289.992	Program penataan bangunan dan lingkungannya	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		layanan sanitasi layak.		dan Pertanahan	Tahun 2018 : 61,41% Tahun 2019 : 72,90% Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 100%			
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	125 desa	Dinas Lingkungan Hidup	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 18 desa/kel Tahun 2018 : 33 desa/kel Tahun 2019 : 40 desa/kel Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Rp. 2.500.000.000	Program kawasan permukiman	
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	125 desa	Dinas Lingkungan Hidup	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 18 desa/kel Tahun 2018 : 33 desa/kel Tahun 2019 : 40 desa/kel Target Nasional 2019:	Rp. 2.500.000.000	Program kawasan permukiman	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
						(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)			
6.3	Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2 (a)	Kualitas air danau.	Cemar sedang	Dinas Lingkungan Hidup	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Cemar Sedang Tahun 2018 : Cemar Sedang Tahun 2019 : Cemar Sedang Target Nasional 2019: Membaiknya kualitas air di 15 Danau dan 5 Wilayah Sungai	Rp. 250.000.000	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
		6.3.2(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Cemar sedang	Dinas Lingkungan Hidup	Tahun 2016 : Cemar Sedang Tahun 2017 : Cemar Sedang Tahun 2018 : Cemar Sedang Tahun 2019 : Cemar Sedang Target Nasional 2019: Peningkatan kualitas air	Rp. 250.000.000	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
						sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.			
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	34,8%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	Tahun 2016 : 85% Tahun 2017 : 83,35% Tahun 2018 : 64,57% Tahun 2019 : 65,20 Target Nasional 2019: 3,7 Juta Rumah Tangga	Rp. 1.500.000.000	Program pengembangan perumahan Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi	11.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Meningkat	BPBD	Tahun 2016 : 6.307.065.000 Tahun 2017 : 1.160.000.000 Tahun 2018 : 135.000.000 Tahun 2019 : 690.000.000 Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran	Rp. 3.919.290.669	Program Penanggulangan Bencana	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.					Perpres 59/2017)			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Indikator yang belum dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Tabel 36.

Tabel 54. Indikator yang belum dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6.2	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR	Belum ada	Rp. 8.498.872.200	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Perusahaan pengembang perumahan: - Menyediakan fasilitas IPAL Komunal di kawasan perumahan yang dikembangkan
		6.2.1(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR	Belum ada	Rp. 8.498.872.200	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Perusahaan pengembang perumahan: - Menyediakan fasilitas IPAL Komunal di kawasan perumahan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
								yang dikembangkan
6.3	Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR	Belum ada	Rp. 8.498.872.200	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	
		6.3.1(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR	Belum ada	Rp. 8.498.872.200	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Perusahaan pengembang perumahan: - Menyediakan fasilitas IPAL Komunal di kawasan perumahan yang dikembangkan
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang	11.3.2(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	-	-	Swasta

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara							
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.		-	-	-	-
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BMKG	-	-	-	Badan Meteorologi dan Geofisika: - Menyediakan infrastruktur untuk peringatan dini cuaca, iklim dan kebencanaan - Memberikan informasi secara rutin dan berkala

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							tentang kondisi cuaca, iklim dan kebencanaan Perguruan Tinggi: Membangkan penelitian tentang peringatan dini cuaca, iklim dan kebencanaan
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
15.6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan		-	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.		pembagian keuntungan yang adil dan merata.					
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	BPKH

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Indikator yang belum memiliki data pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Tabel 36.

Tabel 55. Indikator yang belum memiliki data dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PUPR	-	Rp. 13.545.325.500	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Dinas PUPR DInas Kesehatan	-	Rp. 1.998.289.992	Program penataan bangunan dan lingkungannya	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	Dinas PUPR	-	Rp. 8.079.756.300	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR	-	-	-	BPDAS Bone Bolango BPKH Provinsi Gorontalo
6.5	Pada tahun 2030,	6.5.1(c)	Jumlah jaringan informasi	Dinas PUPR	-	Rp. 8.079.756.300	Program pengelolaan	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.		sumber daya air yang dibentuk.				sumber daya air (sda)	
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR	-	-	-	BPDAS Bone Bolango BPKH Provinsi Gorontalo
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas PUPR	-	Rp. 8.079.756.300	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak	BPBD	-	Rp. 3.919.290.669	Program Penanggulangan Bencana	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		bencana per 100.000 orang.					
		11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	-	Rp. 3.919.290.669	Program Penanggulangan Bencana	
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	Swasta industry yang menghasilkan limbah B3

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas Lingkungan Hidup				
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dinas Lingkungan Hidup				

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	prioritas nasional.							
12.8	Menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		-	-	-	-
15.3	Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup	-			BP DAS Bone Bolango BPKH Provinsi Gorontalo

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

4.4 Capaian Target TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola pemerintahan meliputi tujuan ke 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Capaian pada pilar ini adalah indicator yang telah mencapai target nasional 29%. Belum mencapai target 5% dan yang belum memiliki data sebesar 67%.

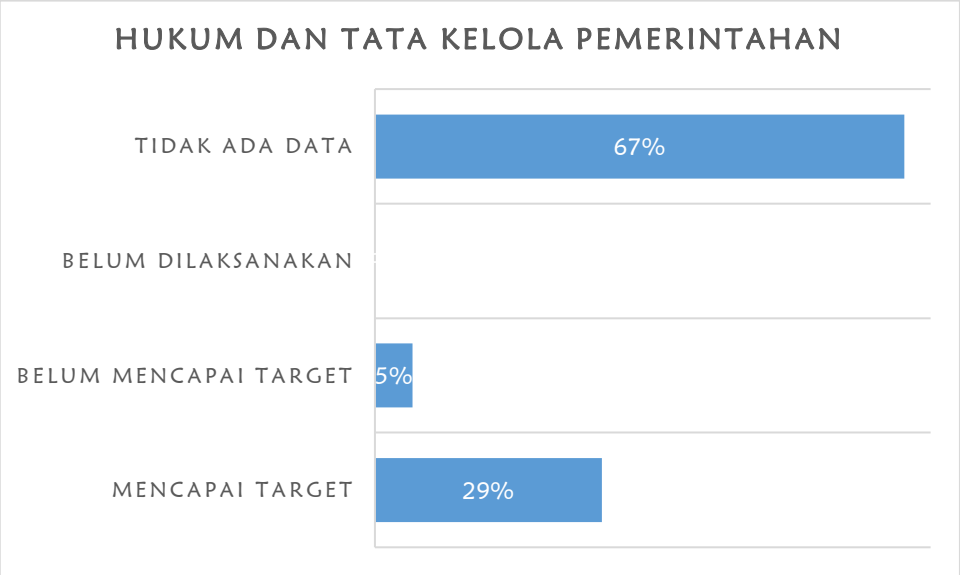

Gambar 30. Grafik hasil evaluasi pilar hukum dan tata kelola pemerintahan

Indikator yang sudah dilaknsanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola ditunjukkan pada Tabel 38.

Tabel 56. Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 93,65 Tahun 2018 : 92,83 Tahun 2019 : 95,46			
		16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tahun 2016 : WTP Tahun 2017 : WTP Tahun 2018 : WTP Tahun 2019 : WTP Target Nasional 2019: Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%			
		16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAPPEDA	Tahun 2016 : 58,77 Tahun 2017 : 1,19 Tahun 2018 : 1 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%			
		16.6.1(c)	Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.	Bagian Pengadaan	Tahun 2016 : 16,51 Tahun 2017 : 20,31 Tahun 2018 : 22,39			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
				Barang dan Jasa	Tahun 2019 : 100 Target Nasional :			
		16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Kesbangpol	Tahun 2016 : Tahun 2017 : Tahun 2018 : 50,98 Tahun 2019 : 53,74 Target Nasional 2019: Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%			
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tahun 2016 : 83,55 Tahun 2017 : 80,93 Tahun 2018 : 93,3 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp. 184.853.800	Program Pencatatan Sipil	
		16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tahun 2016 : 34,43 Tahun 2017 : 35,37 Tahun 2018 : 38,89 Tahun 2019 : 91% Target Nasional :	Rp. 184.853.800	Program Pencatatan Sipil	
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tahun 2016 : 90,25 Tahun 2017 : 90,86 Tahun 2018 : 100 Tahun 2019 :	Rp. 184.853.800	Program Pencatatan Sipil	

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
					Target Nasional 2019: Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Indikator yang sudah dilaknsanakan tapi belum mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola ditunjukkan pada Tabel 39.

Tabel 57. Indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	1,29	BAPPEDA	Tahun 2016 : Tahun 2017 : 3,71 Tahun 2018 : Tahun 2019 : Target Nasional 2019:	2.070.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan	Tidak meningkat		Tahun 2016 : 3,34 Tahun 2017 : 4	-	-	Partai Politik

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	representatif di setiap tingkatan.		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).			Tahun 2018 : 4 Tahun 2019 : Target Nasional 2019: Meningkat			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Indikator yang belum memiliki data pada pilar hukum dan tata kelola ditunjukkan pada Tabel 40.

Tabel 58. Indikator yang belum memiliki data pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		-	-	-	Polres Bone Bolango
		16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		-	-	-	Polres Bone Bolango
		16.1.3(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		-	-	-	Polres Bone Bolango
		16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di		-	-	-	Polres Bone Bolango

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
			area tempat tinggalnya					
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	-	-	-	Polres Bone Bolango
		16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	-	Rp. 268.372.000	Program perlindungan perempuan	
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	-	Rp. 268.372.000	Program perlindungan perempuan	
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan	16.6.2(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga	Kesbangpol	-	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	transparan di semua tingkat.		dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).					

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

4.5 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bone Bolango

Proses identifikasi isu strategis Kabupaten Bone Bolango dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Hasil evaluasi kemudian di diskusikan dalam FGD yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 di ruang rapat BAPPEDA Bone Bolango.

Hasil evaluasi pencapaian TPB di Kabupaten Bone Bolango diperoleh 74 indikator (33,64%) indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator yang telah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional berjumlah 47 indikator (21,36%). Indikator yang belum dilaksanakan berjumlah 22 indikator (10%). Indikator yang belum ada data sejumlah 77 indikator (35%), sehingga tidak dapat dianalisis.

Sebagai dasar dalam penetapan isu pembangunan berkelanjutan adalah tingkat kesenjangan/ketidaktercapaian terhadap indicator TPB. Hasil analisis diperoleh

Tabel 59. Isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango

No	Pilar		Isu PB
1	Sosial	1.	Tingkat kemiskinan
		2.	Jaminan kesehatan
		3	Jaminan social ketenagakerjaan
		4	Pemenuhan kebutuhan kaum disabilitas
		5	Akses terhadap sumber air minum layak masih kurang
		6	Akses terhadap sanitasi layak masih kurang
		7	Kepemilikan akta kelahiran masih rendah
		8	Bencana alam
		9	Anak kurang gizi
		10	Tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan
		11	Merokok pada anak
		12	Narkoba
		13	Sekolah SD dan SMP yang terakreditasi masih kurang
		14	Belum adanya pendampingan psikologis korban bencana sosial
		15	Belum persedianya kebutuhan dasar korban bencana sosial
2	Ekonomi	16	Persentase tenaga kerja formal masih kurang
		17	Terjadi peningkatan tingkat pengangguran
		18	Terjadi penurunan tenaga kerja sector industry manufaktur
		19	Tidak terjadi peningkatan individu yang menguasai telpon genggam
		20	Terjadi penurunan proporsi individu yang menggunakan internet
		21	Masih terdapat ketidakpuasan terhadap data statistik
		22	Belum tersedianya dermaga penyebrangan

No	Pilar		Isu PB
		23	Belum adanya Desa Mandiri di Kabupaten Bone Bolango
3	Lingkungan Hidup	24	Masih banyak desa yang belum melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
		25	Masih banyak desa yang belum melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
		26	Pencemaran air
		27	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak masih kurang
		28	Bencana alam
		29	Belum tersedianya infrastruktur air limbah komunal
		30	Belum tersedianya system pengolahan air limbah terpusat
		31	Belum tersedianya IPLT
		32	Belum tersedianya system peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
		33	Belum dikembangkan dan diterapkan green waste
		34	Belum adanya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
4	Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	35	Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) masih rendah

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Hasil analisis terhadap gap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjuta diperoleh 35 isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango.

Selanjutnya, dilakukan proses sintesis terhadap kriteria strategis isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi enam kriteria yaitu: (a) cakupan dampak luas; (b) multi pemangku kepentingan; (c) memerlukan kebijakan yang lebih tinggi; (d) dampak kumulatif; (e) dampak jangka panjang; dan (f) antar sektor. Isu pembangunan berkelanjutan dianggap bersifat strategis apabila memenuhi keenam kriteria tersebut.

Tabel 60. Proses sintesis isu pembangunan berkelanjutan dengan enam kriteria strategis

No	Isu PB	1	2	3	4	5	6	Jumlah
1.	Tingkat kemiskinan	√	√	√	√	√	√	6
2.	Jaminan kesehatan	-	-	-	-	-	-	0
3	Jaminan social ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	√	1
4	Pemenuhan kebutuhan kaum disabilitas	-	-	-	√	√	√	3
5	Akses terhadap sumber air minum	√	√	√	√	√	√	6

No	Isu PB	1	2	3	4	5	6	Jumlah
6	Akses terhadap sanitasi layak masih kurang	√	√	√	√	√	√	6
7	Kepemilikan akta kelahiran masih rendah	-	-	-	-	-	-	0
8	Bencana alam	√	√	√	√	√	√	6
9	Anak kurang gizi	√	√	√	√	√	√	6
10	Tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan	-	-	√	√	-	-	2
11	Merokok pada anak	-	-	-	√	√	-	2
12	Narkoba	√	√	√	√	√	√	6
13	Sekolah SD dan SMP yang terakreditasi masih kurang	-	-	-	-	√	-	1
14	Belum adanya pendampingan psikologis korban bencana sosial	√	√	-	√	√	√	5
15	Belum persedianya kebutuhan dasar korban bencana sosial	√	√	-	√	√	√	5
16	Persentase tenaga kerja formal masih kurang	√	√	√	√	√	√	6
17	Terjadi peningkatan tingkat pengangguran	√	√	√	√	√	√	6
18	Terjadi penurunan tenaga kerja sector industry manufaktur	√	√	-	√	√	√	5
19	Tidak terjadi peningkatan individu yang menguasai telpon genggam	-	-	-	-	-	-	0
20	Terjadi penurunan proporsi individu yang menggunakan internet	-	√	√	-	-	√	3
21	Masih terdapat ketidakpuasan terhadap data statistik	-	-	-	-	-	-	0
22	Belum tersedianya dermaga penyebrangan	√	√	√	√	√	√	6
23	Belum adanya Desa Mandiri di Kabupaten Bone Bolango	√	√	√	√	√	√	6
24	Masih banyak desa yang belum melakukan Sanitasi	√	-	-	√	√	-	3

No	Isu PB	1	2	3	4	5	6	Jumlah
	Total Berbasis Masyarakat (STBM)							
25	Masih banyak desa yang belum melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	√	-	-	√	√	-	3
26	Pencemaran air	√	√	√	√	√	√	6
27	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak masih kurang	√	-	-	-	-	-	0
28	Bencana alam	√	√	√	√	√	√	6
29	Belum tersedianya infrastruktur air limbah komunal	√	√	-	√	√	√	5
30	Belum tersedianya system pengolahan air limbah terpusat	√	√	-	√	√	√	5
31	Belum tersedianya IPLT	√	√	-	√	√	√	5
32	Belum tersedianya system peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	√	√	√	√	√	√	6
33	Belum dikembangkan dan diterapkan green waste	√	√	-	√	√	√	5
34	Belum adanya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	√	-	-	√	√	√	4
35	Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) masih rendah	√	√	√	√	√	√	6

Keterangan :

(1) cakupan dampak luas; (2) multi pemangku kepentingan; (3) memerlukan kebijakan yang lebih tinggi; (4) dampak kumulatif; (5) dampak jangka panjang; dan (6) antar sektor

Berdasarkan Tabel 43 di atas, maka isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango adalah:

1) Tingkat kemiskinan
2) Kualitas air
3) Bencana alam
4) Sanitasi lingkungan
5) Sistem pengolahan limbah belum tersedia
6) Lapangan pekerjaan masih kurang
7) Infrasturktur masih kurang
8) Perilaku korupsi

Hasil analisis berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Pasal 9 ayat (1) yaitu:

1. Karakteristik wilayah
2. Tingkat pentingnya potensi dampak
3. Keterkaitan antar isu PB
4. Keterkaitan dengan materi muatan KRP
5. Muatan RPPLH
6. Hasil KLHS RPJMD hirarki di atasnya

Analisis isu strategis pembangunan berkelanjutan melalui pemberian skor dan uji publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan Pokja KLHS Kabupaten Bone Bolango dan difasilitasi oleh Tenaga Ahli. Kegiatan uji public dilakukan pada tanggal 17 November 2020 di ruang rapat Bappeda Kabupaten Bone Bolango. Hasil analisis ditunjukkan pada table 56.

Tabel 61. Hasil analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kabupaten Bone Bolango	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Gorotalo
Tingkat kemiskinan	Topografi: - Kabupaten Bone Bolango pada umumnya memiliki kemiringan lereng 15-25% (29,96%) - Wilayah berbukit di kecamatan Suwawa Timur, Kabila Bone, Bone Raya dan Bone	Potensi terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan	Faktor Penyebab: - Kurangnya lapangan kerja baik formal maupun tenaga kerja sector industry manufactur - Akses terhadap pembiayaan UMKM masih rendah Akibat: - Tingkat kesehatan menurun - Terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam - Pemukiman tidak layak huni	- Program pada bidang kesejahteraan dan pemerataan ekonomi - Program pada bidang pendidikan - Program pada bidang kesehatan	Belum ada	
Menurunnya kualitas air	Hidrologi: - Kabupaten Bone Bolango memiliki 4 (empat) Cekungan Air Tanah (CAT): CAT Bone, CAT Gorontalo, CAT Pinogu, CAT Tombulilato - Terdapat 25 DAS dengan luas 188.766,70 Ha	- Akses terhadap sumber air bersih menjadi berkurang - Tingkat kesehatan menurun	Faktor Penyebab: - Belum tersedianya system pengolahan limbah - IPLT belum tersedia - Penerapan STBM belum maksimal - Penerapan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) belum maksimal Akibat: - Tingkat kesehatan menurun	- Program pada bidang lingkungan hidup - Program pada bidang kesehatan	Belum ada	

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kabupaten Bone Bolango	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Gorotalo
Bencana alam	Topografi: - Kabupaten Bone Bolango pada umumnya memiliki kemiringan lereng 15-25% (29,96%) - Wilayah berbukit di kecamatan Suwawa Timur, Kabila Bone, Bone Raya dan Bone Hidrologi: - Kabupaten Bone Bolango memiliki 4 (empat) Cekungan Air Tanah (CAT): CAT Bone, CAT Gorontalo, CAT Pinogu, CAT Tombulilato - Terdapat 25 DAS dengan luas 188.766,70 Ha Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango yaitu Entisols, Inceptisols, Alfisols, Mollisols.	- Terjadi kerugian ekonomi - Tingkat kemiskinan semakin meningkat - Rusaknya SDA - Tingkat kesehatan menurun	Faktor Penyebab: - Eksploitasi sumber daya hutan - Pengawasan terhadap ijin pertambangan masih kurang - Pembukaan lahan untuk pertanian tidak terkontrol Akibat: - Tingkat kesehatan menurun - Tingkat kemiskinan meningkat	- Program bidang lingkungan hidup	Belum ada	
Sanitasi layak masih kurang	Hidrologi: - Kabupaten Bone Bolango memiliki 4 (empat) Cekungan Air Tanah (CAT): CAT Bone, CAT Gorontalo, CAT Pinogu, CAT Tombulilato - Terdapat 25 DAS dengan luas 188.766,70 Ha	- Terjadi penurunan kesehatan masyarakat	Faktor Penyebab: - Tingkat kemiskinan - Akses terhadap air bersih masih kurang Akibat: - Tingkat kesehatan menurun	- Program bidang kesehatan - Program bidang lingkungan hidup	Belum ada	

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kabupaten Bone Bolango	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Gorotalo
Sistem pengolahan limbah belum tersedia	Hidrologi: - Kabupaten Bone Bolango memiliki 4 (empat) Cekungan Air Tanah (CAT): CAT Bone, CAT Gorontalo, CAT Pinogu, CAT Tombulilato - Terdapat 25 DAS dengan luas 188.766,70 Ha	- Terjadi penurunan kualitas air - Tingkat kesehatan menurun	Faktor Penyebab: - Akses terhadap sanitasi masih kurang - Akses terhadap air bersih masih kurang Akibat: - Tingkat kesehatan menurun	- Program bidang kesehatan - Program bidang lingkungan hidup	Belum ada	
Ketenagakerjaan	Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango yaitu Entisols, Inceptisols, Alfisols, Mollisols. Topografi: - Kabupaten Bone Bolango pada umumnya memiliki kemiringan lereng 15-25% (29,96%) - Wilayah berbukit di kecamatan Suwawa Timur, Kabila Bone, Bone Raya dan Bone Hidrologi: - Kabupaten Bone Bolango memiliki 4 (empat) Cekungan Air Tanah (CAT): CAT Bone, CAT Gorontalo, CAT Pinogu, CAT Tombulilato - Terdapat 25 DAS dengan luas 188.766,70 Ha	- Tingkat kemiskinan semakin meningkat - Terjadi eksploitasi terhadap SDA	Faktor Penyebab: - Tingkat pendidikan masih rendah - Peluang kerja masih rendah - Industri manufaktur masih belum berkembang Akibat: - Tingkat kemiskinan meningkat	- Program bidang ekonomi - Program bidang pendidikan	Belum ada	
Infrastruktur	Topografi:	- Tingkat kesenjangan antar	Faktor Penyebab:	- Program bidang pekerjaan umum	Belum ada	

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kabupaten Bone Bolango	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Gorotalo
	- Kabupaten Bone Bolango pada umumnya memiliki kemiringan lereng 15-25% (29,96%) - Wilayah berbukit di kecamatan Suwawa Timur, Kabila Bone, Bone Raya dan Bone - Wilayah Kabupaten Bolango yang terpisah-pisah secara geografis membutuhkan infrastruktur jalan	wilayah meningkat	- Kondisi geografis daerah Akibat: - Gap antar wilayah semakin besar	- Program bidang ekonomi		

Sumber: hasil analisis, 2020

4.6 Isu Prioritas dan Arah Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango

Isu-isu strategis tersebut kemudian dipilih isu yang paling prioritas. Analisis isu prioritas dilakukan melalui pemberian skor terhadap isu-isu strategis dengan mengacu pada parameter yang ditetapkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) yaitu :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan dan jasa ekosistem
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7. Kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
10. Ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan masyarakat dan masyarakat hukum adat

Skor isu prioritas adalah :

Skor 1 : Sangat tidak berpengaruh
Skor 2 : Tidak berpengaruh
Skor 3 : Sedang
Skor 4 : Berpengaruh
Skor 5 : Sangat berpengaruh

Berdasarkan hasil skor terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan, maka ditetapkan isu prioritas pembangunan berkelenjutan yaitu :

1. Pencemaran Air
2. Bencana alam
3. Sanitasi lingkungan
4. Tingkat kemiskinan
5. Sanitasi layak

Berdasarkan hasil evaluasi TPB dan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, maka arah tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango seperti ditunjukkan pada Gambar 31.

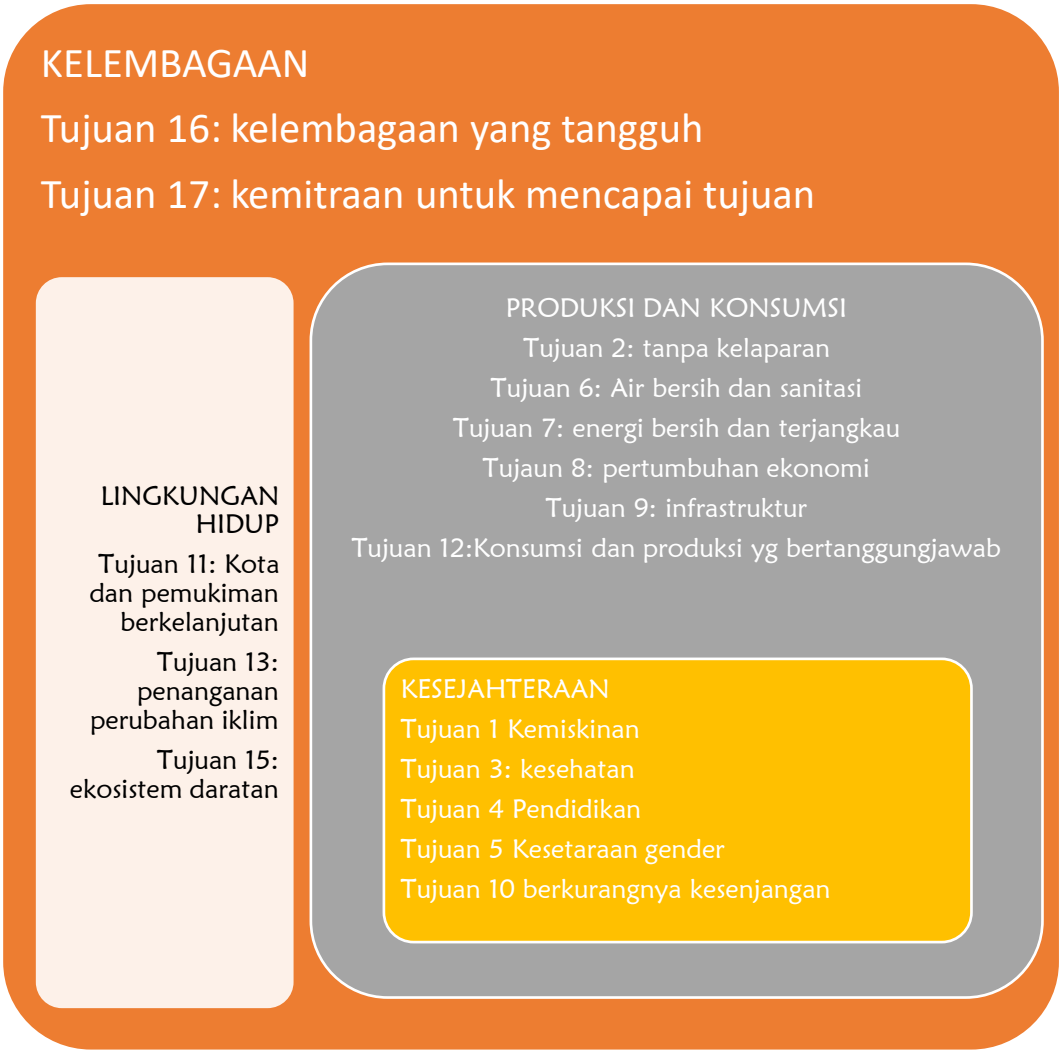

Gambar 31. Arah TPB Kabupaten Bone Bolango

Hasil sintesis antara isu strategis dalam muatan KLHS menunjukkan adanya tantangan yang signifikan di Kabupaten Bone Bolango dalam mencapai beberapa target TPB khususnya TPB no. 1, 2, 3, 6 dan 11.

4.7 Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB

Pembagian peran para pihak di Kabupaten Bone Bolango ditunjukkan pada Tabel 62.

Tabel 62. Pembagian peran para pihak dalam pencapaian TPB

No	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
	PERBANKAN		

No	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
1.	Bank Indonesia	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
2.	Bank SULUTGO	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
3.	Bank BNI	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
4.	Bank Mandiri	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
5.	Bank BRI	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
6.	Bank Mandiri Syariah	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
7.	Bank Muamalat	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
8.	Maybank	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
9.	Bank Tabungan Negara	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
10.	Bank BTPN	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
11.	Bank BCA	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
12.	Bank Danamon	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
13.	Bank Mega	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
14.	Bank Sinar Mas	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
	PERGURUAN TINGGI		
1.	Universitas Negeri Gorontalo	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
2.	STMIK Ichsan	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
3.	STIA Bina Taruna Gorontalo	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan

No	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
4.	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
	LEMBAGA/ASOSIASI/FORUM/ORMAS/ LSM		
1.	Ikatan Dokter Indonesia	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
2.	PGRI	Pelayanan pendidikan	Pendidikan
3.	Ikatan Bidan Indonesia	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
4.	Dekranasda	Pemberdayaan UMKM	Ekonomi
5.	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Pemberdayaan nelayan	Ekonomi
6.	KADIN Gorontalo		Ekonomi
7.	HIPMI Gorontalo		Ekonomi
8.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Pemberdayaan masyarakat	
9.	Tim Penggerak PKK	Pemberdayaan masyarakat	
10	RRI Gorontalo	Sosialisasi Program	
11	TVRI Gorontalo	Sosialisasi Program	
12	MIMOZA TV	Sosialisasi Program	
13	Gorontalo TV	Sosialisasi Program	
14	PT. PLN (Persero) UP3 Gorontalo		Kelistrikan
15	Baznas	Filan tropi	
	RUMAH SAKIT		
1.	RS ALoei Saboe	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
2.	RS Toto Kabila	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
	SWASTA		
1.	PT. Tenaga Listrik Gorontalo	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
2.	PT. Gorontalo Mineral	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
3.	PT. Eksplorasi Indo Nusa Jaya	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
4	PT Panah Emas	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
5	PT Bone Bolango Energi	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
6	PT Celebes Bolango Mineral	Penyedia jasa CSR	Ekonomi

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2020

BAB V. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTA

Dalam pecapaian TPB di Kabupaten Bone Bolango hingga Tahun 2026, diperlukan upaya tambahan. Upaya tambahan dilaksanakan untuk permasalahan air, pangan, hunian layak, persampahan dan limbah cair dengan melihat pada kondisi eksisting dan target, serta kondisi daya dukung lingkungan hidup. Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan muatan daya dukung pangan dan penyediaan air, hunian layak serta masalah persampahan dan limbah cair.

5.1 Analisis Daya Dukung Lingkungan Hidup

Hasil analisis daya dukung air di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa daya dukung air hingga Tahun 2030 masih surplus (lihat Gambar 13). Kondisi ketersediaan air di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 S_A (948.336.259,4 m^3/tahun) > D_A (264.534.400 m^3/tahun), sehingga berdasarkan kriteria Permen LH No. 17 Tahun 2009, status daya dukung air di wilayah Kabupaten Bone Bolango saat ini dinyatakan surplus. Proyeksi hingga Tahun 2030, kondisi daya dukung air di Kabupaten Bone Bolango masih surplus.

Demikian pula dengan daya dukung lahan (Gambar 14). Ketersediaan lahan (S_l) sebesar 95915,71 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 sebesar 165334 jiwa. Luas lahan yang dibutuhkan untuk hidup layak adalah 0,2194. Kebutuhan lahan Kabupaten Bone Bolango diperoleh 36289,29 Ha. Dengan demikian ketersediaan lahan > kebutuhan lahan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikaji terhadap daya dukung air dan daya dukung lahan adalah :

- Tujuan 2 : tanpa kelaparan
- Tujuan 3 : kehidupan sehat sejahtera
- Tujuan 6 : air bersih dan sanitasi layak
- Tujuan 11: Kota dan pemukiman berkelanjutan
- Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- Tujuan 13 : penanganan perubahan iklim

- Tujuan 15 : ekosistem daratan

Hasil evaluasi capaian indikator 1.4.1(d) dan 6.1.1(a) persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan ditunjukkan pada Gambar 32

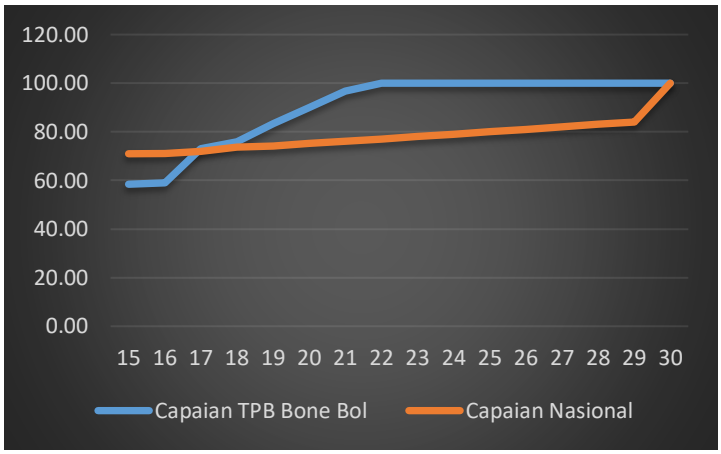

Gambar 32. Hasil evaluasi capaian dan prediksi indikator akses rumah tangga terhadap layanan air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango

Hasil analisis capaian indicator 11.1.1(a) akses terhadap hunian layak menunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi rumah tangga yang memiliki akses hunian layak (Gambar 33).

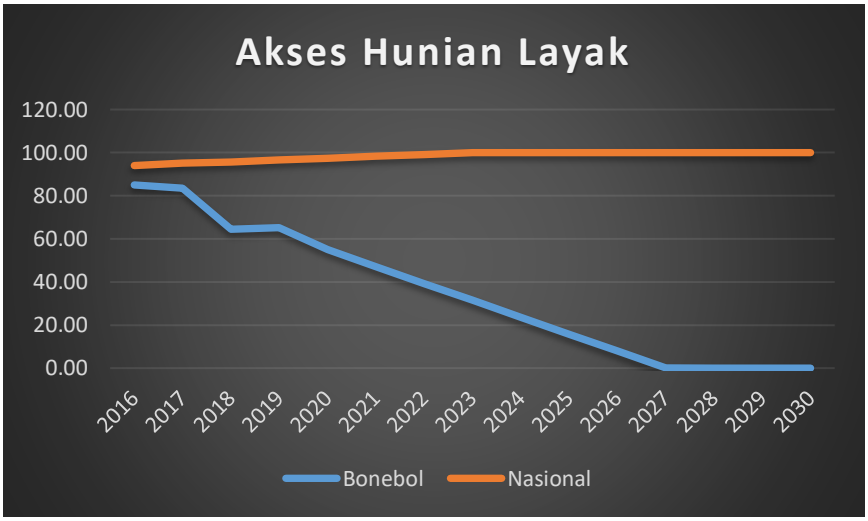

Gambar 33. Hasil evaluasi capaian dan prediksi indikator akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau

Gambar 33 menunjukkan adanya tren penurunan akses rumah tangga terhadap hunian layak. Hal ini memerlukan upaya tambahan pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk pemenuhan akses hunian layak. Kondisi daya dukung lahan pemukiman di Bone Bolango masih surplus hingga Tahun 2030. Analisis daya dukung lahan pemukiman per kecamatan menunjukkan beberap wilayah

kecematan mengalami defisit daya dukung lahan pemukiman. Kecamatan yang deficit terhadap daya dukung lahan pemukiman adalah Kecamatan Tapa, Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bone, Kecamatan Bulawa (lihat Tabel 27).

Indikator-indikator yang terkait kerawanan pangan tidak ada data, sehingga tidak dapat dilakukan analisis. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya upaya tambahan untuk proses pendataan.

5.2 Analisis Risiko/dampak Lingkungan

Dampak lingkungan hidup merupakan pengaruh perubahan lingkungan hidup akibat KRP, sedangkan risiko lingkungan hidup merupakan kemungkinan atau tingkat kejadian, bahaya, konsekuensi yang ditimbulkan kondisi lingkungan yang jadi ancaman ekosistem, kesehatan dan keselamatan manusia.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup adalah:

- Tujuan 8 : Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
  Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
  Indikator 8.9.1 (a) : jumlah wisatawan mancanegara
  Indikator 8.9.1 (b): jumlah kunjungan wisatawan nusantara
- Tujuan 9 yaitu industry, inovasi dan pembangunan infrastruktur.
  Target 9.1 yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Indikator pada target ini adalah:

  Indikator 9.1.1(b) : panjang pembangunan jalan tol
  Indikator 9.1.1(c) : panjang jalur kereta api
  Indikator 9.1.2(b) : panjang dermaga penyebrangan
  Indikator 9.1.2 (c): jumlah pelabuhan strategis
  Di wilayah Kabupaten Bone Bolango, indikator-indikator tersebut belum dilaksanakan pada periode 2021 – 2026.

Analisis risiko dari pencapaian tujuan tersebut antara lain:

- Pengembangan jaringan jalan Bulontala – Botutonuo, pelebaran Jalan Butu – Bongoime, jalan inspeksi Tulabolo – Pinogu, Jalan Tulabolo - Pinogu di

Kabupaten Bone Bolango akan meningkatkan jangkauan aksesibilitas masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan akan memicu tumbuhnya aktivitas baru di sekitar jalan yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan di sepanjang jalan.

Ruas jalan Tulabolo – Pinogu akan melewati kawasan hutan lindung/Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBW). Pengembangan jalan berdampak terhadap alih fungsi lahan dan potensi terjadinya eksploitasi sumber daya alam di TNBW. Alih fungsi lahan dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga menyebabkan terjadinya runoff dan banjir yang berdampak negatif bagi masyarakat di sekitar jalan. Pembangunan jalan akan meningkatkan jumlah kendaraan yang melintas di daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan emisi gas polutan. Kegiatan pembangunan jalan menimbulkan dampak negatif misalnya kebisingan dan polusi udara bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek.

- Pembangunan infrasturktur olah raga GOR Boludawa, Stadion Bone Bolango, berpotensi menimbulkan dampak alih fungsi lahan.

5.3 Analisis Jasa Ekosistem

Kondisi jasa ekosistem penyedian pangan di Kabupaten Bone Bolango masih belum terlampaui. Akan tetapi pada beberapa kecamatan terlampaui yaitu Kecamatan Botupingge, Bulango Selatan, Bulango Timur, Kabila, kabila Bone, Suwawa, Tapa, dan Kecamatan Tilong Kabila (lihat Tabel 33). Jasa ekosisten penyedian air di Kabupaten Bone Bolango yang terlampaui yaitu Kecamatan Bulango Selatan dan Kecamatan Kabila (lihat Tabel 34).

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersesuaian dengan jasa ekosistem penyedia pangan adalah:

- Tujuan 2 : tanpa kelaparan

  Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

  Indikator 2.1.1* : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

  Indikator 2.1.1(a) : Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.

  Indikator 2.1.2* : Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

  Indikator 2.1.2(a) : Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.

Indikator 2.2.1(a) : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
Indikator 2.2.2* : Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.

Indikator-indikator yang terkait kerawanan pangan tidak ada data, sehingga tidak dapat dilakukan analisis. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya upaya tambahan untuk proses pendataan.

Kondisi kualitas air sungai yang merupakan sumber air PDAM di Kabupaten Bone Bolango dalam kondisi cemar sedang. Kegiatan pertambangan di hulu DAS Bone berdampak pada tercemarnya Sungai Bone. Selain itu juga, kebiasaan buang air besar di sungai, menyebabkan tingginya kandungan e coli dan coliform di air sungai.

5.4 Analisis Sumber Daya Alam

Kabupaten Bone Bolango merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi. Sumber daya mineral yang tersebar di Kecamatan Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Bone Raya, Suwawa Tangah, dan Kecamatan Bone Pantai. Meningkatnya penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dalam jangka panjang penurunan kualitas lingkungan ini akan berdampak pada inefisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di Kabupaten Bone Bolango dalam mendukung kegiatan pembangunan.

Adapun sumber daya alam lokal yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan antara lain galian C yang tersebar di Botubarani, Dutohe dan Suwawa Selatan.

5.5 Analisis Perubahan Iklim

Data Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone Bolango khususnya Kecamatan Tilong Kabila (Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementrian LHK, 2019).

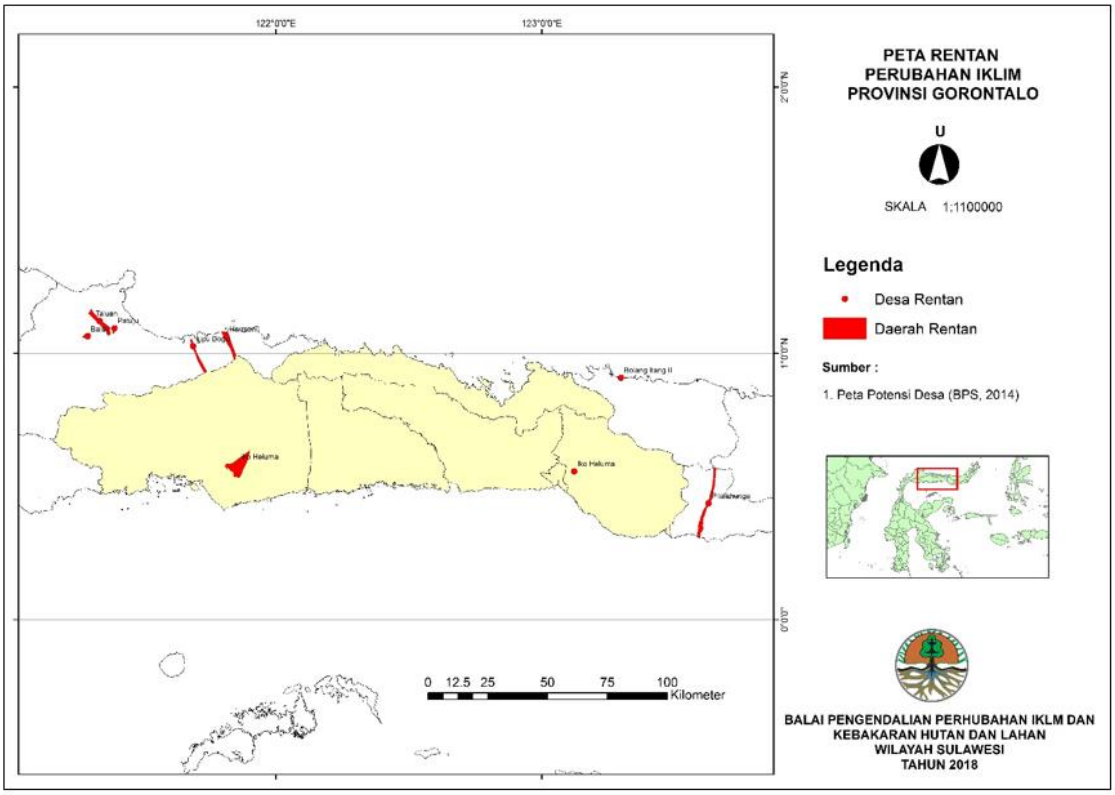

Long	Lat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kerentanan
123°7.33 '19.56" E	0°33.46 '27.47"N	GORONTALO	POHUWATO	PATILANGGO	Iko Heluma	5
121°51.43 '25.57" E	0°35.07 '4.01"N	GORONTALO	BONE BALANGO	TILONG KABILA	Iko Heluma	5

Gambar 34. Peta Kerentanan Iklim Provinsi Gorontalo

5.6 Analisis Keanekaragaman Hayati

Kabupaten Bone Bolango merupakan Kabupaten Konservasi. Di wilayah Kabupaten Bone Bolango terdapat Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBW). Potensi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone adalah; Flora terdiri dari 400 jenis pohon, 241 jenis tumbuhan tinggi, 120 jenis efifit dan terdapat 24 jenis anggrek. Tumbuhan endemik yaitu; palem matayangan, kayu hitam dan bunga bangkai(Amophaphallus compamulatus). Tumbuhan yang umum adalah cempaka, kenanga, agates, dan tanaman hias.Taman Nasional Bogani Nani Wartabone memiliki 24 jenis mamalia, 64 jenis aves, 11 jenis reptile. Mamalia (satwa endemik) : monyet hitam/yaki (Macaca nigra), Monyet Dumoga Bone, babirusa, kelelawar bone, kus-kus besar (Palanger ursinus), anoa kecil (B.quarlesi). Di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tercatat 200 – 225 jenis burung. Reptil : ular kobra, king kobra (N. hammah), ular belang, katak pohon (Rhacophorus monticola), ikan : ikan mas (Cyprinus carpio), bekicot (Achatina fulica) (Kawuwung, 2010).

Pengembangan wisata alam Taman Nasional di Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur perlu menjadi perhatian khusus. Pengawasan terhadap pengembangan wisata alam tersebut diperketat, sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam di taman nasional.

Penebangan pohon secara besar-besaran yang tidak terkendali dan adanya pertambangan di dalam taman menyebabkan seringnya terjadi banjir di daerah Gorontalo sampai di pusat kota. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan petugas penjaga hutan guna mengontrol kawasan hutan yang luas sehingga penebangan dapat diatasi dan pengambilan spesies-spesies secara berlebihan misalnya anoa, burung tarsius dll dapat di tekan karena akan mengancam spesies-spesies hutan (Kawuwung, 2010).

Tabel 63. Hasil pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap enam muatan KLHS

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
1	Tanpa Kemiskinan					
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus	Dampak: - Alih fungsi lahan - Berkurangnya daerah resapan - runoff dan banjir Risiko: - Wilayah rawan banjir tinggi : Kecamatan Kecamatan Bulango Timur; Kecamatan Bulango Utara; Kecamatan Tapa;	Tidak tersedia data jasa ekosistem pengaturan iklim	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
			Kecamatan Bulango Selatan, Suwawa, Kec. Suwawa Selatan, Kec. Suwawa Timur,Kec. Suwawa Tengah, Kec. Kabila Bone, Kec. Bone Pantai, Kec. Kabila dan Kec. Tilong Kabila			
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus Pengembangan peternakan ke wilayah dengan daya dukung peternakan tinggi yaitu Kec. Bulango Ulu (potensi pengembangan 26.089 ekor), Kec. Kabila (Potensi pengembangan 16.250 ekor), Kecamatan Tilong Kabila (potensi pengembangan 13.127 ekor) (Lihat Tabel 24)	Pengembangan peternakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan berisiko meningkatnya gas methan di udara yang merupakan salah satu gas rumah kaca.	Pengembangan lokasi pertanian di wilayah D3TLH jasa sekosistem penyedia pangan terlampaui yaitu Kecamata Botupingge, Bulango Selatan, Bulango Timur, Kabila, Kabila Bone, Suwawa, Tapa, Tilong Kabila	Tidak ada data perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
2	**Tanpa Kelaparan**					
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus Pengembangan peternakan ke wilayah dengan daya dukung peternakan tinggi yaitu Kec. Bulango Ulu (potensi pengembangan 26.089 ekor), Kec. Kabila (Potensi pengembangan 16.250	-	Pengembangan lokasi pertanian di wilayah D3TLH jasa sekosistem penyedia pangan terlampaui yaitu Kecamata Botupingge, Bulango Selatan, Bulango Timur, Kabila, Kabila Bone, Suwawa, Tapa, Tilong Kabila	-	-

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
		ekor), Kecamatan Tilong Kabila (potensi pengembangan 13.127 ekor) (Lihat Tabel 24)				
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus	-	Pengembangan lokasi pertanian di wilayah D3TLH jasa sekosistem penyedia pangan terlampaui yaitu Kecamata Botupingge, Bulango Selatan, Bulango Timur, Kabila, Kabila Bone, Suwawa, Tapa, Tilong Kabila	-	-
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus Pengembangan peternakan ke wilayah dengan daya dukung peternakan tinggi yaitu Kec. Bulango Ulu (potensi pengembangan 26.089 ekor), Kec. Kabila (Potensi pengembangan 16.250 ekor), Kecamatan Tilong Kabila (potensi pengembangan 13.127 ekor) (Lihat Tabel 24)	Peningkatan produktivitas pertanian berdampak: - Alih fungsi lahan - Berkurangnya daerah resapan - runoff dan banjir - Pencemaran air permukaan menurun akibat limbah pertanian Risiko: Risiko: Wilayah rawan banjir tinggi : Kecamatan Kecamatan Bulango Timur; Kecamatan Bulango Utara; Kecamatan Tapa; Kecamatan Bulango Selatan, Suwawa, Kec. Suwawa Selatan, Kec. Suwawa Timur,Kec. Suwawa Tengah, Kec. Kabila Bone, Kec. Bone	Pengembangan lokasi pertanian di wilayah D3TLH jasa sekosistem penyedia pangan terlampaui yaitu Kecamata Botupingge, Bulango Selatan, Bulango Timur, Kabila, Kabila Bone, Suwawa, Tapa, Tilong Kabila	Alih fungsi lahan dapat berakibat pengurangan sarapan karbon sehingga suhu bumi semakin panas	-

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
			Pantai, Kec. Kabila dan Kec. Tilong Kabila			
3	Kehidupan Sehat Sejahtera	Target tidak terkait D3TLH	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan berdampak: - Pencemaran air permukaan menurun akibat limbah fasilitas kesehatan - Pencemaran udara akibat pembakaran limbah medis Risiko: Limbah cair yang berasal dari RS Toto berisiko terjadinya pencemaran air di sekitar lokasi rumah sakit. Limbah cair dan limbah medis puskesmas yang tidak dikelol akan berdampak terhadap lingkungan	Program pengembangan fasilitas kesehatan dapat menimbulkan pencemaran yang merusak jasa ekosistem penjernihan air	Pembakaran limbah padat dari fasilitas kesehatan berakibat peningkatan polutan di udara	-
4	Pendidikan berkualitas	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
5	Kesetaraan gender	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak					
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Daya dukung air surplus	Dampak: - Pembangunan jaringan perpipaan berdampak terhadap gangguan lalulintas - Pembangunan IPA akan berdampak pada gangguan biota perairan sungai	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem penjernihan air	-	-

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Daya dukung air surplus	Dampak: - Pembangunan jaringan perpipaan berdampak terhadap gangguan lalulintas - Pembangunan IPA akan berdampak pada gangguan biota perairan sungai	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem penjernihan air	-	-
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Daya dukung air surplus	Program pengembangan system pengelolaan air limbah akan berdampak: - Alih fungsi lahan - Terpeliharanya kualitas air	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem penjernihan air	-	-
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Daya dukung air surplus	Dampak: - Pembangunan jaringan perpipaan berdampak terhadap gangguan lalulintas - Pembangunan IPA akan berdampak pada gangguan biota perairan sungai	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem penjernihan air	-	-
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Target tidak terkait D3TLH	- Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
7	Energi Bersih dan Terjangkau					
7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
9	Industri, inovasi dan infrastruktur					
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Pembangunan jalan tol, rel kereta, pelabuhan stategis belum dilaksanakan pada periode 2021-2026	-	-	-	-
10	Berkurangnya kesenjangan	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan					
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Daya dukung lahan untuk pemukiman surplus. Kecamatan yang daya dukung lahan pemukiman deficit yaitu Kecamatan Tapa, Bulango Ulu, Kabila, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, Bone dan Kecamatan Bulawa	Dampak: - Alih fungsi lahan - Berkurangnya daerah resapan - runoff dan banjir - Meningkatnya bangkitan lalu lintas - Kemacetan - emisi gas polutan - Peningkatan timbulan limbah cair domestik dan sampah - Peningkatan kebutuhan air bersih Risiko: - Wilayah rawan banjir tinggi : Kecamatan Kecamatan Bulango Timur; Kecamatan Bulango Utara; Kecamatan Tapa; Kecamatan Bulango Selatan, Suwawa, Kec. Suwawa Selatan, Kec.	Adanya pemanfaatan sumber daya alam lokal sebagai bahan baku pembangunan kawasan peruntukan permukiman	Tidak tersedia data	Tidak tersedia data

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
			Suwawa Timur,Kec. Suwawa Tengah, Kec. Kabila Bone, Kec. Bone Pantai, Kec. Kabila dan Kec. Tilong Kabila			
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Daya dukung air surplus		Jasa ekosistem pengaturan untuk penjernihan udara		
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab					
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Daya dukung air surplus	Dampak: - Terpelharanya kualitas air dan udara	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem pengaturan penjernihan air Jasa ekosistem pengaturan penjernihan udara		
13	Penanganan perubahan iklim					
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Telah menyusun dokumen strategis pengurangan risiko bencana			Tidak ada data	
15	Ekosistem daratan	Daya dukung lahan surplus Daya dukung air surplus	Dampak: - Terpeliharanya jasa ekosistem penyedia air - Mencegah terjadinya bencana Risiko: Wilayah rawan banjir tinggi : Kecamatan Kecamatan Bulango	Meliputi seluruh jasa ekosistem : jasa penyedia, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung	Meningkatkan adaptasi perubahan iklim	Biodiversity terjaga

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
			Timur; Kecamatan Bulango Utara; Kecamatan Tapa; Kecamatan Bulango Selatan, Suwawa, Kec. Suwawa Selatan, Kec. Suwawa Timur,Kec. Suwawa Tengah, Kec. Kabila Bone, Kec. Bone Pantai, Kec. Kabila dan Kec. Tilong Kabila			
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity

BAB VI. ALTERNATIF REKOMENDASI KLHS UNTUK RPJMD KABUPATEN BONE BOLANGO

Alternatif adalah usulan-usulan pengganti KRP untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk penajaman rumusan RPJMD.

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2016, perumusan alternatif kebijakan rencana, program RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021 – 2026 berupa:

a. Perubahan tujuan atau target;
b. Perubahan strategi pencapaian target;
c. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
d. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
e. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
f. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
g. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup

6.1 Arah Kebijakan Kabupaten Bone Bolango

6.1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Dalam proses penyusunan RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;

3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performace budgeting*) yang berorientasi pada hasil (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu :

1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Selain pendekatan-pendekatan tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 – 2026 juga disinergikan dengan agenda global yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Sinergitas SDGs kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 – 2026 bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Oleh karenanya, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026, dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, serta isu-isu global.

Penyusunan RPJMD dilakukan berbasis pada penerapan e-planning melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam

penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 disusun secara berkesinambungan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan Penyusunan RPJMD
   Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.
2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
   Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program OPD dan lintas OPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.
3) Penyusunan Rancangan RPJMD
   Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
   Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Bone Bolango.
5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
   Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala PD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil

Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Bone Bolango diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Gorontalo.

6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
Tahapan ini meliputi proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021-2026 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah.

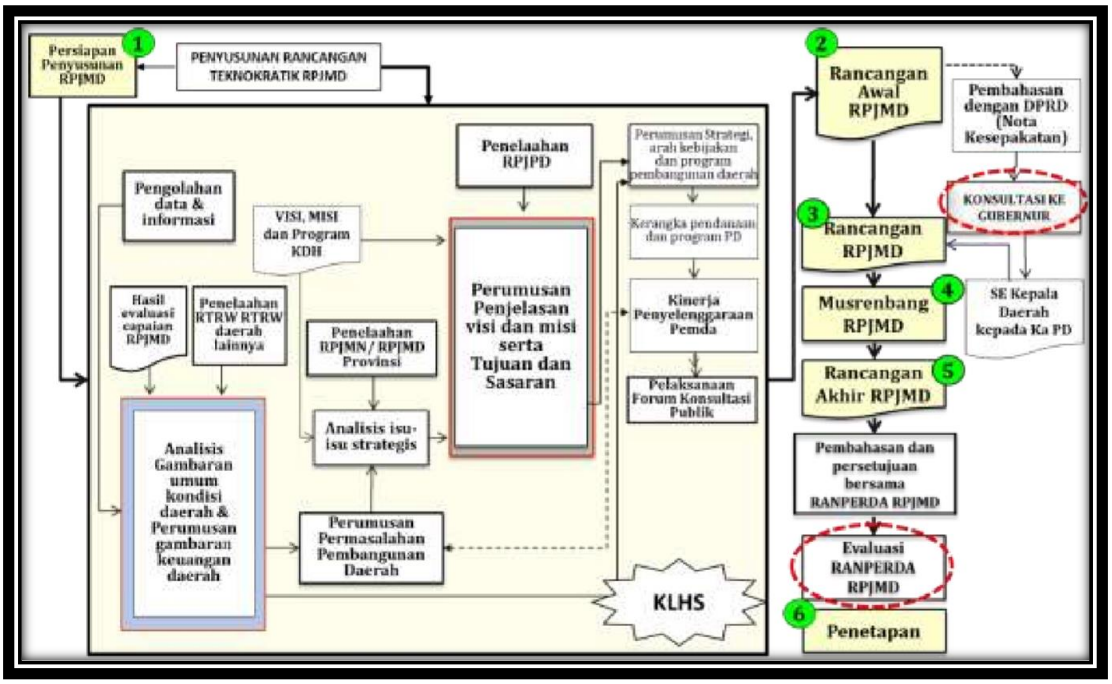

Gambar 35. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango

6.1.2 Visi, Misi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bone Bolango dalam RPJPD 2005-2025 adalah Bone Bolango Maju dan Bermartabat.

Visi pembangunan daerah 2005 – 2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang bermuara pada peningkatan daya saing daerah dan kemakmuran masyarakat Bone Bolango.

Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bone Bolango 2005-2025:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan yang berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
2. Mewujudkan masyarakat Bone Bolango yang berkualitas
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah

Berdasarkan hasil analisis KLHS, diperoleh bahwa kesenjangan terbesar dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pencapaian indikator pada pilar sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bone Bolango dan hasil analisis KLHS, maka visi dan misi Kabupaten Bone Bolango akan berfokus pada :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

   Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahap ini ditandai dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan pangan dan hunian layak bagi masyarakat, terpenuhinya jaminan social ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas

   Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan oleh masyarakat Kabupaten Bone Bolango dan sekitarnya melalui mekanisme asuransi kesehatan serta terdapat peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan pada upaya promotif dan preventif sebagai perwujudan dan implementasi dari paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan yang berimbas pada menurunnya penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan penyakit yang disebabkan oleh faktor perilaku yang tidak sehat serta di sisi lain status gizi masyarakat meningkat, tumbuh kembang balita optimal, kesejahteraan meningkat, terwujudnya kesetaraan gender, dan terkendalinya pertumbuhan penduduk alami.

3. Mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan

   Upaya untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan ditandai dengan terciptanya Bone Bolango sebagai Kabupaten Konservasi. Hal ini dapat mencegah terjadinya penurunan kualitas air, lahan-lahan kritis dan bencana di Kabupaten Bone Bolango.Tersedianya system pengelolaan limbah secara terpusat, instalasai pengolahan limbah tinja, serta terciptanya sanitasi lingkungan yang baik.
4. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas

   Upaya ini ditandai dengan peningkatan IPM di Kabupaten Bone Bolango. Proporsi sekolah yang terakreditasi akan terus meningkat dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

6.2 Rumusan Alternatif

Subbab ini berisi rumusan pilihan atau alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap dan/atau kesenjangan KRP pada kebijakan dan strategi RPJMD yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya. Rumusan alternatif dan rekomendasi pada subbab ini merupakan hasil kegiatan diskusi antara kelompok kerja KLHS dan OPD terkait yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 di ruang rapat Kantor BAPPEDA Bone Bolango. Pemberian rumusan alternatif dan rekomendasi ditujukan pada pencapaian sasaran dan target TPB yang akan dicapai dan/atau diprioritaskan untuk dicapai; hal tersebut disajikan pada Tabel 67.

Tabel 64. Rumusan alternatif rekomendasi KRP Bone Bolango

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat	- Penurunan tingkat kemiskinan - Terpenuhinya jaminan social ketenagakerjaan	- Persentase penurunan tingkat kemiskinan hanya 1% - Jaminan social ketenagakerjaan masih rendah (gap 72%)	- Peningkatan kesempatan kerja secara terbuka tanpa diskriminasi - Peningkatan kesempatan kerja secara terbuka tanpa diskrimnasi - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin - Peningkatan manajemen distrubusi pengelolaan zakat infaq dan shadaqah (ZIS)	- Meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas UMKM untuk menambah nilai jual dan daya saing komoditas lokal, melalui pembuatan kebijakan pembangunan yang mendukung kemudahan akses UMKM pada jasa keuangan, teknologi informasi dan perdagangan - Meningkatkan iklim usaha/investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan/kendala perijinan dan pengelolaan usaha dengan selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar
	- Terpenuhinya kebutuhan pangan	- Prevalensi gizi buruk meningkat - Prevalensi stunting meningkat	- Peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berada pada Kecamatan Tilong Kabila, Kecamatan Kabila - Pengembangan kawasan agribisnis unggulan daerah yang mampu	- Meningkatkan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan keluarga melalui gerakan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi pangan, meningkatkan

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
			meningkatkan produksi pangan daerah - Peningkatan mutu, produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan - Peningkatan pembinaan/ sosialisasi/edukasi tentang PPH bagi masyarakat - Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung produksi pangan berbasis bahan lokal	pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, serta meningkatkan kelancaran distribusi dan akses pangan bagi masyarakat luas.
	- Terpenuhinya kebutuhan hunian layak	- Proporsi penduduk yang mendapatkan akses hunian layak masih rendah (gap 34,8%)	- Mengalokasikan lahan pemukiman pada perencanaan RTRW di kecamatan-kecamatan yang mengalami deficit ketersediaan lahan pemukiman yaitu Kecamatan Tapa, Bulango Ulu, Bulango Timur, Kabila, Bone Raya, Bone, Bulawa, Suwawa Tengah, Suwawa Selatan) - Melakukan penataan kawasan pemukiman di Kecamatan Tapa, Bulango Ulu, Bulango Timur, Kabila, Bone Raya, Bone, Bulawa, Suwawa Tengah, Suwawa Selatan - Mempertahankan lahan pertanian irigasi yang	- Menata pemukiman kumuh dan menyediakan kawasan perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dasar terhadap sanitasi, kebersihan, dan keamanan lingkungan pemukiman yang memadai dan merata - Mengadakan dan meningkatkan akses air minum bersih secara merata yang disertai dengan pengelolaan air limbah dan efisiensi penggunaan air secara terpadu di semua sector

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
			berada di Kecamatan Tilong Kabila dan Kecamatan Kabila - Meningkatkan pengawasan terhadap konversi lahan untuk pemukiman khususnya di lokasi yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung (Kecamatan Bulango Ulu, Kecamatan Pinogu, Kecamatan Suwawa Timur) - Segera menyelesaikan RDTR	
Mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas	- Meningkatnya kualitas layanan kesehatan - Peningkatan kesehatan masyarakat - Peningkatan status gizi masyarakat - Terkendalinya pertumbuhan penduduk alami - Terwujudnya kesetaraan gender	- Terjadi peningkatan persentase anak kurang gizi - Terjadi peningkatan prevalensi stunting - Masih rendahnya kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan - Terdapat 3,48% bayi yang belum menerima imunisasi dasar lengkap - Terjadi peningkatan prevalensi TBC - Belum ada kecamatan yang tereliminasi kusta - Tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba - Tingginya prevalensi merokok pada remaja	- Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya - Pelayanan kefarmasian - Peningkatan pengawasan obat – makanan, keamanan pangan dan bahan berbahaya - Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango	- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, - Memberikan sosialisasi untuk meningkatnya kesadaran menjaga kesehatan, imunisasi dasar pada bayi - Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan seksual dan reproduksi
Mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan	- Mencegah terjadinya penurunan kualitas air	- Kualitas air danau tercemar sedang - Kualitas air sungai tercemar sedang	- Membangun infrastruktur pengeloaan limbah dan sampah	- Menggalakkan kegiatan sosialisasi untuk hidup bersih dan penataan lingkungan yang bersih dan nyaman

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
	- Mencegah terjadinya peningkatan luasan lahan kritis - Mencegah terjadinya bencana -	- Kerugian ekonomi langsung oleh bencana meningkat - Belum tersedianya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	- Peningkatan kemampuan aparat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah domestic - Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sampah - Melakukan pengawasan secara optimal terhadap ijin-ijin terutama ijin pertambangan - Melakukan pengawasan secara optimal terhadap kegiatan pembukaan lahan pertanian terutama di daerah dengan kemiringan lereng curam	- Mengadakan akses air bersih secara merata di semua kalangan masyarakat - Mengadakan infrastruktur pengelolaan limbah dan sampah - Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap air minum bersih, sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi semua kalangan - Melakukan pengawasan secara optimal terhadap ijin-ijin terutama ijin pertambangan - Melakukan pengawasan secara optimal terhadap kegiatan pembukaan lahan pertanian terutama di daerah dengan kemiringan lereng curam
Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	- Terjadi peningkatan kualitas pendidikan - Terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manudia (IPM)	- Angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs masih belum mencapai target (Gap 28,15%) - Rata-rata lama sekolah masih belum mencapai target (gap 0,4 tahun) - Masih terdapat 4,97% sekolah yang belum terakreditasi	- Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan dasar untuk semua kalangan - Meningkat kualitas pendidikan melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang berkualitas - Peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan standar nasional	Meningkatkan kualitas pengajar dan mutu pendidikan, perbaikan dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pendidikan yang inklusif dan merata, pelaksanaan program wajib pendidikan dasar Sembilan tahun, serta tersosialiasinya arahan mengenai pentingnya pendidikan

Sumber : hasil analisis, 2020

6.3 Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021 – 2026

Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memastikan termuatnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango tahun 2021 – 2026, sekaligus sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, penyusunan RPJMD harus dilengkapi dengan proses penyusunan KLHS. Oleh karena itu, isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Tim Penyusun melalui proses pelaksanaan KLHS akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD. Pada penyusunan RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026, KLHS dilakukan terhadap dokumen utama Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bone Bolango dengan dilengkapi analisis atas Visi, Misi dan Program Bupati Terpilih 2021-2025 yang telah dijabarkan menjadi rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan.

Rekomendasi KLHS menjadi bahan pertimbangan bagi bupati dan seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program. Rekomendasi yang disetujui akan diinstruksikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk diintegrasikan sebagai masukan terhadap rancangan dokumen perencanaan yang akan dibuat. Secara khusus tindak lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi yang akan dirumuskan pada rancangan awal RPJMD ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan dalam RPJMD dan dituangkan dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
2. Capaian hasil evaluasi TPB dijadikan dasar dalam BAB II Gambaran Umum Daerah, BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah serta BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
3. Permasalahan dan isu strategis hasil kajian KLHS dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan isu strategis RPJMD dan dituangkan dalam BAB IV Permasalahan dan ISu Strategis Daerah
4. Revisi dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam RPJMD berdasarkan rekomendasi KLHS yang dirumuskan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan BAB VI Strategi dan Kebijakan Progam Pembangunan. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan arahan kebijakan, sasaran pokok dan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran RPJMD memuat rekomendasi KLHS

Hasil penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 – 2026 diintegrasikan oleh BAPPEDA Bone Bolango dengan menjadikannya pertimbangan penyusunan RPJMD Bone Bolango terutama dalam penyusunan sasaran pokok dan arah kebijakan pada setiap misi. Integrasi dimuat dalam Lampiran RPJMD dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Bone Bolango tahun 2021 – 2026.

Tabel 65. Matriks penelaahan integrasi KLHS dalam RPJMD

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	- Meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas UMKM untuk menambah nilai jual dan daya saing komoditas lokal, melalui pembuatan kebijakan pembangunan yang mendukung kemudahan akses UMKM pada jasa keuangan, teknologi informasi dan perdagangan - Meningkatkan iklim usaha/investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan/kendala perijinan dan pengelolaan usaha dengan selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar	Tahun 2019 : 16,12% Tahun 2020: 15,81%	- Belum optimalnya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi kelompok yang paling miskin - Belum terjaminnya masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro - Masih kurangnya jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan	- Telah tertuang dalam BAB V VISI, MISI , TUJUAN dan SASARAN - Tertuang dalam misi ke-3: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Merata dan Berkeadilan - Tertuang dalam tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi - Sasaran 4.1: Meningkatnya nilai investasi - Sasaran 4.2 : Meningkatnya partisipasi angkatan kerja - Sasaran 4.3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro - Sasaran 4.4: Meningkatnya pengembangan sector unggulan	- Peningkatan iklim Investasi yang kondusif yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan - Peningkatan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru - Menyediakan informasi tenaga kerja serta fasilitas pelatihan dan keterampilan - Mendorong terbentuknya regulasi tentang kemudahan akses masuk ke dunia kerja - Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro	- Program pemberdayaan sosial - Program rehabilitasi sosial - Program perlindungan dan jaminan sosial

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
				teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	- Tertuang dalam tujuan 5 : Penurunan Angka Kemiskinan - Sasaran 5.1 : Meningkatnya daya beli masyarakat - Sasaran 5.2 Meningkatnya pemerataan pendapatan	- Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan usaha mikro - Meningkatkan sektor unggulan daerah dengan memfokuskan pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata mulai dari produksi sampai dengan pemasaran yang ditunjang dengan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang berpihak peningkatan pendapatan masyarakat - Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar keluarga yang menjamin kelangsungan hidup keluarga - Pemberiam perlindungan sosial masyarakat melalui jaminan sosial kepada masyarakat miskin, anak yatim, janda,	

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
						penyandang cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya - Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana usaha, bantuan/fasilitasi modal usaha, bantuan menajemen dan pemasaran, serta pendidikan dan pelatihan	
Tujuan 2: Tanpa Kelaparan	2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	- Meningkatkan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan keluarga melalui gerakan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi pangan, meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, serta meningkatkan kelancaran	Stunting 28,94%	- Prevalensi gizi buruk meningkat - Prevalensi stunting meningkat	- Telah tertuang dalam BAB V VISI, MISI , TUJUAN dan SASARAN - Tertuang dalam misi ke-1: Mewujudkan masyarakat modern, berbudaya dan sejahtera - Tujuan 1: mewujudkan kualitas SDM dan sasaran ke 2: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Masyarakat	- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian - Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program peningkatan kapasitas sumber

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
		distribusi dan akses pangan bagi masyarakat luas.					daya manusia kesehatan - Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Tujuan 3: kehidupan sehat sejahtera	3.3.1(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 3.3.2(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 3.5.1(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba	- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, - Memberikan sosialisasi untuk meningkatnya kesadaran menjaga kesehatan, imunisasi dasar pada bayi - Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan seksual dan reproduksi	Prevalensi HIV 4% Insiden TB 37% Imunisasi dasar 91,52%	- Terjadi peningkatan persentase anak kurang gizi - Terjadi peningkatan prevalensi stunting - Masih rendahnya kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan - Terdapat 3,48% bayi yang belum menerima imunisasi dasar lengkap - Terjadi peningkatan prevalensi TBC - Belum ada kecamatan yang tereliminasi kusta - Tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba - Tingginya prevalensi merokok pada remaja	- Telah tertuang dalam BAB V VISI, MISI , TUJUAN dan SASARAN - Tertuang dalam misi ke-1: Mewujudkan masyarakat modern, berbudaya dan sejahtera - Tujuan 1: mewujudkan kualitas SDM dan sasaran ke 2: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Masyarakat	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan - Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Tujuan 4. Pendidikan yang berkualitas	4.1.1(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatkan kualitas pengajar dan mutu pendidikan, perbaikan	Persentase SD/MI terakreditasi minimal B : 95,03%	- Angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs masih	- Telah tertuang dalam BAB V VISI, MISI ,	- Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar	- Program pengelolaan pendidikan

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
	4.1.1(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 4.1.1(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat	dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pendidikan yang inklusif dan merata, pelaksanaan program wajib pendidikan dasar Sembilan tahun, serta tersosialiasinya arahan mengenai pentingnya pendidikan	Persentase SMP/MTs terakreditasi 77,55% APK SMP/MTs 78,79%	belum mencapai target (Gap 28,15%) - Rata-rata lama sekolah masih belum mencapai target (gap 0,4 tahun) - Masih terdapat 4,97% sekolah yang belum terakreditasi	TUJUAN dan SASARAN - Tertuang dalam misi ke-1: Mewujudkan masyarakat modern, berbudaya dan sejahtera - Tujuan 1: mewujudkan kualitas SDM dan sasaran ke 1: meningkatnya kualitas layanan pendidikan	di setiap jenjang Pendidikan formal dan non formal	- Program pendidik dan tenaga kependidikan
Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak	6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6.2.1(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 6.2.1(d) Jumlah desa/kelurahan yang	- Menggalakkan kegiatan sosialisasi untuk hidup bersih dan penataan lingkungan yang bersih dan nyaman - Mengadakan akses air bersih secara merata di semua kalangan masyarakat - Mengadakan infrastruktur pengelolaan limbah dan sampah - Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap air minum bersih,	Persentase rumah tangga yg memiliki akses layanan air minum layak 89,86% Populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan 80,83% Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 72,90% Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 40 desa	- Kualitas air danau tercemar sedang - Kualitas air sungai tercemar sedang - Kerugian ekonomi langsung oleh bencana meningkat - Belum tersedianya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	- Telah tertuang dalam BAB V VISI, MISI , TUJUAN dan SASARAN - Tertuang dalam misi ke-2: Memperkokoh Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan sebagai Prime Mover Keunggulan yang Berbasis Pelestarian Sumberdaya Alam - Tujuan 3: Mewujudkan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim, Ketahanan	- Belum tertuang dalam RPJMD strategi penanggulangan pencemaran air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
	Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 6.3.2(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi semua kalangan - Melakukan pengawasan secara optimal terhadap ijin-ijin terutama ijin pertambangan - Melakukan pengawasan secara optimal terhadap kegiatan pembukaan lahan pertanian terutama di daerah dengan kemiringan lereng curam	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 40 desa Kualitas air sungai sebagai sumber air baku adalah cemar sedang		Bencana dan berwawasan lingkungan - sasaran ke 6: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		
Tujuan 11. Kota dan pemukiman berkelanjutan	11.1.1(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 11.5.1(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	- Menata pemukiman kumuh dan menyediakan kawasan perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dasar terhadap sanitasi, kebersihan, dan keamanan lingkungan pemukiman yang memadai dan merata - Mengadakan dan meningkatkan akses air minum bersih secara merata yang disertai dengan pengelolaan air limbah dan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 65,20% Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang meningkat Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan belum tersedia	Proporsi penduduk yang mendapatkan akses hunian layak masih rendah (gap 34,8%)	- Telah tertuang dalam BAB V VISI, MISI , TUJUAN dan SASARAN - Tertuang dalam misi ke-2: Memperkokoh Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan sebagai Prime Mover Keunggulan yang Berbasis Pelestarian Sumberdaya Alam - Tujuan 3: Mewujudkan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim,	- Tertuang dalam strategi ke 9: Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk mewujudkan tertib tata ruang dan terhindar dari terjadinya bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
		efisiensi penggunaan air secara terpadu di semua sector			Ketahanan Bencana dan berwawasan lingkungan - sasaran ke 7: Mengurangi tingkat kerawanan bencana		

BAB VII. PENUTUP

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditujukan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan di Bone Bolango. Hasil analisis dalam kajian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap 220 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango diperoleh 82 indikator (37,27%) yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.
   Jumlah indikator yg belum mencapai target nasional adalah 52 indikator (23,64%). Indikator yang belum dilaksanakan adalah 22 indikator (10%). Indikator yang belum memiliki data adalah 64 indikator (29,09%).
2. Hasil analisis terhadap daya dukung lahan pertanian menunjukkan Kabupaten Bone Bolango dalam status surplus hingga Tahun 2030. Kebutuhan akan lahan pertanian masih mencukupi. Daya dukung untuk jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan beberapa kecamatan sudah terlampaui yaitu Kecamatan Botupingge, Bulango Selatan, Bulango Timur, Kecamatan Kabila, Kabila Bone, Kecamatan Suwawa, Tapa dan Kecamatan Tilong Kabila.
3. Hasil analisis terhadap daya dukung air menunjukkan Kabupaten Bone Bolango surplus air hingga Tahun 2030. Kondisi daya dukung untuk jasa ekosistem penyedia air menunjukkan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya surplus, terkecuali untuk Kecamatan Bulango Selatan dan Kecamatan Kabila.
4. Hasil analisis terhadap daya dukung pemukiman menunjukkan Kabupaten Bone Bolango suplus lahan pemukiman hingga Tahun 2030. Kecamatan yang mengalami deficit daya dukung lahan untuk pemukiman dalah Kecamatan Tapa, Kecamatan Bulango Ulu, Bulango Timur
5. Hasil analisis diperoleh 26 alternatif program prioritas dan 15 rekomendasi dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021-2026
6. Tersedianya analisis dan alternatif rekomendasi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dapat dijadikan rujukan dan diadopsi dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. KLHS untuk RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2021 – 2026 ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan yang

penyelenggaraannya memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, penyelenggaraan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini memerlukan keterlibatan aktif dan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan ini sangat penting dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan tindak lanjut KLHS. Dalam penyelenggaraan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup diwajibkan untuk melaksanakan KLHS KRP atau melaksanakan AMDAL atau UKL UPL sesuai dengan skala KRP dan potensi risiko yang diakibatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Alayli, M. A. (2005, December 4). *Resource Rich Countries and Weak Institutions: The Resource Curse Effect.* Retrieved Juli 30, 2021, from Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20110612124421/http://are.berkeley.edu/courses/EEP131/fall2006/NotableStudent05/Resource%20CurseM_Alayli.pdf

Apandi, T. d. (1997). *Peta Geologi Lembar Kotamobagu, Sulawesi, skala 1:250000.* Bandung: P3G.

Badan Pusat Statistik Bone Bolango. (2016). *Bone Bolango dalam Angka Tahun 2016.* Suwawa: BPS Bone Bolango.

Badan Pusat Statistik Bone Bolango. (2017). *Kabupaten Bone Bolango dalam Angka Tahun 2017.* Suwawa: BPS Bone Bolango.

Badan Pusat Statistik Bone Bolango. (2018). *Kabupaten Bone Bolango dalam Angka Tahun 2018.* Suwawa: BPS Bone Bolango.

Badan Pusat Statistik Bone Bolango. (2019). *Kabupaten Bone Bolango dalam Angka Tahun 2019.* Suwawa: BPS Bone Bolango.

Badan Pusat Statistik Bone Bolango. (2020). *Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka Tahun 2020.* Suwawa: BPS, Bone Bolango.

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2020). *Provinsi Gorotalo dalam Angka Tahun 2020.* Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.

BAPPEDA Bone Bolango. (2020). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW Kabupaten Bone Bolango.* Suwawa: BAPPEDA Bone Bolango.

BAPPEDA Kabupaten Bone Bolango. (2020). *Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.* Suwawa: BAPPEDA Bone Bolango.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo. (2019). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, 2019.* 2020: DLHK Provinsi Gorontalo.

Dinas PM-ESDM Transmigrasi. (2017). *Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo*. Retrieved from Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Penanaman Modal, ESD dan Transmigrasi: https://dpmesdmtrans.gorontaloprov.go.id/bpmptsp/potensi-pertambangan-dan-energi/

Dirjen Bina Pembangunan Daerah. (2019). *MEMASTIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI KLHS RPJMD.* Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementrian LHK. (2019). *Gorontalo*. Retrieved from Ditjen PPI Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: http://ditjenppi.menlhk.go.id/admin/berita-admin/obrolan/3038-gorontalo.html

Djuwita, F. (2019). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam UU No. 32 Tahun 2009.* Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Kawuwung, F. R. (2010). Potensi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Permasalahan dan Konservasi pada Ttingkat Pengembangan dan Pengawasan. *Jurnal Biologi - El Hayah, 1*(2). doi: https://doi.org/10.18860/elha.v1i2.1689

Murdiyarso, D. (2005). *Sepuluh Tahun Perjalan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim.* Jakarta: Buku Kompas.

Muta'ali. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan.* Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.

Nastiti, A., Kusumah, S. W., Monica, A., & Phanjaya, D. (2019). *Muatan Perhitungan Risiko Lingkungan dalam KLHS.* Bandung: PSLH ITB.

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. (2017, Juni 27). *Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*. Retrieved from Biodiversity Warrioirs KEHATI: https://biodiversitywarriors.kehati.or.id/artikel/taman-nasional-bogani-nani-wartabone/

SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 151/KEP/BUP.BB/123/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2024

BUPATI BONE BOLANGO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah wajib menyusun KLHS RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan RPJMD, dijelaskan bahwa Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD, Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan, Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan dan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf adan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2024;

SALINAN

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango danPohuwato di PropinsiGorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah

SALINAN

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan RPJMD;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone BolangoTahun 2020;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2024

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

SALINAN

a. menyusun agenda kerja penyusunan KLHS RPJMD;
b. melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
c. melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan;
d. melakukan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terdiri dari laporan induk KLHS dan ringkasan eksekutif KLHS RPJMD Kepada Bupati.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Bupati Bone Bolango melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Disampaikan kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
4. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Suwawa;
5. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Setda Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
6. Kepala SKPD yang bersangkutan;
7. Arsip.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 Agustus 2020
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA/IV.A
NIP. 19730606 200604 1 031

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 151/KEP/BUP.BB/123/2020
TANGGAL : 18 Agustus 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2024

KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2024

KOORDINATOR UMUM	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KETUA	:	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO
WAKIL KETUA	:	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIS	:	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO
ANGGOTA	:	1. KABID PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BAPPEDA LITBANG BONE BOLANGO 2. KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA LITBANG BONE BOLANGO 3. KABID PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SDM BAPPEDA LITBANG BONE BOLANGO 4. KABID PERENCANAAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO; 5. KABID INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI, UMKM KABUPATEN BONE BOLANGO 6. KABID PENCEMARAN, PENGENDALIAN DAN PENGRUSAKAN LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO
TIM AHLI	:	1. DR. FITRYANE LIHAWA, M.Si (Ketua) 2. DR. ENG SRI MARYATI (Anggota) 3. AHMAD ZAINURI, S.Pd, MT (Anggota)

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA/IV.A
NIP. 19730606 200604 1 031

BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752
Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1022/P/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENELITI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 2021-2026 ATAS BIAYA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango 2021-2026, maka perlu menetapkan tim peneliti kajian lingkungan hidup strategis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Tim Peneliti Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango 2021-2026 atas Biaya Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 18 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Surat Keputusan Bupati Bone Bolango 151/KEP/BUP.BB/123/2020 tentang Tim Pokja KLHS RPJMD Bone Bolango 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN TIM PENELITI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 2021-2026 ATAS BIAYA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan nama-nama tim peneliti kajian lingkungan hidup strategis revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Tugas tim peneliti, antara lain:

a. melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 dan bertanggung jawab penuh secara teknis, sistematika dan administratif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. batas waktu pemasukan Laporan Hasil Kajian selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan penelitian tersebut sepenuhnya adalah biaya APBD Kabupaten Bone Bolango.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO REKTOR

EDUART WOLOK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1022/P/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENELITI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGI 2021-2026 ATAS BIAYA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN PUSAT STUDI LINGKUNGAN DAN KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TIM PENELITI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO 2021-2026

I.	Pengarah	: 1. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST.,MT	(Rektor)
		2. Prof. Dr. Phil. Ikhfan Haris, M.Sc	(Wakil Rektor IV)
		3. Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si	(Ketua LPPM)
		4. Dr. Lanto Ningrayati Amali, S.Kom.,M.Kom	(Sek. LPPM)
II.	Ketua Tim	: Dr. Fitryane Lihawa, M.Si	(Kepala PSL-K)
III.	Tim Peneliti	: 1. Dr. eng, Sri Maryati, S.Si	
		2. Ahmad Zainuri, S.Pd.,MT	
IV.	Tim Surveyor	: 1. La Ode Juni Akbar (Mahasiswa S2 KLH)	
		2. Muh. Rifaldy Happy (Mahasiswa S2 KLH)	
		3. Moh. Fahry Bokingo (Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi)	
		4. Rizal Paris (Mahasiswa S1 Pendidikan Geografi)	

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
REKTOR

EDUART WOLOK